



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Jakarta





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI BESAR POM DI JAKARTA TAHUN 2023

BADAN POM RI · BALAI BESAR POM DI JAKARTA · 2024

JALAN AS'SYAFIYAH NO.133 RT 03/RW 03, CILANGKAP, CIPAYUNG, JAKARTA, 13870

TELP: 021-84304046 · FAKS: 021-84304047 · SUREL: bpom_jakarta@pom.go.id/bbpomjkt@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua oleh Allah, Tuhan Semesta Alam.



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk **Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2023**. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2023, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2023 untuk periode rencana strategis 2020-2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Balai Besar POM di Jakarta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sofiyani'.

Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2020-2024 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2023. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023, telah ditetapkan 11 sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan; dan
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2023 diukur terhadap 29 indikator kinerja utama dan 4 indikator direktif penugasan. Pada tahun 2023, dari 29 indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 18 indikator mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik” ($100\% < x < 120\%$), 5 indikator mencapai kriteria “Baik” ($=100\%$) dan 6 indikator

mempunyai capaian “Cukup” ($70\% \leq x < 100\%$). Sedangkan untuk semua indikator direktif penugasan mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik” ($100\% < x < 120\%$).

Capaian sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 1 berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99.72	Cukup
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	103.25	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	104.96	Sangat Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	106.70	Sangat Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100.02	Sangat Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	109.26	Sangat Baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100.89	Sangat Baik
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	104.39	Sangat Baik
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	107.28	Sangat Baik
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	Sangat Baik
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel	98.72	Cukup

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

Penjelasan terhadap tidak tercapainya target dua sasaran strategis dengan nilai Cukup yaitu Sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dan Sasaran strategis terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel sehingga memperoleh nilai cukup adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta disusun oleh beberapa Indikator Kinerja Utama diantaranya Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat. Capaian

IKU ini cukup kecil sebesar 89, 54 sehingga menurunkan capaian sasaran strategis. Kendala yang dihadapi yang menyebabkan tidak tercapainya target Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah kurangnya pengetahuan produsen pangan fortifikasi tentang ketentuan persyaratan produk fortifikasi. Sebagian besar Hasil Tidak Memenuhi Syarat Pengujian terlihat untuk garam kasar yang diproduksi oleh PIRT. Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan berbagai upaya pembinaan untuk produsen yang berada di lingkup wilayah kerja. Namun posisi Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat distribusi produk Obat dan Makanan, memungkinkan terpilihnya sampling produk yang dihasilkan oleh produsen di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan UPT BPOM setempat. Pada tahun selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara melekat terhadap hasil tindak lanjut koordinasi dan tetap memantau kualitas pangan fortifikasi yang beredar di wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta.

2. Sasaran strategis terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel yang disusun oleh Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Anggaran belum pernah mencapai target selama periode RPJMN Tahun 2020-2023. Balai Besar POM di Jakarta telah berupaya secara optimal untuk memenuhi target yang dapat terlihat dari prestasi raihan Nilai Kinerja Anggaran tertinggi peringkat 1 untuk Balai Besar/Balai POM pada Tahun 2022 dan peringkat 3 untuk Tahun 2023. Terhadap prestasi ini tetap perlu dilakukan upaya peningkatan utamanya pada parameter Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran. Tahun 2023, Balai Besar POM di Jakarta belum mencapai nilai optimal untuk RPD dikarenakan tidak dapatnya dilakukan revisi halaman III DIPA karena sedang dalam proses revisi anggaran yang disebabkan adanya Penggantian Antar Waktu Tokoh Masyarakat. Selain itu dipandang perlu untuk melaksanakan tindak lanjut berupa tinjau ulang terhadap target Nilai Kinerja Anggaran untuk Tahun 2024 agar lebih SMART.

Capaian sasaran strategis tambahan berupa direktif penugasan memperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam tabel 2 berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	100.23	Sangat Baik

N O	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	117.65	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	111.00	Sangat Baik
4.	Meningkatnya efektifitas koordinasi dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi DKI Jakarta	105.26	Sangat Baik

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Tambahan Berupa Direktif Penugasan

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar sebesar Rp 50.693.015.000,00 (lima puluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan pada tahun 2023 sebesar Rp 50.288.046.613,00 (lima puluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,20%.

Balai Besar POM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan Kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Digitalisasi layanan publik dan layanan internal untuk mendukung penerapan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Beberapa prestasi yang berhasil diraih selama Tahun 2023 antara lain Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Capaian Kinerja Anggaran tertinggi Tahun 2022, UPT dengan jumlah kegiatan bimbingan dan pembinaan terbanyak dan UPT dengan jumlah responden survei terbanyak, dan Pembina Sekolah PJAS Aman.

HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan, khususnya wilayah provinsi DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan terobosan di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kilas Balik Kegiatan *Food-Security* dalam Rangka Kegiatan SOME ASEAN ke-



41 di Jakarta, Pengawasan dan Kontribusi Badan POM dalam Mendukung Pangan Aman dan Berkualitas Pengawasan dan Kontribusi Badan

POM dalam Mendukung Pangan Aman dan Berkualitas Senior Officials Meeting on Energy ASEAN (41st ASEAN SOME) merupakan rangkaian kegiatan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang membahas tentang pentingnya ketahanan energi berkelanjutan melalui interkoneksi di ASEAN sebagai kawasan “*epicentrum of growth*”. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 19-23 Juni 2023 di kantor Sekretariat ASEAN Jakarta tersebut dihadiri oleh delegasi anggota negara ASEAN dimana Indonesia terpilih sebagai ketuanya. Jamuan yang disajikan untuk para

tamu menjadi perhatian penting dalam suksesnya kegiatan tersebut. Perlu dipastikan bahwa hidangan aman dari bahan berbahaya seperti



Formalin, Boraks, Rhodamin B, Metanil Yellow, Arsen, Sianida dan Nitrit. Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan Badan POM pusat selaku koordinator yang memiliki otoritas pengawasan obat dan makanan turut berkontribusi melakukan pengawasan keamanan pangan atau food-security dalam kegiatan penting ini. Pengawasan keamanan pangan dilaksanakan dari tanggal 16 Juni hingga 23 Juni 2023 pada beberapa lokasi yaitu Menara 165, De Samala Catering Cinere, The Darmawangsa Jakarta, Hutan Kota by Plataran serta Sekretariat ASEAN. Pengawasan keamanan pangan yang dilakukan meliputi inspeksi pangan, inspeksi dapur dan pengujian laboratorium yang dilakukan dengan metode uji cepat (*rapid-test*) terhadap bahan baku dan makanan siap saji.

Dengan pengawasan keamanan pangan yang baik semua hidangan yang disajikan dalam kegiatan *Senior Officials Meeting on Energy ASEAN (41st ASEAN SOME)* memenuhi syarat sehingga aman dikonsumsi para delegasi.

2. Talkshow Bincang Ala Milenial Ayo Sadar Pangan Aman dan Konsumsi Pangan Sesuai Kebutuhan di Event Pekan Raya Jakarta 2023

BBPOM di Jakarta berkolaborasi dengan Duta Pangan Aman SMAN 32 Jakarta mengadakan Bincang Ala Milenial, “Ayo Sadar Pangan Aman dan Konsumsi Pangan Sesuai Kebutuhan” pada hari Sabtu, 01 Juli 2023 di event Pekan Raya Jakarta. Pada kegiatan tersebut hadir Muhammad Ichsan, Aisyah Fitri dan Tasya Syifa sebagai Duta Pangan Aman SMAN 32 Jakarta. Duta Pangan Aman SMAN 32 mensosialisasikan Keamanan Pangan, Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa), Aplikasi BPOM Mobile. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day (WED) 2023, Duta Pangan Aman SMAN 32 juga menjelaskan Tips Mengurangi Sampah Makanan/*Food Waste*. Setelah menyampaikan materi, para Duta Pangan Aman SMAN 32 juga mengajak

pengunjung yang hadir untuk turut serta mempraktikkan langsung cara mengecek legalitas suatu produk pangan dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile.



Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat semakin cerdas dalam sadar memilih dan mengonsumsi pangan yang aman serta mengonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan.

3. The ASEAN Matters, Balai Besar POM di Jakarta Hadir Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan (Food-Security) dalam Rangka Agenda Pertemuan KTT ASEAN



Konferensi Tingkat Tinggi tingkat ASEAN (selanjutnya disingkat KTT ASEAN) merupakan pertemuan tahunan pemimpin negara-negara ASEAN yang

beranggotakan sebelas negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Timor Leste. Adapun konferensi ini bertujuan untuk menjalin dan memperkuat kerjasama multilateral dari segi ekonomi, politik, keamanan, sosial dan budaya; menjaga perdamaian dan stabilitas teritorial; meningkatkan solidaritas, membangun komunitas dan memperkuat persatuan negara-negara ASEAN; serta mampu berdaya saing secara sehat dan turut berperan aktif dalam kancah global demi kemajuan negara-negara anggota ASEAN. Dilansir dari ASEAN Chairmanship

2023, Indonesia bertujuan agar ASEAN tetap penting dan relevan, untuk menjadikan “ASEAN Matters”, yaitu menjadi ASEAN yang penting dan relevan bagi masyarakatnya serta bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia.

Sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT ASEAN tahun 2023, sejumlah instansi pemerintah berkoordinasi dan bersinergi untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan sukses, diantaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Beberapa agenda pertemuan seperti 2nd ASEAN Finance Minister Meeting and Central Bank Governors Meeting, ASEAN Health Ministers Meeting, 30th ASEAN Socio-Cultural Community Council Meeting dan Indonesia Sustainability Forum 2023 turut mengundang para tamu dan delegasi negara-negara anggota ASEAN yang membahas isu tentang ekonomi, kesehatan, sosial budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mendapat kepercayaan untuk memeriksa menu hidangan yang disajikan agar keamanan dan kesehatan para tamu undangan terjamin dari cemaran bahan kimia yang



berbahaya seperti Arsen, Sianida, Nitrit, Formalin, Rhodamin B, Kuning Metanil dan Boraks. Pengujian dilakukan dengan metode uji-cepat (rapid-test) sehingga hasilnya dapat diketahui dalam waktu singkat.

Pengawasan keamanan pangan oleh Balai Besar POM di Jakarta, bersama dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM, dilaksanakan pada tanggal 24-29 Agustus 2023 di beberapa lokasi seperti The Mulia (Senayan), The St.Regis Jakarta (Kuningan), Gedung Maramis AA Kemenkeu (Pasar Baru), Park Hyatt (Menteng), Hutan Kota by Plataran (Senayan) dan The Langham (SCBD Senayan). Dari keseluruhan pengujian yang dilakukan, hasilnya negatif

mengandung cemaran bahan kimia berbahaya sehingga dapat disimpulkan bahwa menu yang disajikan untuk para tamu undangan aman dikonsumsi.

4. Wujudkan Net Zero Carbon di Indonesia, BBPOM di Jakarta Ajak Lintas Sektor Menanam Bibit Mangrove



BBPOM di Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha dan organisasi profesi terkait Obat dan Makanan melaksanakan penanaman bibit mangrove di Kawasan

Hutan Mangrove Blok Elang Laut Jakarta Utara. Kegiatan sosial yang bertajuk “BPOM Net- Zero Carbon Programme” ini dilaksanakan secara serentak oleh Unit Pelaksana Teknis BPOM di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah sebagai upaya BPOM dalam menekan pencemaran lingkungan yang berpotensi meningkatkan pemanasan global melalui *Road Map Net Zero Carbon Programme BPOM 2023-2025*.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta (PPKUKM), Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta (KPKP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (PPAPP), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta (Parekraf), Kwartir Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kwartir Cabang Jakarta Utara, Gabungan Pengusaha Farmasi Provinsi DKI Jakarta (GP Farmasi), Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi DKI Jakarta (IAI), Himpunan Seminari Farmasi Distribusi Provinsi DKI Jakarta, Koperasi Maju serta perwakilan media (Berita Jakarta dan Teras Jakarta).

“BBPOM di Jakarta mendukung BPOM Net Zero Programme dengan menanam mangrove pada hari ini untuk menjaga kelestarian hutan, mengurangi jejak karbon, dan sebagai bentuk partisipasi dalam menyukseskan komitmen pemerintah wujudkan Indonesia Nol Emisi pada tahun 2060” tutur Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani, dalam sambutan pembukaannya. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, Ardhan, menambahkan dalam sambutannya mewakili Walikota Jakarta Utara, “Kami, pemerintah Jakarta Utara, mendukung program seperti ini sebagai bentuk kepedulian Masyarakat dan stakeholder terhadap kelestarian lingkungan.” Selain itu, dilakukan pula penandatanganan dukungan komitmen program oleh lintas sektor yang hadir.

Melalui penyediaan sebanyak 1761 bibit mangrove di Kawasan Hutan Mangrove Blok Elang Laut Jakarta Utara, diharapkan dapat memberi dampak untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan seimbang dalam konsep pendekatan organisasi triple bottom line melalui tiga dimensi utama yang berkelanjutan, yaitu People, Planet, dan Profit.

5. BBPOM Jakarta Raih Peringkat 3 Tertinggi UPT dengan Predikat Informatif di Lingkungan BPOM tahun 2023

BBPOM di Jakarta berhasil memperoleh capaian sebagai 3 (tiga) besar UPT dengan predikat “Informatif” dengan nilai 97, 51 dalam Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2023”. Pemberian penghargaan ini disampaikan pada Rapat Evaluasi Nasional yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember 2023. Pemberian penghargaan ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala BPOM, Lucia Rizka Andalusia yang diterima oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar. Lebih lanjut Lucia Rizka Andalusia menyampaikan

apresiasinya kepada UPT yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.



Penghargaan ini menunjukkan komitmen BBPOM di Jakarta sebagai UPT yang mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Badan Publik diwajibkan untuk menyampaikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada publik. Terdapat 3 jenis informasi yang perlu disampaikan, yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Ketiga jenis informasi yang terkait dengan BBPOM di Jakarta dapat diakses langsung melalui laman jakarta.pom.go.id. Selain itu, masyarakat juga dapat datang langsung ke BBPOM Jakarta untuk mengajukan permohonan layanan informasi publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
<i>HIGHLIGHT</i> KINERJA.....	6
DAFTAR TABEL.....	15
DAFTAR GAMBAR.....	20
BAB I.....	26
1.1. 26	
1.2. 27	
1.3. 28	
1.4. 29	
1.5. 37	
BAB II.....	42
2.1. 42	
2.2. 59	
2.3. 61	
2.4. 65	
2.5. 65	
BAB III.....	70
3.1. 70	
3.2. 76	
3.3. 120	
3.4. 138	
3.5. 178	
3.7. 238	
3.8. 282	
3.9. 298	
3.10. 308	
3.11. 327	
3.12. 335	
3.13. 350	
3.14. 360	

3.15. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV..... 72

4.1. 76

4.2. 77

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023	3
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Tambahan Berupa Direktif Penugasan	5
Tabel 3. Analisis Beban Kerja Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023	30
Tabel 4. Hasil Analisis Lingkungan Strategis Balai Besar POM di Jakarta	37
Tabel 5. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta	48
Tabel 6. Rencana Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023	61
Tabel 7. <i>Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023</i>	64
Tabel 8. Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan	65
Tabel 9. Predikat Kinerja ORganisasi Berdasarkan NPSS	66
Tabel 10. Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan	67
Tabel 11. Tingkat Efisiensi Kinerja Suatu Kegiatan	68
Tabel 12. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023	71
Tabel 13. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023	74
Tabel 14. Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023	76
Tabel 15. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023	79
Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	82
Tabel 17. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	84
Tabel 18. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023	85
Tabel 19. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 Beserta Kategorinya	89
Tabel 20. Analisis Efisiensi Anggaran untuk Makanan Tahun 2023	92
Tabel 21. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	94
Tabel 22. Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023	95
Tabel 23. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 beserta Kategorinya	97
Tabel 24. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2023	103
Tabel 25. Capaian Perubahan Targt Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023	107
Tabel 26. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase Makanan yang aman dan bermutu	109
Tabel 27. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase Pangan Fortifikasi Tahun 2023	111
Tabel 28. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 Untuk Kategori Fortifikasi	114
Tabel 29. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Target Persentase Pangan Fortifikasi	117

Tabel 30. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	119
Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Terkait Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	120
Tabel 32. Kriteria Indeks Persepsi	122
Tabel 33. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	129
Tabel 34. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	133
Tabel 35. Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	134
Tabel 36. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023	142
Tabel 37. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	149
Tabel 38. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	152
Tabel 39. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023	153
Tabel 40. <i>Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta</i>	154
Tabel 41. Nilai Indeks Kepuasan dri Responden Tahun 2023	156
Tabel 42. Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat per Tahun 2023	157
Tabel 43	157
Tabel 44. Nilai SKM per Unsur dan Unit Layanan Tahun 2023	157
Tabel 45 Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	162
Tabel 46. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	164
Tabel 47. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023	165
Tabel 48. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	171
Tabel 49. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	172
Tabel 50. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	173
Tabel 51. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023	178
Tabel 52. Tindak LanjutRekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	179
Tabel 53. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	180
Tabel 54. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kerling Jakarta Tahun 2023	187
Tabel 55. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023	189
Tabel 56. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	194
Tabel 57. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023	195
Tabel 58. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	196

Tabel 59. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2023	197
Tabel 60. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta	201
Tabel 61. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023	202
Tabel 62. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	203
Tabel 63. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta	204
Tabel 64. Penilaian Kinerja UPP BPOM	205
Tabel 65. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023	210
Tabel 66. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	212
Tabel 67. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Provinsi DKI Jakarta	213
Tabel 68. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif	219
Tabel 69. Pengukuran tingkat efektivitas KIE	220
Tabel 70. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	228
Tabel 71. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya	230
Tabel 72. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	231
Tabel 73. Realisasi Kegiatan Terkait PJAS Tahun 2023	232
Tabel 74. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman di BBPOM di Jakarta	233
Tabel 75. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	236
Tabel 76. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	237
Tabel 77. Realisasi desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023	238
Tabel 78. Realisasi Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2023	240
Tabel 79. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	243
Tabel 80. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Sebelumnya	245
Tabel 81. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	246
Tabel 82. Realisasi Kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023	247
Tabel 83. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	251
Tabel 84. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	252
Tabel 85. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	254
Tabel 86. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 Beserta Kategorinya	256

Tabel 87. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Target Persentase yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta Tahun 2023	257
Tabel 88. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya	260
Tabel 89. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	260
Tabel 90. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023	263
Tabel 91. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya	268
Tabel 92. <i>Indikator kinerja, target dan realisasi tahun 2023</i>	269
Tabel 93. <i>Capaian penindakan kejahatan di wilayah DKI Jakarta</i>	270
Tabel 94. <i>Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja terkait penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan</i>	271
Tabel 95. Tindak lanjut perbaikan kinerja penindakan	278
Tabel 96. Realisasi Indeks RB BBPOM di Jakarta Tahun 2023	279
Tabel 97. Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM	280
Tabel 98. Bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM	280
Tabel 99. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 Beserta Kategorinya	283
Tabel 100. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	288
Tabel 101. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	288
Tabel 102. Tingkat Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2022-2023	290
Tabel 103. Tabulasi Perkiraan Capaian Terhadap Target 2024 Sesuai Rencana Strategis	292
Tabel 104. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	296
Tabel 105. <i>Realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023</i>	297
Tabel 106. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023	301
Tabel 107. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023	306
Tabel 108. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023	308
Tabel 109. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023 tahun 2023	310
Tabel 110. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya	313
Tabel 111. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022	313
Tabel 112. Target Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Berdasarkan Realisasi 2023 dan Target 2024	317
Tabel 113. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta	320
Tabel 114. Bobot Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator	321
Tabel 115. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2023	323

Tabel 116. Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sebelum, Setelah dan pada PK 2024,	325
Tabel 117. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	327
Tabel 118. Revisi DIPA BBPOM di Jakarta Tahun 2023	66
Tabel 119 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan	66
Tabel 120 Rincian realisasi anggaran per Indikator	68
Tabel 121 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. Jumlah Pegawai Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan Gender	31
Gambar 3. Diagram Jumlah Distribusi Pegawai Balai Besar POM di Jakarta	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. Peta Wilayah DKI Jakarta	33
Gambar 5. Jumlah Sarana Produksi yang Berada dalam Pengawasan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. Jumlah Sarana Distribusi yang Berada dalam Pengawasan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023	35
Gambar 7. Peta Strategi Level II BSC Balai Besar POM di Jakarta	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta	48
Gambar 9. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2023	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan RPJMN	79
Gambar 11. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Balai Lain yang Setara	80
Gambar 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Jakarta Tahun 2020-2023	87
Gambar 13. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan RPJMN	Error! Bookmark not defined.
Gambar 14. Perbandingan Capaian dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan dengan lain yang sejenis/setara dan target nasional	89
Gambar 15. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2022 dan Target Tahun 2024	96
Gambar 16. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan RPJMN	96
Gambar 17. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan UPT BPOM Lainnya	98
Gambar 18. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja	Error! Bookmark not defined.
Gambar 19. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Baik Secara Internal maupun Eksternal	102
Gambar 20. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta antara tahun 2020-2023	105
Gambar 21. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan RPJMN	Error! Bookmark not defined.
Gambar 22. Perbandingan Persentase makanan yang aman dan bermutu di wilayah Jakarta Tahun 2023 dengan Balai lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional	107
Gambar 23. Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat di Wilayah Jakarta antara Tahun 2021-2023	113
Gambar 24. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan RPJMN	114
Gambar 25. Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat di Wilayah Jakarta Tahun 2022 dengan UPT BPOM Lainnya yang Sejenis/Setara dan Target Nasional	Error! Bookmark not defined.
Gambar 26. Grafik Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	123

Gambar 27. Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Jakarta tahun 2023 dengan RPJMN tahun 2020-2024 125

Gambar 28. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan RPJMN tahun 2020-2024 126

Gambar 29. Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 127

Gambar 30. Grafik Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 139

Gambar 31. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 140

Gambar 32. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024 140

Gambar 33. Perbandingan Indeks kepatuhan (Compliance Index) pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023 dengan Balai Lain 138

Gambar 34. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 140

Gambar 35. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 145

Gambar 36. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 153

Gambar 37. Perbandingan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 154

Gambar 38. Grafik Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di Wilayah Kerja BBBPOM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 158

Gambar 39. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Wilayah Kerja BBBPOM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 158

Gambar 40. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024 171

Gambar 41. Perbandingan indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 172

Gambar 42. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024 181

Gambar 43. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 dengan UPT lain yang sejenis/setara dan target nasional 183

Gambar 44. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024 189

Gambar 45. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023 dengan Balai Lainnya 190

Gambar 46. Persentase Realisasi Keputusan Penilaian Sertifikasi Terhadap Target Tahun 2023 182

Gambar 47. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di BBPOM di Jakarta 182

Gambar 48. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara	Error! Bookmark not defined.	
Gambar 49. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024		191
Gambar 50. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain	209	
Gambar 51. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024	216	
Gambar 52. Perbandingan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dibandingkan dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional Tahun 2023		
Error! Bookmark not defined.		
Gambar 53. Capaian Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023		205
Gambar 54. Grafik Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	224	
Gambar 55. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023	225	
Gambar 56. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara	226	
Gambar 57. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Provinsi DKI Jakarta	233	
Gambar 58. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	234	
Gambar 59. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	235	
Gambar 60. Grafik Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		
Error! Bookmark not defined.		
Gambar 61. Indikator pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023		221
Gambar 62. Grafik Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta		
Error! Bookmark not defined.		
Gambar 63. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta		223
Gambar 64. Perbandingan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan UPT BPOM Lainnya	Error! Bookmark not defined.	
Gambar 65. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM Jakarta		234
Gambar 66. Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman oleh Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar di Bandung, dan Balai Besar di Makassar tahun 2023	Error! Bookmark not defined.	
Gambar 67. Grafik Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Jakarta		240
Gambar 68. Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 dan 2022	266	
Gambar 69. Perbandingan jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain yang sejenis/setara	Error! Bookmark not defined.	
Gambar 70. Grafik Jumlah Pasar Aman Bebrasi Komunitas di BBPOM di Jakarta		248
Gambar 71. Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020 dan 2021	277	
Gambar 72. Perbandingan realisasi jumlah jumlah pasar pangan aman		

berbasis komunitas dengan Balai Lainnya yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta	278	Gambar 73. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta	284
Perbandingan realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	Error! Bookmark not defined.	Gambar 74. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	256
Gambar 76. Perbandingan Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di BBPOM Jakarta antara tahun 2020-2023	Error! Bookmark not defined.	Gambar 77. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta	263
Gambar 78. Perbandingan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diwilayah Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan Target Nasional	Error! Bookmark not defined.	Gambar 79. Perbandingan capaian indikator kinerja efektivitas penindakan BBPOM di Jakarta tahun 2020-2024	271
Gambar 80. Perbandingan kinerja BBPOM di Jakarta dengan UPT lainnya terkait keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	Error! Bookmark not defined.	Gambar 81. Grafik Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023	281
Gambar 82. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra	311	Gambar 83. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra	313
Gambar 84. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024.	320	Gambar 85. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra	321
Gambar 86. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara	Error! Bookmark not defined.	Gambar 87. Grafik Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024	299
Gambar 88. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra	Error! Bookmark not defined.	Gambar 89. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain	301
Gambar 90. Perbandingan realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023	337	Gambar 91. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP BBPOM di Jakarta	Error! Bookmark not defined.
Gambar 92. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara	308	Gambar 93. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal di BBPOM Jakarta	Error! Bookmark not defined.
Gambar 94. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara	316	Gambar 95. Grafik Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	347
Gambar 96. Nilai EKA BBPOM Jakarta per 31 Desember 2023 pada aplikasi SMART DJA (https://monev.kemenkeu.go.id/app2023/satker/laporansatker , 11-01-24 08:59:19)	Error! Bookmark not defined.	Gambar 97. Nilai IKPA BBPOM Jakarta tahun 2023 pada aplikasi OMSPAN	322
Gambar 98. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Tahun 2023 pada IKU Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	353	Gambar 99.	

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Tahun 2020-2023 pada IKU Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta **Error! Bookmark not defined.****Gambar 100.** Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra pada IKU Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta 324

Gambar 101. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Tahun 2023 pada IKU Nilai Kinerja Anggaran dengan BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Makasar **Error! Bookmark not defined.****Gambar 102.** Realisasi Belanja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan 31 Desember 2023 69



BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full-spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan

berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai empat inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif

bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Perubahan organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka reformasi birokrasi. Selanjutnya, Balai Besar POM di Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Balai Besar POM di Jakarta

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

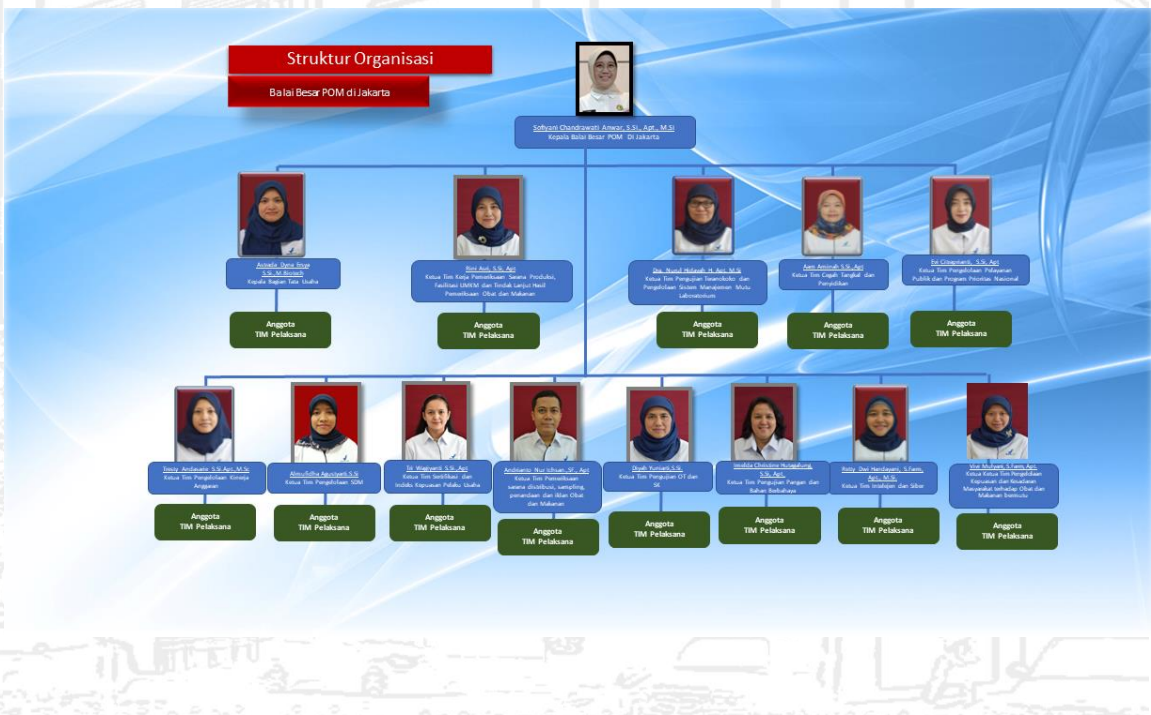
2. Fungsi Balai Besar POM di Jakarta

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;

- h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional. Perkuatan koordinasi internal dilaksanakan melalui penugasan Ketua Tim pada 4 kelompok fungsi yaitu Pengujian, Pemeriksaan, Informasi dan Komunikasi serta Penindakan. Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sumber daya manusia, fasilitas pendukung, anggaran, kondisi geografis dan demografi serta sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diawasi. Berikut penjelasan mengenai aspek strategis yang dimaksud:

a. Lingkungan Internal

Aspek strategis dari segi lingkungan internal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024, berdasarkan analisis beban kerja per Desember 2023, Balai Besar POM di Jakarta membutuhkan pegawai sebanyak 151 orang. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis dan perubahan kondisi masyarakat akibat pandemi COVID-19, dilakukan kembali analisis beban kerja tahun 2020 dengan hasil sebagaimana tercantum dalam tabel 3 berikut:

JENIS JABATAN		KEBUTUHAN	EKSISTIN G	GAP
Jabatan Struktural	Struktural	2	2	0
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	23	21	2
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	56	35	21
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	57	25	32
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	Fungsional	0	7	-7
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	Fungsional	0	5	-5
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	Fungsional	0	1	-1
Jabatan Fungsional terkait dukungan manajemen	Fungsional	27	11	16

Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	Pelaksana	0	14	-14
JUMLAH		165	121	44

Tabel 3. Analisis Beban Kerja Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

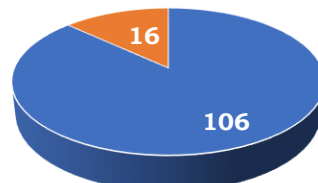
Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa total kebutuhan SDM di BBPOM di Jakarta adalah 65 orang, dan jumlah pegawai *eksisting* per 31 Desember 2023 adalah 121 orang, sehingga terdapat gap kebutuhan sebesar 44 orang atau pemenuhan kebutuhan pegawai di BBPOM Jakarta sebesar 73,33%.

Selain itu, masih terdapat pegawai di BBPOM Jakarta yang masih menduduki jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori Keterampilan (jenjang Terampil, Mahir dan Penyelia) sebanyak 13 orang. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), kebutuhan PFM jenjang Keterampilan tidak diperhitungkan kebutuhannya dan bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) kategori Keterampilan yang masih menduduki jabatan tersebut, wajib ditingkatkan kompetensinya untuk memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV paling lama 10 tahun sejak peraturan tersebut berlaku.

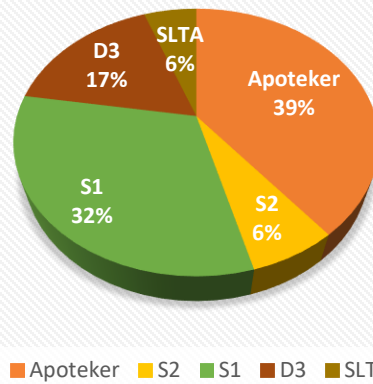
Disamping itu, masih terdapat 14 orang pegawai yang masih menduduki jabatan pelaksana (Fungsional Umum). Sebanyak 5 orang akan memasuki masa purnabakti dalam waktu 8 tahun ke depan dan sebanyak 6 orang masih dapat ditingkatkan kompetensinya dalam rangka memenuhi syarat untuk pengangkatan jabatan. Berdasarkan gender, pegawai Balai Besar POM Jakarta terdiri dari 106 orang perempuan dan

16 orang laki-laki dengan proporsi 86,88% perempuan dan 13,11% laki-laki sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 berikut:

Jumlah Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Gender



Jumlah Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Strata Pendidikan



Berdasarkan strata pendidikan, jumlah distribusi pegawai Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta secara optimal. Dari Gambar 3, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai BBPOM di Jakarta berpendidikan profesi apoteker dan S1. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan pendidikan non-sarjana sebanyak 23%. Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan organisasi yang berbasis saintifik seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, untuk dapat menduduki jabatan fungsional tersebut minimal pendidikan pegawai adalah S1 (Sarjana). Hal ini menjadikan pegawai yang saat ini telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan Pendidikan di bawah tingkat Sarjana, secara bertahap telah ditingkatkan pendidikannya.

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki satu bangunan gedung dengan total luas tanah sekitar 2.750,00 m² dan luas bangunan sekitar 2.404,00 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Balai Besar POM di Jakarta juga berpartisipasi aktif dalam

penanganan Pandemi COVID-19 dan telah memiliki Laboratorium Uji BSL2 yang telah mendapat nomor NAR dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya.

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

Fitur unggulan Balai Besar POM di Jakarta diantaranya adalah: (1) mobil laboratorium keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017; (2) digitalisasi nomor antrian terkait layanan konsultasi tatap muka sejak tahun 2020; (3) program Kerling Jakarta sejak tahun 2021; (4) fitur inovatif Laron Baja sejak tahun 2020; (5) layanan Sultan Betawi di Mall Pelayanan Publik Jakarta Selatan sejak tahun 2021; serta (6) UPT Balai Besar/Balai POM yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

b. Lingkungan Eksternal

Aspek strategis dari segi lingkungan eksternal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis dan Demografis

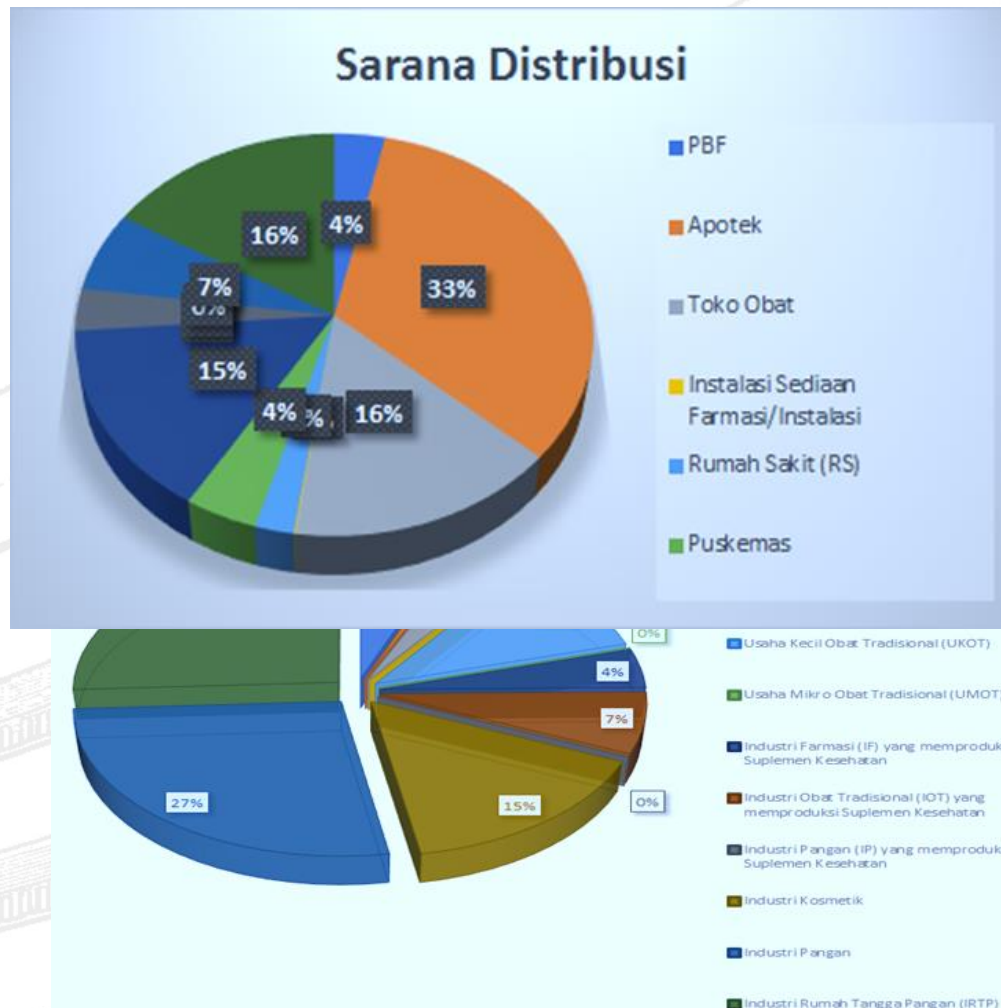
Provinsi DKI Jakarta terletak pada $6^{\circ}12'$ LS dan $106^{\circ}48'$ LS dengan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 11,25 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 16.937 jiwa/km² pada tahun 2021. Adapun peta wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 4.



2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana

produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6 berikut.



Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 4 berikut:

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan - Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Jakarta menerapkan RB - Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis - Masih memerlukan waktu yang lama dalam Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian - ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu - Sarana prasarana kantor

<p><i>premarket</i> dan <i>postmarket</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas - Memiliki <i>roadmap</i> Pengembangan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan - Integrasi pelayanan publik dengan pemerintah daerah melalui mal pelayanan publik dan program inovasi kerling jakarta - Fasilitas laboratorium yang memadai dan telah terakreditasi ISO IEC 17025 : 2017 - Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media <i>online</i>, cetak dan media sosial - Kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan termasuk aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum, - Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015 dan ISO SNI 37001:2016 	<p>belum optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sistem TIK dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum terintegrasi secara optimal - Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi - Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum - Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes - Adanya peraturan yang berbenturan pada saat pengajuan permohonan notifikasi kosmetika
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan - Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat - Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat - Perkembangan <i>e-commerce</i> ke depan cukup besar - Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan - Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi - Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin maraknya penjualan obat dan makanan <i>online</i> - Besarnya pangsa pasar obat tradisional - Berkembangnya modus operandi pelanggaran di bidang obat dan makanan yang lebih kompleks - Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera - Rantai birokrasi di pemerintah daerah yang memperlambat gerak koordinasi - Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional - Peningkatan penggunaan produk-produk <i>lifestyle</i> yang belum memiliki ketentuan pengawasan yang jelas

<ul style="list-style-type: none"> - Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia - Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan secara <i>online</i> - Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan - Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi - Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik - Jakarta memiliki penduduk yang telah melek teknologi dan aktif menggunakan media sosial sehingga lebih mudah menyebarkan informasi terkait Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya saing pelaku usaha sehingga menambah jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang harus diawasi - Meningkatnya penyebaran informasi <i>hoax</i> terkait obat dan makanan - Pengetahuan produsen pangan fortifikasi yang terbatas - Memastikan pelaku usaha memahami untuk melaporkan perubahan terhadap aspek apapun pada produk terapeutik, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan formulasi, metoda, manufaktur, spesifikasi untuk obat dan bahan baku - Modus operandi pelanggaran norma dan etika terkait penyusunan dan gratifikasi semakin beragam
--	---

Tabel 4. Hasil Analisis Lingkungan Strategis Balai Besar POM di Jakarta

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan utama yang merupakan isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

1. Pencegahan *Stunting* untuk Indonesia Sehat menuju Indonesia Emas 2045

Badan POM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan *post-market* (purna jual) dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan

penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Tindak lanjut terhadap isu ini dimonitor melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Balai Besar POM di Jakarta dengan direktif penugasan pada Indikator Kinerja Utama tambahan persentase keterlibatan UPT dalam Program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

2. Tren penjualan produk Obat dan Makanan secara daring

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Jakarta melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online* berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman. Selain itu diperlukan peningkatan penggalangan kerjasama pengawasan dengan pihak *marketplace* dan jasa logistik. Saat ini, telah dilaksanakan diskusi, sosialisasi dan tukar informasi untuk membangun jejaring serta penandatanganan MoU dengan Asosiasi Jasa Logistik (Aprindo) dan *Indonesian E-Commerce Association (IDEA)*.

3. Informasi hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat

dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui intensifikasi pemanfaatan media sosial dengan jargon Kata BPOM, konten di media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, Car Free Day, talkshow, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile, dan penyebaran informasi melalui website BPOM.

4. Maraknya pelanggaran pada peredaran Obat dan Makanan

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan dengan beredarnya produk Obat-Obat Tertentu (Tramadol dan THP) yang dijual pada rantai distribusi yang tidak seharusnya, misal di sarana distribusi kosmetika dan toko online. Selain itu, marak pula Peredaran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) pada depot jamu dan Gerobak Obat. Masih terdapat pula sarana pelayanan kefarmasian yang mengedarkan produk Obat namun belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan.

5. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan *Online Single Submission*

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS dapat memudahkan perizinan berusaha, namun memiliki tantangan pemastian kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang undangan. Hal ini disebabkan tidak dipersyaratkannya verifikasi lapangan untuk Cara Produksi yang Baik (CPB) di awal pengajuan izin usaha. Oleh karenanya, dibutuhkan perkuatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan 6 Kota Administrasi dan OPD terkait untuk melakukan pembinaan dengan pemenuhan tool pengawasan dan beberapa kegiatan pendukung, seperti pemberdayaan petugas melalui pelatihan

6. Implementasi Instruksi Presiden No.3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun

lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Jakarta sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

7. Kurangnya *awareness* masyarakat terhadap *Antimicrobial Resistance*

Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter masih menjadi permasalahan kesehatan yang dapat berdampak pada kekebalan/resistensi mikroba terhadap antibiotik. Perlu dilakukan sosialisasi secara massif dan kerjasama dengan sarana pelayanan kefarmasian untuk mencegah konsumsi antibiotik tanpa resep

8. Implementasi program Reformasi Birokrasi

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi dalam rangka memenuhi predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu: **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan mengacu pada misi Badan POM. telah ditetapkan misi Balai Besar POM di Jakarta sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah

dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan

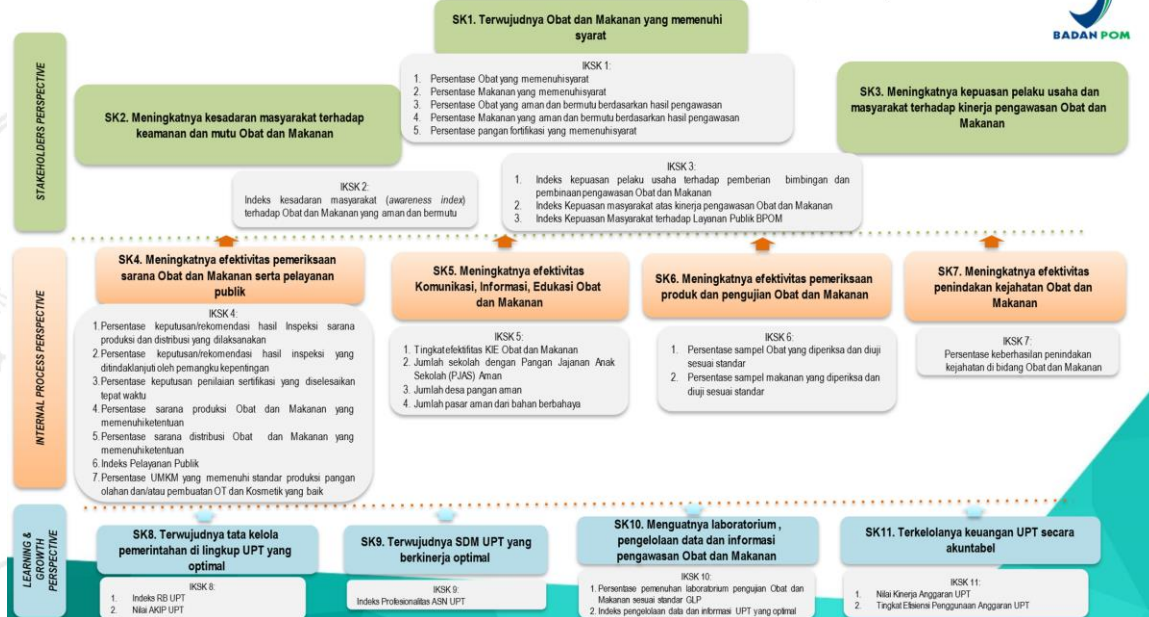
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan; dan
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customers & Stakeholders*, maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta sebagai berikut:

DRAFT REVISI PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/BALAI POM (2020-2024)



Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala Badan POM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM. Dalam kurun waktu 5 tahun (periode 2020-2024), diharapkan Balai Besar POM di Jakarta dapat mencapai sasaran strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis Badan POM sehubungan dengan Balai Besar POM di Jakarta menetapkan 11 sasaran strategis dengan 28 indikator yang dilengkapi dengan target kinerja pada tahun 2024. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam Tabel 5 berikut.

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						
Stakeholder						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	87.5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	92.5
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	85
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91.9
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	95.2
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74.98	76.65	78.33	80.16
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	95.25

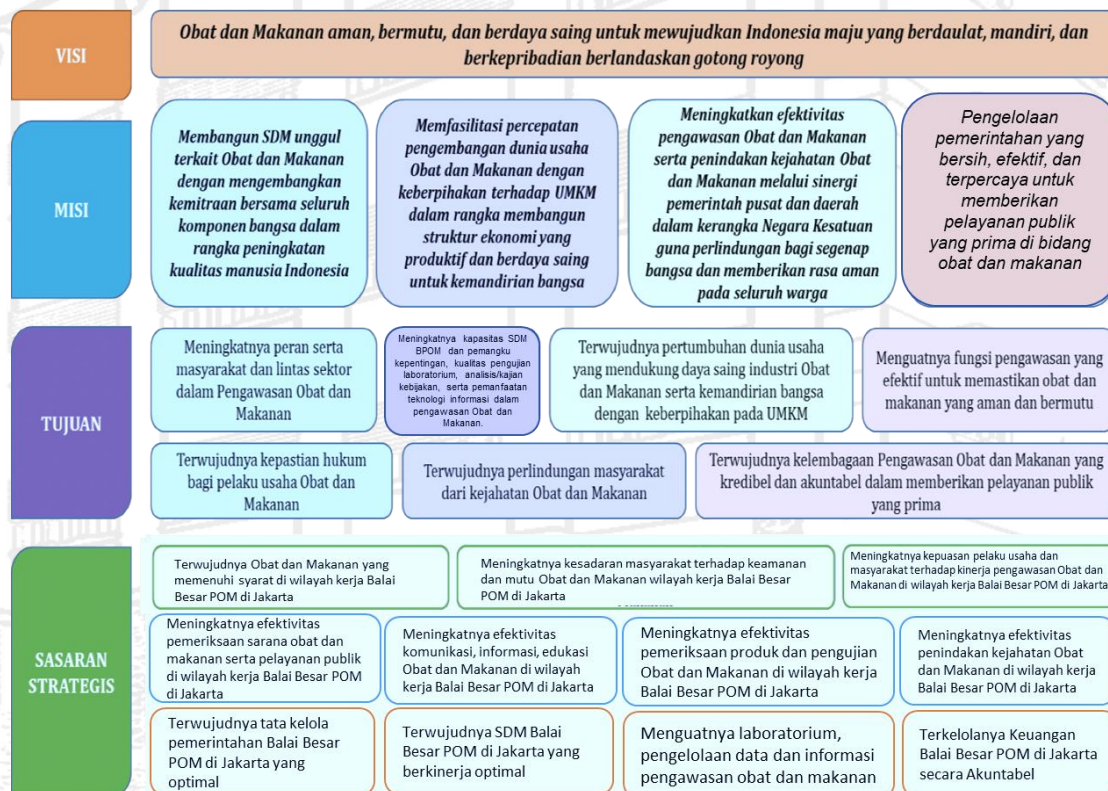
Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process						
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	90.9
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	98.7
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	74
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80
	Indeks Pelayanan Publik	3,51	4.20	4,72	4,40	4,9
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	100
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	95	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	96.7
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
Learning and Growth						
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	91.41
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	83.66
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	93.42
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	91.5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	88
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	89.9
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	96.03
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	86
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	60

Tabel 5. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis berdasarkan renja dapat dijelaskan pada Gambar 8 sebagai berikut:



Dalam kurun waktu 5 tahun (periode 2020-2024), diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia

seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan penjabaran masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

Terdapat 3 sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perspektif pemangku kepentingan, yaitu:

1. Sasaran Strategis I, yaitu **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen atau masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- i. Pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat dengan maksud untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- ii. Kedua, penilaian pra-edar (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- iii. Ketiga, pengawasan purna-edar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi

produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Balai Besar POM di Jakarta.

- iv. Keempat, pengujian produk di laboratorium. Produk hasil *sampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi atau tidak memenuhi syarat.
- v. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full-spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Adapun keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 82%;**

2. **Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 96%;**
 3. **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 82%;**
 4. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 84%; dan**
 5. **Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat yang ditargetkan sebesar 90%.**
2. Sasaran Strategis II, yaitu **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Badan POM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri.

Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu **indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 89 pada akhir tahun 2023.**

3. Sasaran Strategis III, yaitu **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Jakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Badan POM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Namun di sisi lain, layanan publik Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 88.8 pada tahun 2023;
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 78.33 pada tahun 2023; dan

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Badan POM dengan target sebesar 92 pada tahun 2023.

b. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Terdapat 4 sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perspektif proses internal, yaitu:

1. Sasaran Strategis IV, yaitu **meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full-spectrum*) yang mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten atau memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dilakukan dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 91% pada akhir tahun 2023;**
2. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 82% pada akhir tahun 2023;**
3. **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 89% pada akhir tahun 2023;**
4. **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65% pada akhir tahun 2023;**
5. **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 78% pada akhir tahun 2023; dan**

6. **Indeks pelayanan publik dengan target 4,40 pada akhir tahun 2023.**
7. **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target 79 pada akhir tahun 2023.**

2. Sasaran Strategis V, yaitu **meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu, melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini dilakukan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 95.8 pada akhir tahun 2023;**
2. **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 90 pada akhir tahun 2023;**
3. **Jumlah desa pangan aman dengan target 28 pada akhir tahun 2023; dan**
4. **Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 4 pada akhir tahun 2023.**

3. Sasaran Strategis VI, yaitu **meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan

meningkatkan efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Disamping itu, Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dilakukan dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2023; dan**
- 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2023.**

4. Sasaran Strategis VII, yaitu **meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan.

Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis

ini, dilakukan dengan indikator kinerja utama (IKU), yaitu **persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 61% pada akhir 2023.**

c. Perspektif Pembelajaran (*Learning & Growth Perspective*)

Terdapat 4 sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perspektif pembelajaran, yaitu:

1. Sasaran Strategis VIII, yaitu **terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 area perubahan. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM.

Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain: (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis; (ii) penguatan organisasi; dan (iii) dukungan anggaran.

Adapun sumber daya, yang meliputi *5M (man, material, money, method, and machine)* merupakan modal penggerak organisasi.

Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jakarta untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dilakukan dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta dengan target 84.4 pada akhir tahun 2023; dan**
 - 2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 81 pada akhir tahun 2023.**
2. Sasaran Strategis IX, yaitu **terwujudnya Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Balai Besar POM di Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (ii) pengadaan; (iii) pola karir, pangkat dan jabatan; (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin;

(v) promosi-mutasi; (vi) penghargaan, penggajian dan tunjangan; (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dengan target sebesar 84.75 pada tahun 2023.**

3. Sasaran Strategis X, yaitu **menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Badan POM di era digital ini. Balai Besar POM di Jakarta telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum dimutakhirkan secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 87% pada tahun 2023; dan**
2. **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal dengan target 2.5 pada tahun 2023.**

4. Sasaran Strategis XI, yaitu **terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga, salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis XI, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut: **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target 93.7 sebesar pada tahun 2023.**

2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
	02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96
	03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
	04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
	05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	89
03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.8
	08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78.33

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
	09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
	11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82
	12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
	13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
	14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
	15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,40
	16-Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
	18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90
	19-Jumlah desa pangan aman	28
	20-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	84.4
	25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81
09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84.75

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
	28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2.5
11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93.7

Tabel 6. Rencana Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 50.693.015.000,00 (lima puluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta.

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No.53 tahun 2014, Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi,

melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya. Berikut adalah tabel perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Jakarta
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 20 Desember 2022

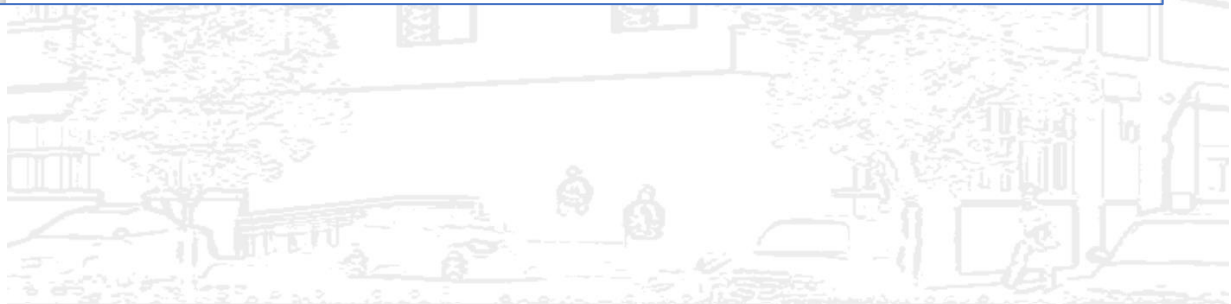
Pihak Pertama

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Jakarta

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.8
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.33
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.55

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	88
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	81
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.7



2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertera pada Tabel 7 berikut:



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82%	82%	82%	82%	508.813.550
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96%	96%	96%	96%	284.565.050
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%	82%	82%	82%	508.813.550
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84%	84%	84%	84%	284.565.050
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90%	90%	90%	90%	50.898.400
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				89	372.657.300
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				88.8	37.455.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				78.33	434.766.850
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				92	176.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91%	91%	91%	91%	374.182.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82%	82%	82%	82%	374.182.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89%	89%	89%	89%	259.500.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65%	65%	65%	65%	149.257.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78%	78%	78%	78%	599.107.000
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	-	-	4.55	4.55	434.766.850
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	24.2	38.3	39.2	79	76.029.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8	95.8	95.8	95.8	4.697.413.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25% (progr ess)	49% (progr ess)	78% (progr ess)	88	703.121.000
		Jumlah desa pangan aman	17.5% (progr ess)	41.25% (progr ess)	52.5% (progr ess)	28	1.059.366.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	15% (progr ess)	65% (progr ess)	85% (progr ess)	4	106.629.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	100%	436.125.900
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	100%	265.726.500
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	30%	45%	61%	1.170.678.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta				84.4	318.155.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta				81	54.019.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta				84.75	28.368.739.000






No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>				87	5.877.061.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2.5	2.5	2.5	2.5	73.925.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	77	80	86	93.7	28.600.000

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Jakarta sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator yang didukungnya. Selanjutnya dihitung capaian setiap indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Sub Bagian Substansi Program dan Evaluasi. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Tabel 8. Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Kemudian, nilai dari seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif (NP) dengan formula berikut:

$$NP = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

Keterangan:

NP : Nilai Perspektif

NSS : Nilai Sasaran Strategis

SS : Sasaran Strategis

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$






Keterangan:

NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

NP : Nilai Perspektif




SS : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Tabel 9. Predikat Kinerja ORganisasi Berdasarkan NPSS

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Tabel 10. Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

NO	TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 - 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 - 0,6	92% (EFISIEN)
5	0,61 - 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 - 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 - 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)
8	1,21 - 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 - 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 - 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

Tabel 11. Tingkat Efisiensi Kinerja Suatu Kegiatan



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Jakarta semua sasaran strategis telah dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya sebagaimana tercantum dalam Tabel 12 berikut.

Perspektif/SS		Nilai Perspektif/NSS 2023	Nilai Perspektif/NSS 2022
Stakeholder		102.64	102.47
SS1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	99.72	96.55
SS2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	103.25	104.64
SS3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	104.96	106.21
Internal Process		104.22	103.56

Perspektif/SS		Nilai Perspektif/NSS 2023	Nilai Perspektif/NSS 2022
SS4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	106.70	104.64
SS5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100.02	109.75
SS6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	109.26	100.17
SS7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100.89	99.68
Learning and Growth		107.60	105.89
SS8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	104.39	104.12
SS9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	107.28	104.16
SS10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	115.99
SS11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel	98.72	99.29
NPSS		104.82 (Istimewa)	103.97 (Istimewa)

Tabel 12. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta total terhadap 3 perspektif sesuai peta strategi yaitu *Stakeholder*, *Internal Process* dan *Learn and Growth* memperoleh predikat Istimewa untuk Tahun 2022 maupun 2023. Terdapat peningkatan sebesar 0.85 poin pada capaian NPSS tahun 2023 dan secara konsisten nilai NPS Sasaran meningkat dengan predikat sangat baik.

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.04.01.2.21.11.23.881 tanggal 21 November 2023 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang Dikecualikan dalam Perhitungan NPSS Tahun 2023, terdapat satu Indikator Kinerja penyusun sasaran strategis Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang dikecualikan yaitu Persentase Pemenuhan Laboratorium pengujian Obat

dan Makanan sesuai Standar GLP. Hal ini disebabkan dampak dari pemindahan alat laboratorium akibat diterapkannya konsep baru regionalisasi laboratorium sehingga terdapat pengurangan nilai pemenuhan standar ruang lingkup peralatan dan standar ruang lingkup personel penguji yang signifikan pada beberapa Unit pelaksana Teknis.

Capaian Istimewa terhadap NPSS ini harus terus ditingkatkan sebagai parameter keberhasilan pencapaian kinerja yang memberikan dampak secara internal kepada organisasi maupun dampak eksternal kepada Masyarakat penerima layanan. Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	82	87,48	106,68	Sangat Baik
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	92,9	96,77	Cukup
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	78,34	95,54	Cukup
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	92,45	110,06	Sangat Baik
		5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	80,59	89,54	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	6 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89	91,89	103,25	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,8	97,4	109,68	Sangat Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,33	80,1	102,26	Sangat Baik
		9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	92	94,71	102,95	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91,85	100,93	Sangat Baik
		11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	90,87	110,82	Sangat Baik
		12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	96,95	108,93	Sangat Baik
		13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	73,93	113,74	Sangat Baik
		14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	79,96	102,51	Sangat Baik
		15 Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	4,55	4,84	106,37	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	79	79	100,00	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja	17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,86	100,06	Sangat Baik
		18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	100,00	Baik
		19 Jumlah desa pangan aman	28	28	100,00	Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	Balai Besar POM di Jakarta	20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	4	100,00	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	Baik
		22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,51	98,51	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61	61,54	100,89	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24 Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	84,4	90,41	107,12	Sangat Baik
		25 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	82,34	101,65	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,75	90,92	107,28	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>	87	86,28	99,17	Cukup
		28 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,5	3	120,00	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93,7	92,5	98,72	Cukup

Tabel 13. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

Pencapaian sasaran strategis tahun 2023 diukur terhadap 29 indikator kinerja utama dan 4 indikator direktif penugasan. Pada tahun 2023, dari 29 indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 18 indikator mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik” ($100\% < x < 120\%$), 5 indikator mencapai kriteria “Baik” ($=100\%$) dan 6 indikator mempunyai capaian “Cukup” ($70\% \leq x < 100\%$). Sedangkan untuk semua indikator direktif penugasan mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik” ($100\% < x < 120\%$).

Kriteria sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui kampanye massif di media sosial, penyuluhan, brosur, banner dan poster di tempat-tempat strategis serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

3.2. SASARAN STRATEGIS I

Capaian sasaran strategis I, yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

1.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Kategori Capaian
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82	87,48	106,68	Sangat Baik

Tabel 14. Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap obat yang disampling secara acak. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).

Sampling dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat disampling sesuai dengan pedoman sampling tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);

2. Produk kedaluwarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk kriteria 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

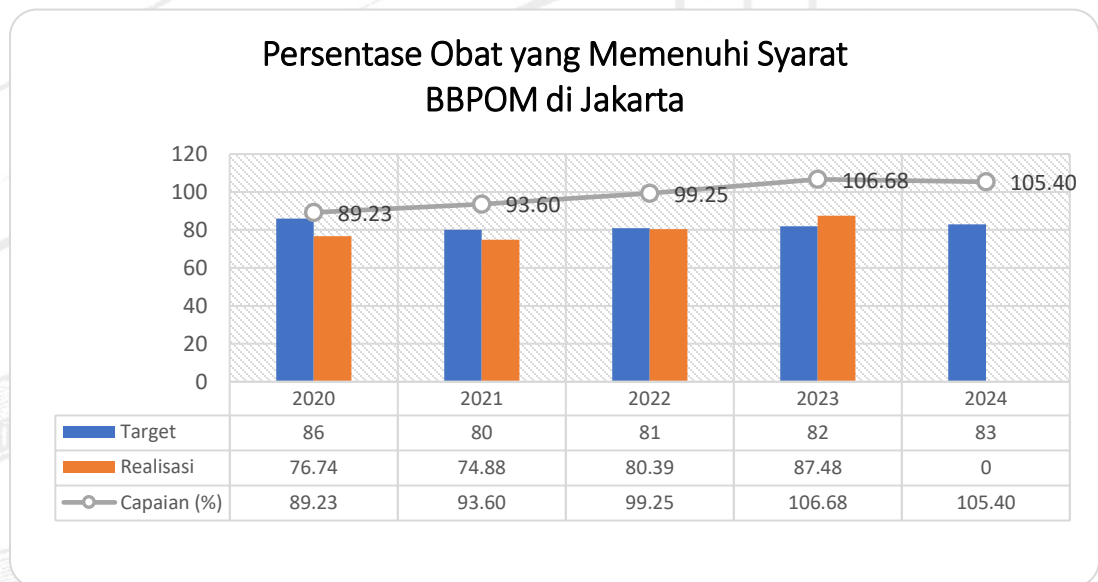
Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 adalah 87.48%, diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian 1557 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta, dengan hasil 1362 sampel MS (memenuhi syarat), 194 sampel TMS (tidak memenuhi syarat hasil uji dan atau tidak memenuhi ketentuan penandaan) dan 1 sampel Tanpa Izin Edar (TIE). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2023 yaitu 106.68% % dengan kriteria “Sangat baik”.

1.2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2020-2022

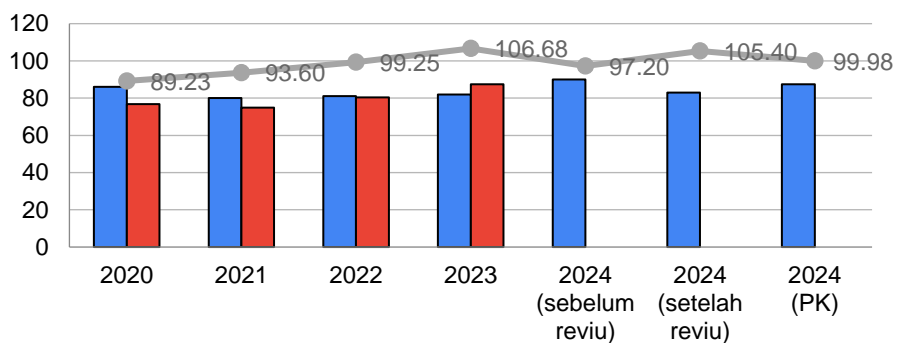
Berdasarkan Gambar 9, mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, realisasi dan capaian presentase obat yang memenuhi syarat terus mengalami peningkatan. Presentase obat yang memenuhi syarat di wilayah DKI Jakarta sudah memenuhi target yang ditetapkan.



1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Berdasarkan Gambar 10, terlihat grafik perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sesuai RPJMN.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Jakarta

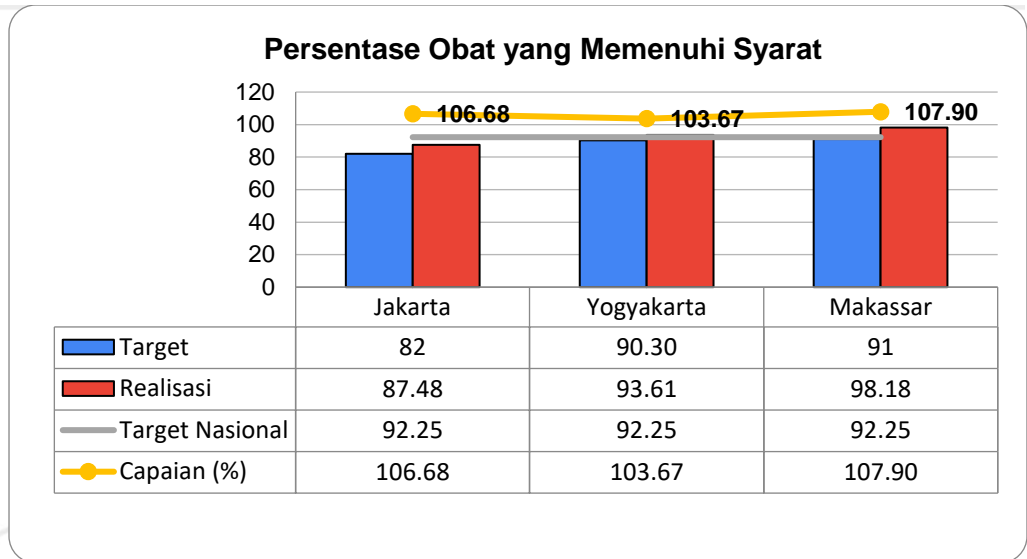


Target presentase obat yang memenuhi syarat mengalami beberapa perubahan pada Rencana Strategis. Pada awal RPJMN ditetapkan, target tahun 2024 ditetapkan cukup tinggi sebesar 90. Berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya, Balai Besar POM di Jakarta belum memenuhi target, maka target ini dinilai tidak mungkin dapat dicapai, sehingga dilakukan penyesuaian target pada revidi renstra tahun 2021 menjadi 83. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase obat yang memenuhi syarat dinaikkan menjadi 87,5. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	87,48	90	97,2	Akan tercapai ▲
Setelah Review	87,48	83	105,4	Tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	87,48	87,5	99,98	Akan tercapai ▲

Tabel 15. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023

1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 11. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Balai Lain yang Setara

Berdasarkan Gambar 11, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 yang paling tinggi adalah BBPOM di Makassar dan yang paling rendah adalah BBPOM di Jakarta. Target yang ditetapkan untuk masing-masing BBPOM berbeda, sehingga nilai capaiannya juga berbeda. Presentase capaian yang paling tinggi adalah BBPOM di Makassar dan yang paling rendah adalah BBPOM di Yogyakarta. Hanya BBPOM di Jakarta yang belum memenuhi target nasional (92,25%).

1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan/penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya.

Banyaknya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan menyumbang porsi terbesar persentase produk obat yang tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif. Selain kosmetik, banyak juga ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sedangkan untuk komoditi lain relative lebih baik.

Juga masih ditemukan adanya produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat pengujian. Bahkan ada produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan sekaligus tidak memenuhi syarat pengujian.

1. Sampel obat dengan 7 sampel TMK penandaan;
2. Sampel obat tradisional dengan 43 sampel (2 sampel TMS Mikro, 2 sampel TMS PK Kofein, 1 sampel TMS Etanol-metanol, sisanya TMK penandaan);
3. Sampel kuasi dengan 2 sampel TMK penandaan;
4. Sampel suplemen Kesehatan dengan 6 sampel (2 sampel TMS PK vitamin C, 2 sampel TMS PK vitamin C dan vitamin B kompleks, 2 sampel TMK penandaan); dan
5. Sampel kosmetik dengan 136 sampel (1 sampel TMS Metanol terhadap etanol dan isopropanol dan sisanya TMK penandaan).

Sampel yang tidak memenuhi syarat sebagian besar disebabkan TMK Penandaan. Untuk produk kosmetik, TMK yang paling banyak adalah klaim yang berlebihan misalnya “krim ini dapat memutihkan kulit” sedangkan untuk produk obat tradisional, TMK yang paling banyak adalah tidak mencantumkan peringatan/perhatian dalam kemasan misalnya “Tidak boleh digunakan pada anak-anak, wanita hamil dan menyusui”

BBPOM di Jakarta telah melakukan intervensi untuk meningkatkan pemenuhan target indikator kinerja, antara lain:

1. Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
2. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan

sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

3. Intervensi pengawasan juga dilakukan terhadap industri komoditi lainnya untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) agar produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Seperti halnya industry farmasi, industri kosmetik dan obat tradisional pun harus membuat CAPA jika ada ketidaksesuaian terhadap pemenuhan CPKB / CPOTB dan juga dilakukan monitoring secara berkesinambungan untuk menjamin mutu produk yang diproduksi memenuhi standar (secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasinya).
4. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
5. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

1.6. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2023:

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	82.00	87.48	106.68	508,813,550	508,794,820	100.00	1.07	0.07	88% (Efisien)

Berdasarkan Tabel 16, dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena nilai $IE > 1$, presentase capaian output lebih besar dibanding presentase anggaran. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran

untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran dapat maksimal.

1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta sebagai upaya meningkatkan capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam butir d di atas merupakan kegiatan yang cukup efektif untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, namun masih perlu ditingkatkan intensifikasinya dan diperluas cakupannya.

Peningkatan kompetensi personil juga merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Harus dapat dipastikan bahwa personil telah melakukan evaluasi penandaan secara tepat dan melakukan pengujian secara valid (akurat), sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya hasil pengujian yang salah (misalnya seharusnya memenuhi syarat tapi disimpulkan tidak memenuhi syarat karena pengujian kurang valid) dan hasil evaluasi penandaan yang kurang tepat (seharusnya memenuhi ketentuan namun disimpulkan tidak memenuhi ketentuan). Kondisi alat laboratorium juga dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian. Laboratorium harus memastikan bahwa alat laboratorium yang digunakan sudah terkalibrasi / terverifikasi dan layak pakai sehingga memberikan hasil pengujian yang valid.

1.8. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, baik internal maupun eksternal, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
----	-------------	---------------

		Selesai*	Belum**		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan.	Selesai (Tahun 2023 telah dilakukan pembinaan kepada 9 UMKM kosmetik dan 7 UMKM Obat Tradisional)	Melakukan koordinasi dengan Poksi Pemeriksaan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik dan obat tradisional	Desember 2023	Masih banyak ditemukan produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat baik TMK penandaan maupun TMS hasil uji	Dengan adanya tindak lanjut dan peningkatan kinerja terkait pengawasan produk kosmetik dan obat tradisional terutama produk yang tidak memenuhi syarat, maka jumlah produk yang TMK penandaan dan TMS hasil uji yang beredar di wilayah Jakarta dapat dikurangi.

Tabel 17. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya
(Internal maupun Eksternal)

1.9. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

2.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	92,90	96,77	Cukup

Tabel 18. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023

Yang dimaksud dengan Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

No	Kriteria
1	Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2	Produk kadaluarsa
3	Produk rusak
4	Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5	Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan

dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS, kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

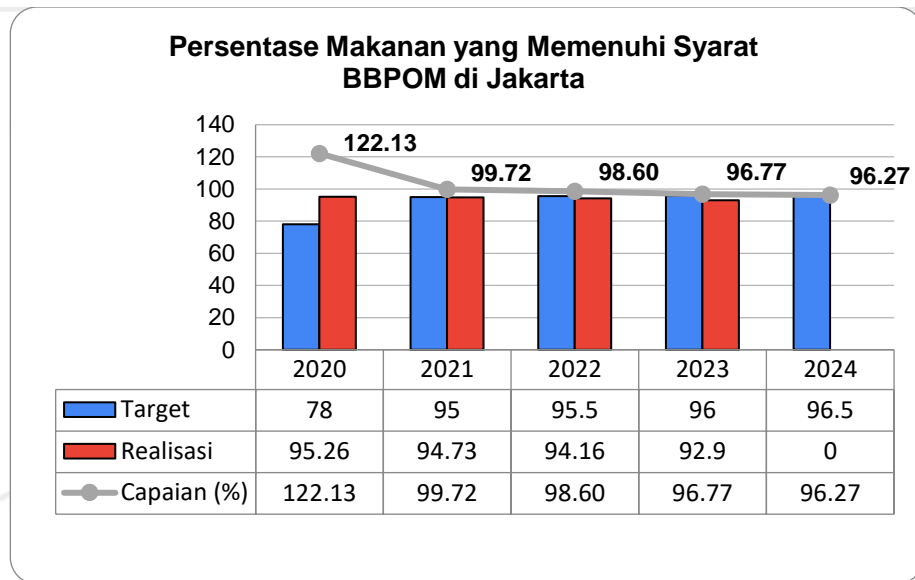
$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan :

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium
- c. Sampel makanan mencakup sampel balai dan Loka

Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah 96,77% dengan kriteria “Cukup”.

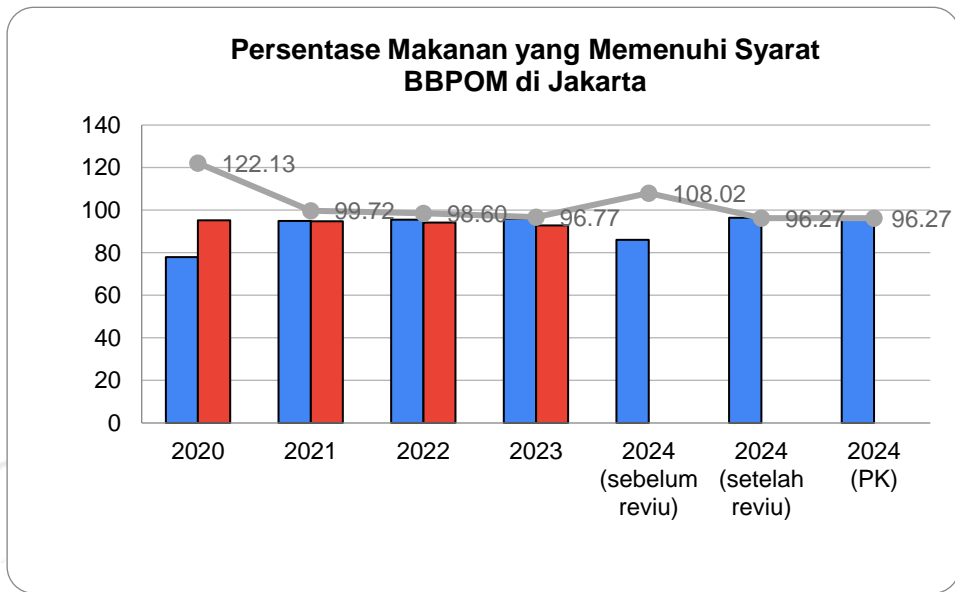
2.2. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022



Gambar 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Jakarta Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Utama “persentase makanan yang memenuhi syarat” bisa dibandingkan mulai tahun 2020. Persentase capaian pada tahun 2020-2023 menunjukkan tren penurunan. Capaian pada tahun 2020 sebesar 122,13% (Tidak dapat disimpulkan), tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 99,72% (Cukup), tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 98,60% (Cukup) dan tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 1,83% menjadi 96,77% dengan kriteria “Cukup”. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan penandaan beredar di wilayah Jakarta. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan.

2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra



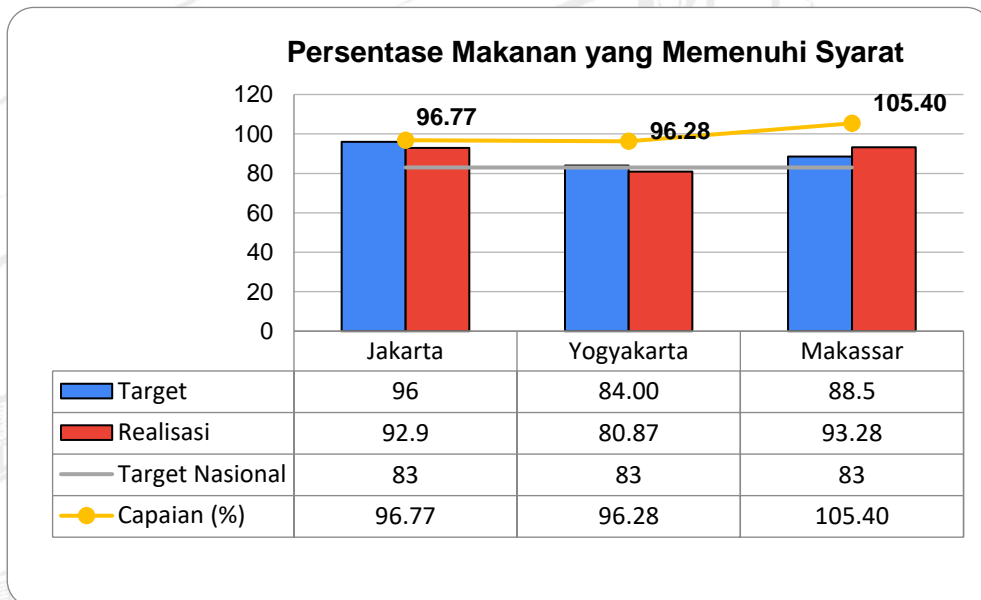
Target persentase makanan yang memenuhi syarat mengalami beberapa perubahan pada Rencana Strategis. Pada awal RPJMN ditetapkan, target tahun 2024 ditetapkan sebesar 86. Namun capaian tahun 2023 cukup tinggi yaitu 110,15 (tercapai), sehingga target tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi 96,5. Setelah diriview maka capaiannya menjadi 97,58 (akan tercapai). Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase makanan yang memenuhi syarat tetap 96,5. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut:

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum Review	92,9	86	108,02	tercapai

Setelah Review	92,9	96,5	96,27	akan tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	92,9	96,5	96,27	akan tercapai ▲

Tabel 19. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 Beserta Kategorinya

2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara dan target nasional



Gambar 14. Perbandingan Capaian dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan dengan lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan Gambar 14, diketahui bahwa realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target nasional namun belum mencapai target tahunan. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 Balai Besar POM di Jakarta 96,77% (akan tercapai), Balai Besar POM di Yogyakarta 96,28% dan Balai Besar POM di Makasar 105,40%. Balai Besar POM Jakarta dan Balai Besar POM Yogyakarta memiliki kriteria “akan tercapai” sedangkan Balai Besar POM di Makasar memiliki kriteria “tercapai”. Capaian dari Balai Besar POM di Jakarta masih di bawah Balai Besar POM Makasar dan di atas Balai Besar POM di Yogyakarta.

2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Belum tercapainya kinerja pada tahun ini dipengaruhi oleh banyaknya sampel acak yang tidak memenuhi persyaratan baik dari segi penandaan maupun dari hasil uji laboratorium, sehingga menyebabkan persentase makanan yang memenuhi syarat tidak mencapai target. Dari 732 sampel acak yang masuk laboratorium, seluruh sampel telah selesai dilakukan pengujian (100%). Sebanyak 680 sampel memenuhi syarat (92,89%) dan 52 sampel tidak memenuhi syarat (7,10%). Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah 4 sampel manisan (TMS Benzoat, Sakarin, Siklamat), 9 sampel non ekstrudat (TMS Angka *Enterobacteriaceae*), 1 sampel tepung bumbu (TMS Angka *Enterobacteriaceae*), 2 sampel kecap (TMS 3-MCPD), 1 sampel kecap (TMS Sulfit), 1 sampel rumput laut (TMS kadar cemaran Pb dan Cd), 3 sampel teh kering dalam kemasan (TMS ALT, AKK), 1 sampel teh kering dalam kemasan (TMS AKK), 1 sampel makanan siap saji terkemas (TMS *Salmonella*, Angka *Staphylococcus aureus*), 17 sampel madu (TMS Hidroksi Metil Furfural/HMF), 2 sampel naget (TMS Angka *Enterobacteriaceae*), 1 sampel bakso (TMS ALT), 1 sampel sosis siap masak (TMS Nitrit), 1 sampel makanan ringan kacang (TMS Angka *Enterobacteriaceae*), 1 sampel kacang dalam kemasan (TMS kadar cemaran Cd) dan 6 sampel TMK Penandaan,

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan yang memenuhi syarat, antara lain:

1. Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu

2. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
3. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
4. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

2.6. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase makanan yang memenuhi syarat di tahun 2023.

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.00	92.90	96.77	284,565,050	284,550,424	99.99	0.97	-0.03	75% (tidak efisien)

Tabel 20. Analisis Efisiensi Anggaran untuk Makanan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 20, dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat tidak efisien. Persentase realisasi anggaran lebih tinggi

daripada persentase capaian output. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

2.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia jika dilaksanakan secara maksimal dan terus menerus akan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Namun jika pelaksanaannya kurang intensif, dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja.

2.8. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1						

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan terkait dengan temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.	Selesai (Telah dilakukan pembinaan terhadap 33 sarana pangan olahan selama tahun 2023)	Melakukan koordinasi dengan Poksi Pemeriks dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan	Desember 2023	Masih banyak ditemukan produk Pangan yang tidak memenuhi syarat baik TMK penandaan maupun TMS hasil uji	Dengan adanya tindak lanjut dan peningkatan kinerja terkait pengawasan produk pangan, terutama temuan terkait produk pangan yang dinyatakan TMS hasil uji maupun TMK penandaan, terdapat peningkatan kepatuhan para produsen pangan di wilayah DKI Jakarta
2	Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk	Selesai (Telah dilakukan pembinaan terhadap 33 sarana pangan	Melakukan koordinasi dengan pemeriksaan dalam pelaksanaan evaluasi	Desember 2023	Masih banyak ditemukan produk Pangan yang tidak memenuhi syarat baik	Dengan adanya penguatan investigasi, pemberian edukasi, pemantauan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	pangannya TMS pengujian maupun TMK penandaan.	olahan selama tahun 2023)	pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK penandaan.		TMK penandaan maupun TMS hasil uji	terhadap produk yang beredar maupun hasil uji, terdapat peningkatan kepatuhan para produsen terhadap produk pangan yang TMS hasil uji maupun TMK penandaan.

Tabel 21. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

2.9. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan system, usulan program kegiatan dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

3.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Kategori Capaian
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	78,34	95,54	Cukup

Tabel 22. Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

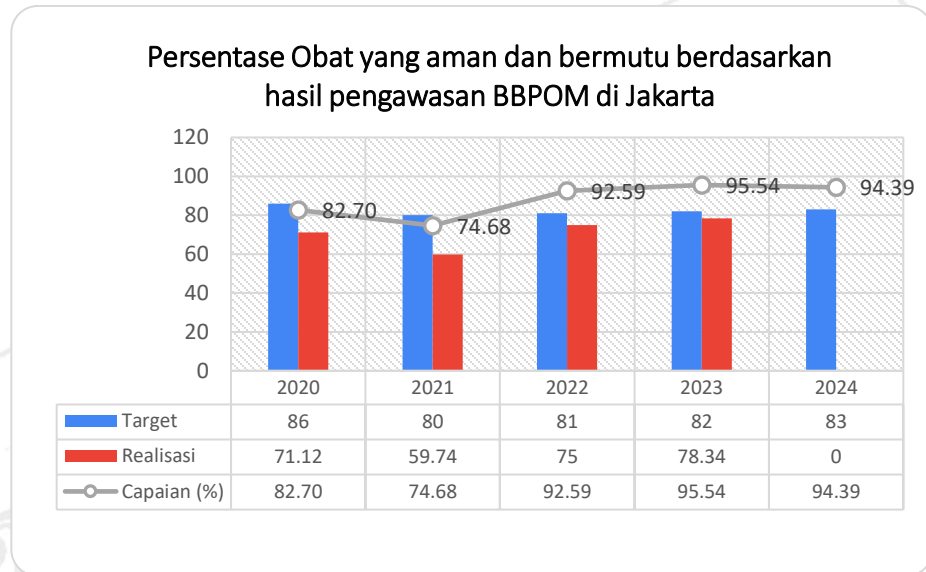
$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah 95.54% dengan kriteria “Cukup”.

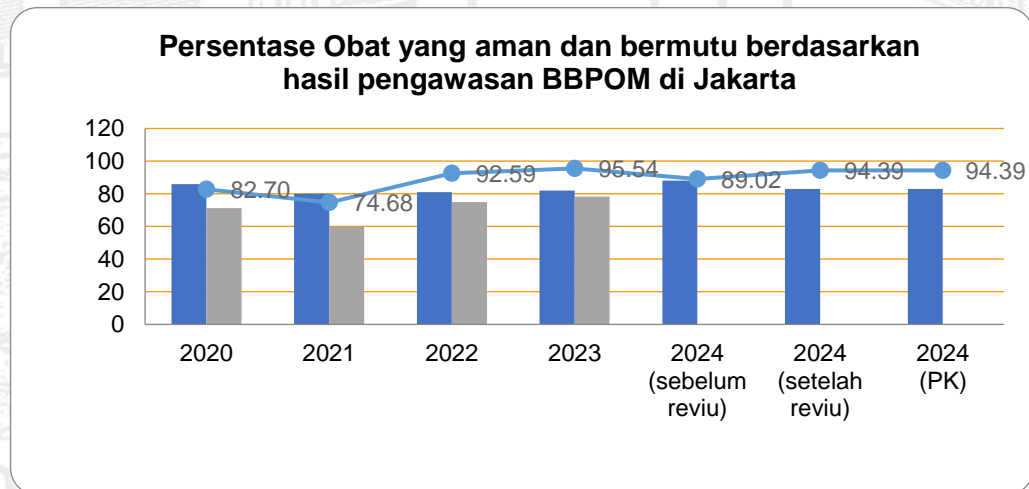
3.2. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022



Gambar 15. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2022 dan Target Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 15, capaian presentase obat yang aman dan bermutu terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target tahun 2024.

3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra



Gambar 16. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan RPJMN

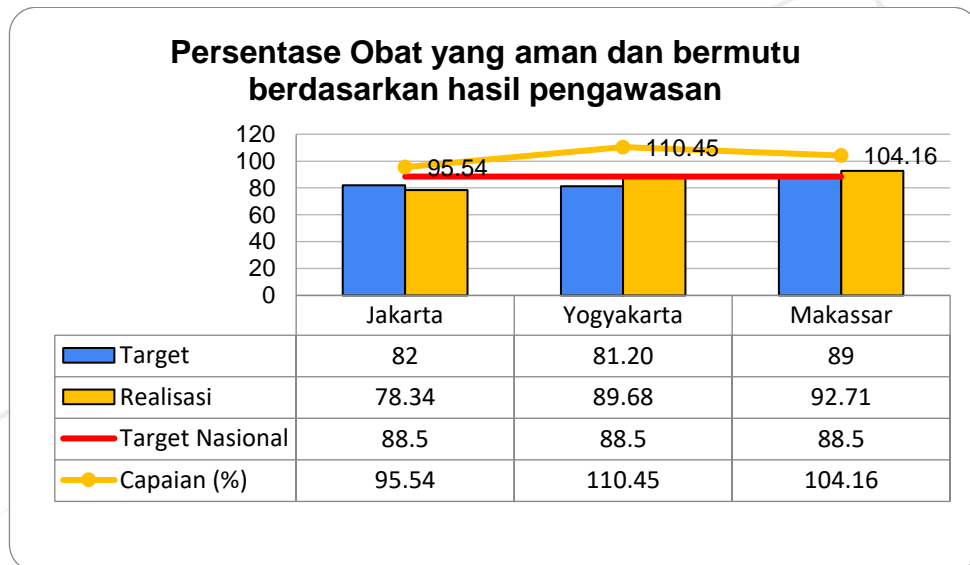
Berdasarkan Gambar 16, capaian tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 92.59% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 74.68%. Capaian tahun 2022 mendapat kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”. Untuk akhir periode renstra RPJMN tahun 2024 ditetapkan target 83%.

Target presentase obat yang aman dan bermutu mengalami beberapa perubahan pada Rencana Strategis. Pada awal RPJMN ditetapkan, target tahun 2024 ditetapkan sebesar 88. Namun berdasarkan capaian tahun 2023 cukup rendah yaitu 67.89 (perlu Upaya keras), sehingga target tahun 2024 dilakukan penyesuaian menjadi 83. Setelah diriview maka capaiannya menjadi 90,36 (akan tercapai). Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase obat yang aman dan bermutu tetap 83. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	78,34	88	89,02	akan tercapai ▲
Setelah Review	78,34	83	94,39	akan tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	78,34	83	94,39	akan tercapai ▲

Tabel 23. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 beserta Kategorinya

3.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 17. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan UPT BPOM Lainnya

Berdasarkan Gambar 17, dapat disimpulkan bahwa capaian presentase obat yang aman dan bermutu tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta serta yang terendah adalah BBPOM di Jakarta dan di bawah target nasional.

3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu pada tahun 2023 Balai Besar POM di Jakarta berada di bawah Balai lain yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa produk obat yang beredar di Provinsi DKI Jakarta masih cukup banyak yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu serta ketentuan penandaan, terutama kosmetik dan obat tradisional. Sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif, untuk itu diperlukan pengawasan *post-market* yang ketat guna melindungi masyarakat dari produk yang beresiko terhadap kesehatan.

Dari 590 sampel *targeted* yang masuk laboratorium, sudah selesai diuji sebanyak 590 sampel (100%), namun yang memenuhi syarat sebesar 463 sampel (78.47%) dari sampel selesai uji. Terdapat 127 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sampel obat dengan 3 sampel TMK penandaan;
2. Sampel obat tradisional dengan 25 sampel (5 sampel TMS turunan sildenafil, sisanya TMK penandaan);
3. Sampel kuasi dengan 2 sampel (1 sampel TMS PK Metanol, dan 1 sampel TMK penandaan);
4. Sampel suplemen kesehatan dengan 7 sampel (1 sampel TMS Vitamin B kompleks, sisanya TMK penandaan); dan
5. Sampel kosmetik dengan 90 sampel (1 sampel TMS ALT, sisanya TMK penandaan).

Sampel yang tidak memenuhi syarat sebagian besar disebabkan TMK Penandaan. Untuk produk kosmetik, TMK yang paling banyak adalah klaim yang berlebihan misalnya “krim ini dapat memutihkan kulit” sedangkan untuk produk obat tradisional, TMK yang paling banyak adalah tidak mencantumkan peringatan/perhatian dalam kemasan misalnya “Tidak boleh digunakan pada anak-anak, wanita hamil dan menyusui”.

3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2023:

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.00	78.34	95.54	508,813,550	508,794,820	100.00	0.96	-0.04	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien dengan nilai IE < 1. Presentase capaian

indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Peningkatan/penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya.

Banyaknya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan menyumbang porsi terbesar persentase produk obat yang tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Hal ini disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif. Selain kosmetik, banyak juga ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sedangkan untuk komoditi lain relatif lebih baik.

Juga masih ditemukan adanya produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat pengujian, walaupun jumlahnya tidak banyak. Bahkan ada produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan sekaligus tidak memenuhi syarat pengujian.

Banyaknya temuan tersebut di atas menyebabkan rendahnya realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

1. Intervensi pengawasan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi/kosmetik/obat tradisional untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP/*Good Manufacturing Practice*), sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan pemantauan secara berkesinambungan sehingga menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
2. Selain pengawasan, juga pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan, terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional dan kosmetik. Hal ini telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan secara rutin.
3. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS di luar DKI Jakarta diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan.
4. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di masa mendatang.
5. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat (termasuk obat tradisional dan kosmetik) kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman dan berkualitas.

3.8. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
----	-------------	---------------	--	--

		Selesai*	Belum**		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan penandaan.	Selesai (Tahun 2023 telah dilakukan pembinaan kepada 9 UMKM kosmetik dan 7 UMKM Obat Tradisional)	Dilakukan pendampingan pre market terhadap UMKM produksi Kosmetik dan obat tradisional	Akhir tahun 2023	Masih banyak ditemukan produk kosmetik dan obat tradisional yang TMK penandaan dan TMS hasil uji beredar di wilayah Jakarta	Dengan adanya pendampingan pre market terhadap UMKM produksi kosmetik dan obat tradisional maka jumlah produk yang TMK penandaan dan TMS hasil uji yang beredar di wilayah Jakarta dapat dikurangi.
			Melakukan koordinasi dengan Poksi Pemeriksaan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik dan obat tradisional	Desember 2023		

Gambar 19. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Baik Secara Internal maupun Eksternal

3.9. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk

meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

4.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	92,45	110,06	Sangat Baik

Tabel 24. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2023

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. **Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi.**

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label

tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

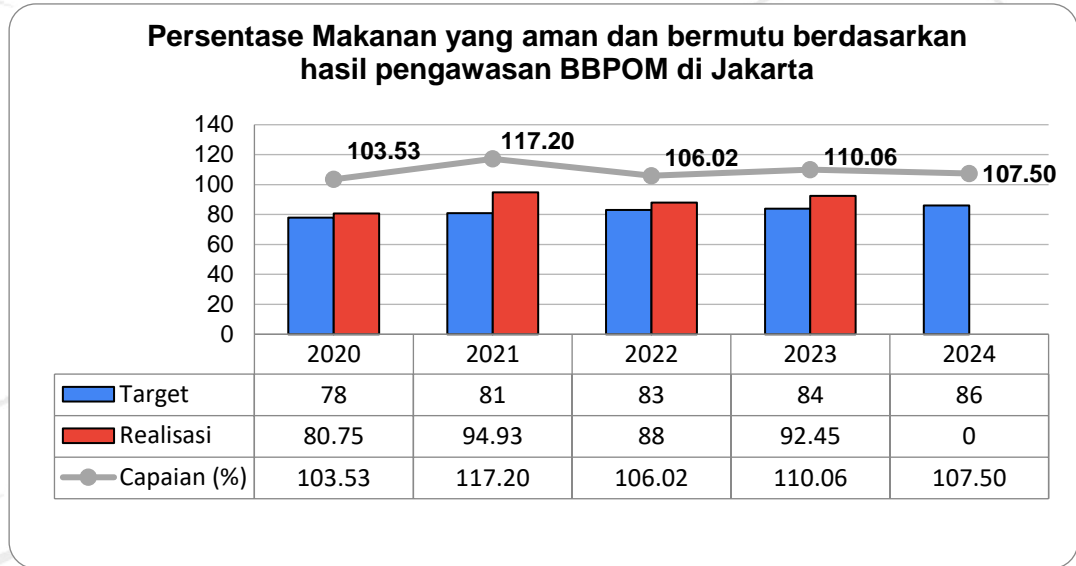
- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

$$\% \text{ B3} = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil dari Balai Penguji untuk memperoleh poin d.5.
- f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 117,20% dengan kriteria “sangat baik”.

4.2. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022



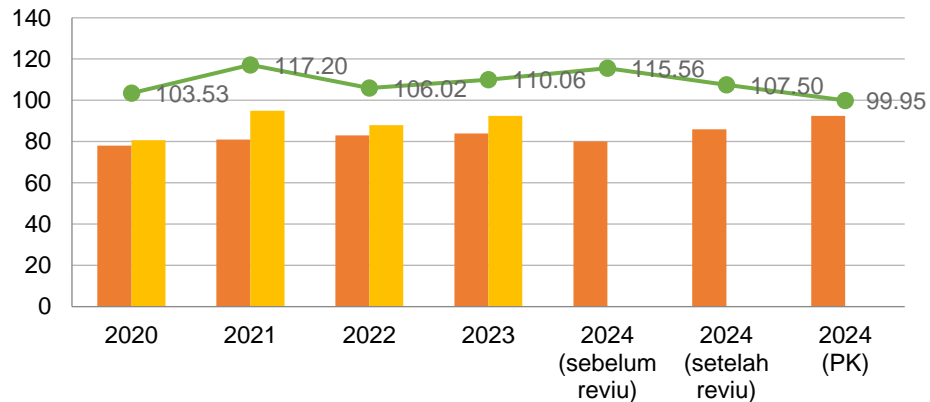
Gambar 20. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta antara tahun 2020-2023

Indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator yang ditetapkan di tahun 2020. Data realisasi tahun 2020 merupakan *baseline* untuk target realisasi tahun-tahun berikutnya. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara *targeted*.


Capaian pada tahun 2020 sebesar 103,53% (Sangat baik), tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 117,20% (Sangat baik), tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 106,02% (Sangat baik) dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,04% menjadi 110,06% dengan kriteria “Sangat baik”.

4.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Jakarta



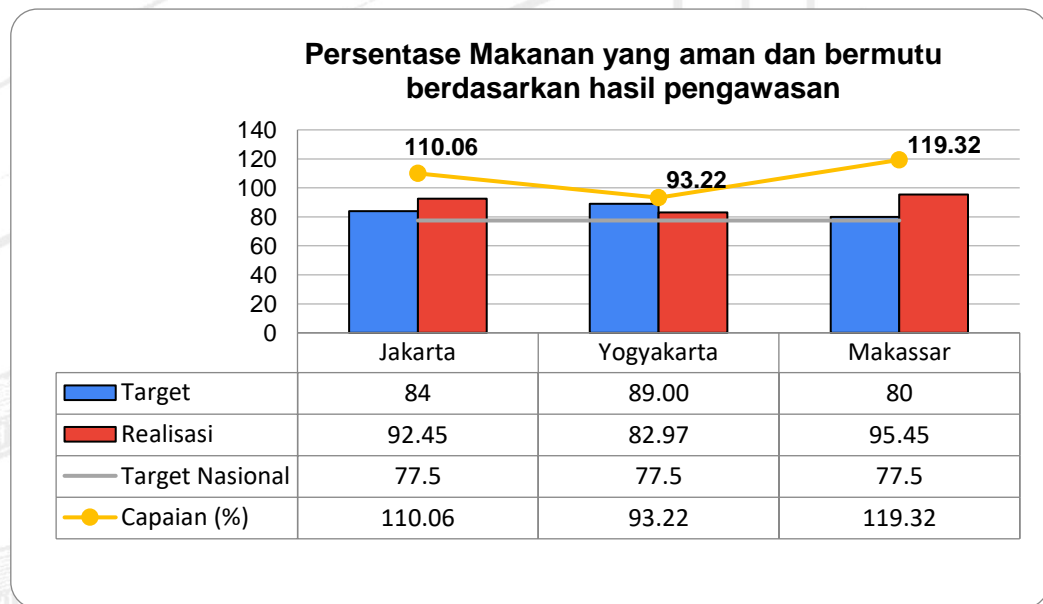
Target persentase makanan yang aman dan bermutu mengalami beberapa perubahan pada Rencana Strategis. Pada awal RPJMN ditetapkan, target tahun 2024 ditetapkan sebesar 80. Namun, capaian tahun 2023 cukup tinggi yaitu 118,66 (tercapai), sehingga dilakukan penyesuaian untuk target tahun 2024 menjadi 86. Setelah direviu maka capaiannya menjadi 102,33 (akan tercapai). Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase makanan yang aman dan bermutu ditingkatkan menjadi 92,5 untuk peningkatan dan motivasi kinerja. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut:

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	92,45	80	115,56	tercapai 

Setelah Review	92,45	86	107,5	tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	92,45	92,5	99,95	akan tercapai ▲

Tabel 25. Capaian Perubahan Targt Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023

4.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Berdasarkan Gambar 22, dapat disimpulkan bahwa capaian presentase makanan yang aman dan bermutu tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Makassar serta yang terendah adalah BBPOM di Yogyakarta dan berada di bawah target nasional.

4.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi kinerja tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan, namun perlu ditingkatkan untuk tahun selanjutnya. Dari 265 sampel *targeted* yang masuk laboratorium, seluruh sampel sudah selesai diuji (100%). Sampel yang memenuhi syarat sebanyak 237 sampel (89,43%) dan

28 sampel (10,56%) tidak memenuhi syarat. Adapun rincian sampel yang tidak memenuhi syarat 2 sampel air (TMS pH dan *Angka Coliform*), 3 sampel enting-enting (TMS Angka *Enterobacteriaceae*), 4 sampel madu (TMS HMF), 2 sampel PJAS (TMS APM *E.coli*), 2 sampel UMKM (TMS kadar cemaran Arsen), 1 sampel AMIU (TMS Angka Coliform), 4 sampel manisan buah (TMS kadar Benzoat), 1 sampel manisan buah (TMS kadar Benzoat dan Sulfit) dan 1 sampel gula merah (TMS kadar Sulfit).

Beberapa hal yang mendukung capaian persentase makanan yang aman dan bermutu antara lain:

1. Pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu;
2. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi; dan
3. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
4. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

4.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan

anggaran dalam pencapaian target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan nilai IE > 1. Presentase capaian indikator

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.00	92.45	110.06	284,565,050	284,550,424	99.99	1.10	0.10	88% (efisien)

lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal.

4.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Segala upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sudah cukup efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase makanan yang aman dan bermutu di tahun ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di tahun selanjutnya.

4.8. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Intervensi pengawasan yang dilakukan	Selesai (Telah dilakukan)	Melakukan Pendampin	Akhir tahun 2023	Perlu adanya pemantauan dan	Terdapat peningkatan kepatuhan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB),	pembinaan terhadap 33 sarana pangan olahan selama tahun 2023)	ngan, pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pangan		pengawasan lebih lanjut terkait sarana produksi makanan sebagai pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai perencanaan Masih banyak ditemukan produk Pangan yang tidak memenuhi syarat baik TMK penandaan maupun TMS hasil uji	para pelaku usaha -dalam memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku

4.9. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini rekomendasi perbaikan system, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk

meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

5.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	80,59	89,54	Cukup

Tabel 27. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase Pangan Fortifikasi Tahun 2023

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.

Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Contoh: Parameter uji garam berdasarkan pedoman sampling adalah penetapan kadar KIO_3 , $NaCl$, cemaran logam Pb dan kadar air. Meskipun yang MS hanya kadar KIO_3 sedangkan semua parameter lain TMS, maka kesimpulan akhir untuk perhitungan IKU ini tetap MS.

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus berikut:

% Pangan Fortifikasi yang MS =

$$\frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

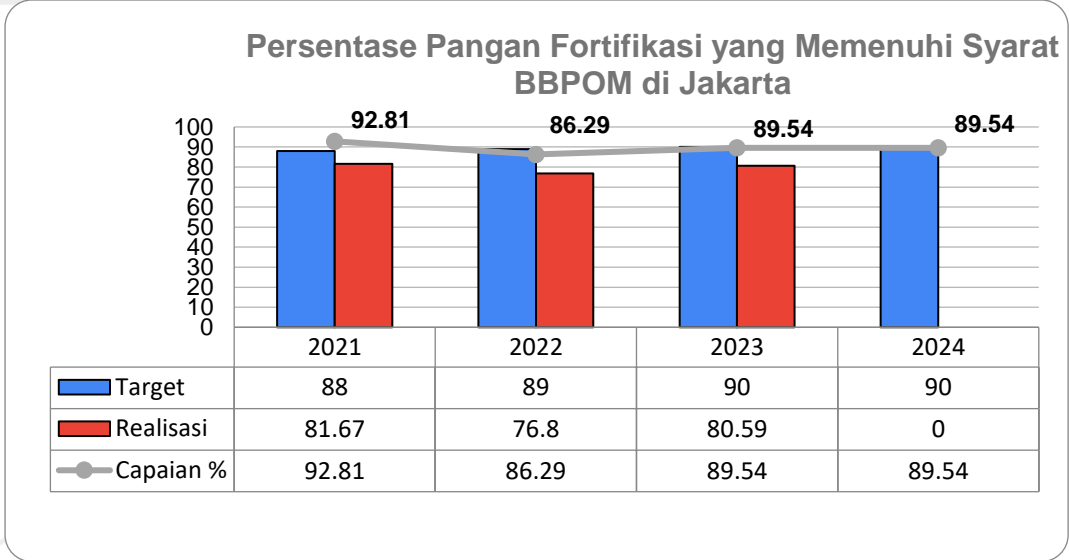
- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah 89,54% dengan kriteria “Cukup”.

5.2. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2023 dengan tahun 2021-2022

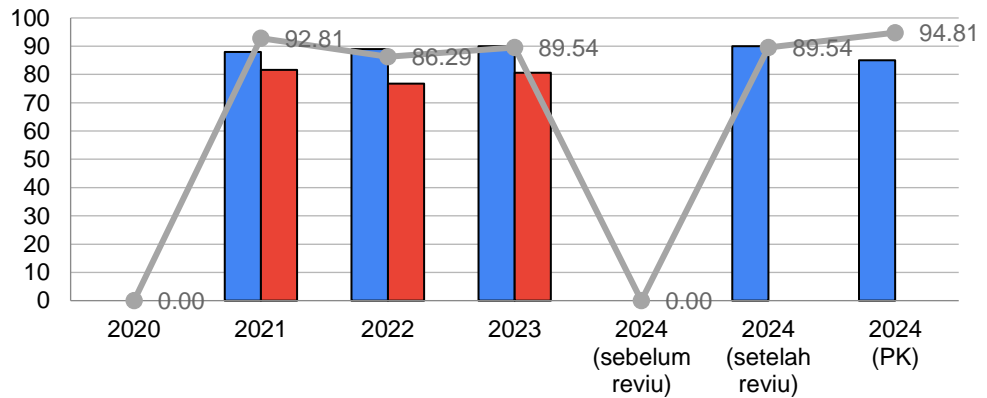


Gambar 23. Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat di Wilayah Jakarta antara Tahun 2021-2023

Target Indikator Kinerja Utama “persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” terus meningkat setiap tahunnya. Capaian pada tahun 2021 sebesar 92,81% (Cukup), tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 86,29% (Cukup), tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 89,54% dengan kriteria “Cukup”. sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan.

5.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat BPOM di Jakarta



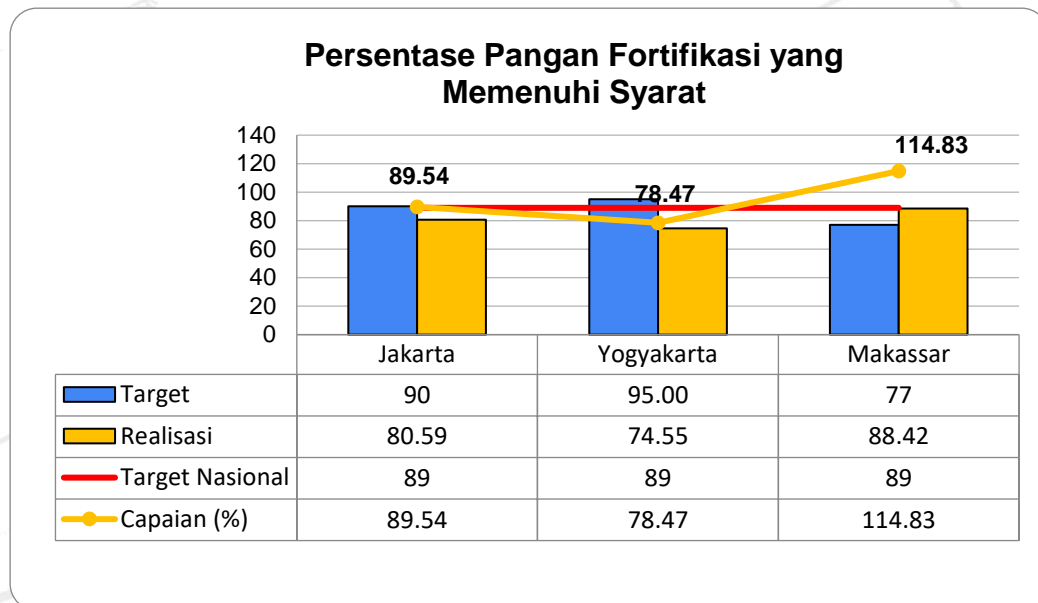
Gambar 24. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan RPJMN

Persentase pangan fortifikasi tidak ditetapkan pada awal RPJMN, setelah direviu bahwa target ini penting dan perlu dimasukkan ke dalam renstra, maka sejak tahun 2021 mulai ditetapkan target presentase pangan fortifikasi. Target ditetapkan 90%, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 85,33 (akan tercapai). Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase pangan fortifikasi diturunkan menjadi 85 mengingat realisasi tahun 2023 yang rendah. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut:

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	80,59	0	0	
Setelah Review	80,59	90	89,54	Akan tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	80,59	85	94,81	Akan tercapai ▲

Tabel 28. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 Untuk Kategori Fortifikasi

5.4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/Setara dan Target Nasional



Target tahunan untuk Balai Besar POM Jakarta dan Balai Besar POM Yogyakarta lebih tinggi dari target nasional yaitu 89%, sedangkan untuk Balai Besar POM di Makasar target tahunan lebih rendah dari target nasional. Capaian Balai Besar POM di Jakarta adalah 89,54 % dengan kriteria “akan tercapai”, Balai Besar POM di Yogyakarta 78,47% dan Balai Besar POM di Makasar 114,83 %.

Persentase capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Jakarta menduduki urutan kedua, lebih tinggi dari Balai Besar POM Jogja dan lebih rendah dari Balai Besar POM Makasar.

5.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hasil evaluasi pengujian pangan fortifikasi triwulan II menunjukkan bahwa terdapat 73,60 % sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dari 125 sampel pangan fortifikasi yang diuji. Realisasi kinerja ini masih jauh di bawah target tahun 2023 yaitu 90 %. Dalam rangka meningkatkan realisasi kinerja persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat agar mendekati nilai target yang telah ditetapkan, pada triwulan III

dilakukan sampling tambahan sebanyak 45 sampel sehingga jumlah total pangan fortifikasi menjadi 170 sampel. Dari total 170 sampel, sebanyak 137 sampel memenuhi syarat (80,58%) dan 33 sampel tidak memenuhi syarat (19,41%). Dari 33 sampel yang tidak memenuhi syarat, diantaranya sebanyak 28 sampel garam (TMS KIO₃) dan 5 sampel tepung terigu (TMS Vitamin B₂).

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain:

1. Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
2. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
3. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
4. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

5.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	80.59	89.54	26,660,000	26,619,589	99.85	0.90	-0.10	75% (tidak efisien)

Berdasarkan Tabel 28, dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien dengan nilai $IE < 1$. Presentase capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

5.7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Segala upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia belum efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di tahun ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di tahun selanjutnya. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif dan pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap standar yang telah ditetapkan.

5.8. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi sesudah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Peningkatan kemampuan uji sampel fortifikasi	Selesai (Tahun 2023 telah dilakukan 2 kali bimtek Fortifikasi)	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN serta melakukan uji banding antar personel terkait sampel fortifikasi berupa garam dan minyak goreng sawit	Akhir tahun 2023	Capaian persentase sampel fortifikasi yang memenuhi syarat masih belum mencapai angka yang ditetapkan sesuai dengan target indikator kinerja	Terdapat peningkatan kapasitas pengujian dan capaian persentase sampel fortifikasi yang memenuhi syarat di tahun ini sebesar 89.54% (capaian sebelumnya 86,29 %)
2	Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji	Selesai (Tahun 2023 telah dilakukan 2 kali bimtek Fortifikasi)	Melakukan pengujian sampel makanan dengan menerapkan GLP dan jaminan mutu yang sudah ditetapkan secara berkesinambungan. Selain itu juga diadakan bimbingan teknis/magang baik secara	Akhir tahun 2023	Perlu adanya peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji terkait pengujian untuk pemenuhan capaian sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan	Terpenuhinya peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji untuk pemenuhan standar ruang lingkup dan capaian pengujian sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi sesudah rencana aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
			internal maupun antar unit kerja			
3.	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	Selesai, sudah dilakukan pembinaan terhadap 33 pelaku usaha pangan olahan yang ada di Jakarta	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	Akhir tahun 2023	Perlu adanya pemantauan dan inspeksi lebih lanjut oleh bagian pemeriksaan terkait capaian sampel fortifikasi yang diuji di laboratorium	Pemantauan dan evaluasi hasil uji melalui SIPT terdapat peningkatan capaian sampel fortifikasi yang memenuhi syarat sebelum ditindaklanjuti oleh bagian pemeriksaan terkait ketentuan CPPB dan penandaan

Tabel 30. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

5.9. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

3.3. SASARAN STRATEGIS II

Capaian sasaran strategis II, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

6.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	89	91.89	103.25	Sangat baik

Tabel 31. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Terkait Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Indeks kesadaran masyarakat adalah hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan, dan tindakan sebagai

pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Konsep pengukuran kesadaran (*awareness*) menggali seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat, ketertarikan (*interest*) menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk, keinginan (*desire*) menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman, dan tindakan (*action*) menggali Tindakan masyarakat saat memilih dan mengonsumsi produk dengan benar.

Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, sejauh mana sumber informasi dan pengaruh sosialisasi/KIE dari BPOM terhadap peningkatan pengetahuan responden. Aspek pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap Obat dan Makanan aman mencakup pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Secara rinci aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi pengetahuan mengenai kemasan yang aman pada produk Obat dan Makanan, label yang terdapat pada produk, nomor izin edar Obat dan Makanan serta informasi kedaluwarsa pada Obat dan Makanan. Selain itu manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat, Obat Tradisional. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap dan persepsi masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini dengan Cek KILK, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya, dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk

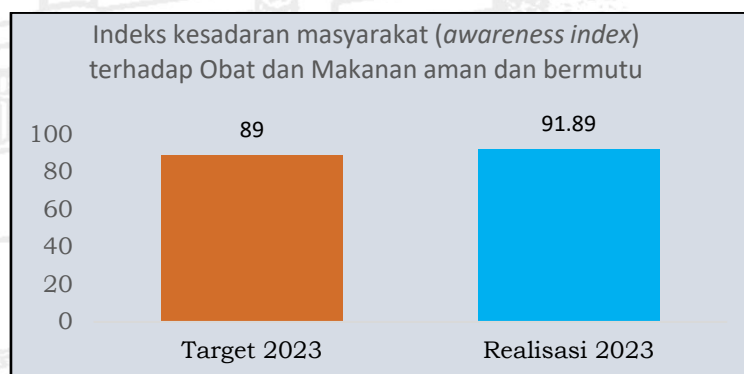
kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian, bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam memilih produk meliputi kemasan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, mengetahui dan memilih produk yang telah memiliki nomor izin edar serta penggunaan produk sebelum kedaluwarsa.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) melalui survei dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner berisi pertanyaan terstruktur dengan metode pengumpulan data *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Kriteria yang digunakan adalah:

<i>Kategori</i>	<i>Interval Indeks</i>
<i>Tidak Baik</i>	$\leq 45,00$
<i>Kurang Baik</i>	45,01 – 60,00
<i>Cukup Baik</i>	60.01 – 75,00
<i>Baik</i>	75,01 – 90,00
<i>Sangat Baik</i>	$\geq 90,01$

Tabel 32. Kriteria Indeks Persepsi



Gambar 26. Grafik Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

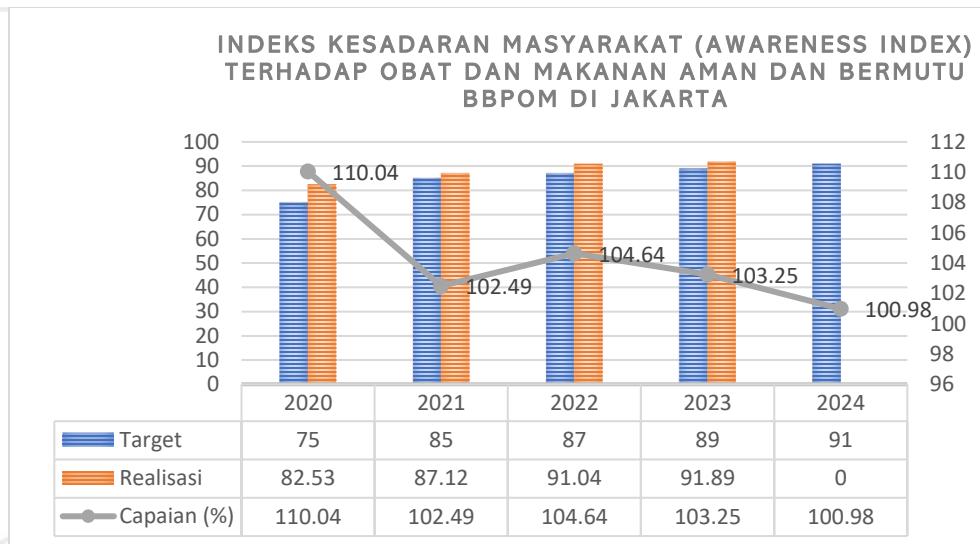
Hasil indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 diperoleh sebesar 91.89 dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 89.00 diperoleh capaian sebesar 103.25% (Sangat baik). Nilai indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 merupakan capaian indeks tertinggi secara nasional dari 34 provinsi.

Adapun indeks yang diperoleh terdiri atas indeks pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebagai berikut:

- 1) Indeks pengetahuan sebesar 99.18 dengan kategori indeks Sangat Baik dan menempati urutan pertama secara nasional. Indeks ini merupakan hasil rerata dari masing-masing komoditi yaitu Obat 99.54; Obat Tradisional 97.75; Suplemen Kesehatan 99.22; Kosmetik 99.25; dan Pangan Olahan 99.46.
- 2) Indeks sikap sebesar 91.33 dengan kategori indeks Sangat Baik yang merupakan rerata dari komoditi Obat sebesar 91.36; Obat Tradisional sebesar 91.23; Suplemen Kesehatan sebesar 91.27; Kosmetik sebesar 91.16; dan Pangan Olahan sebesar 91.16.
- 3) Indeks perilaku sebesar 85.16 dengan kategori indeks Sangat Baik. Indeks perilaku ini merupakan hasil rerata dari komoditi Obat sebesar 86.03; Obat Tradisional sebesar 83.83; Suplemen Kesehatan sebesar 84.79; Kosmetik sebesar 85.90; dan Pangan Olahan sebesar 84.70.

Dari nilai indikator pembentuk pengukuran, diketahui indikator tertinggi berasal dari pengetahuan dengan nilai 99.18 dan terendah berasal dari sikap sebesar 85.16.

6.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya



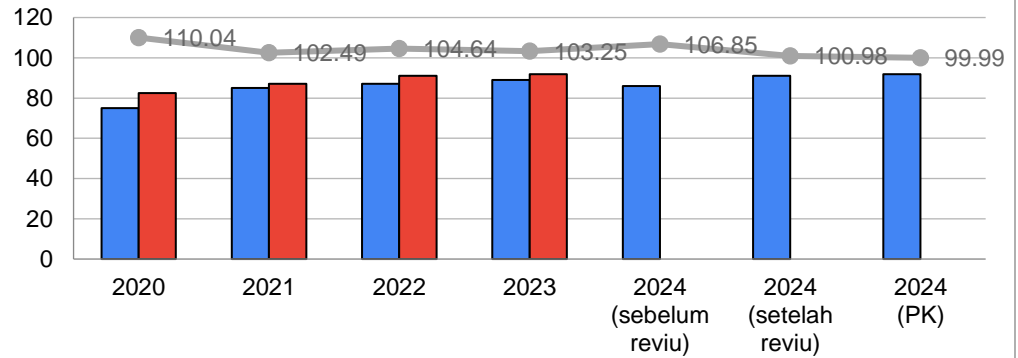
Gambar 27. Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Jakarta

Realisasi indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta meningkat dari tahun 2020-2023. Realisasi indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 sebesar 91.89 menunjukkan nilai yang meningkat sebanyak 0.85 poin dibandingkan tahun 2022. Selama tahun 2022-2023, nilai indeks ini merupakan tertinggi secara nasional.

Apabila dibandingkan dengan target, realisasi kinerja indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020-2023 juga telah tercapai dan melampaui target secara berturut-turut sebesar 110.04%, 102.49%, 104.64%, dan 103.25%.

6.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah periode renstra RPJMN 2020-2024

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Jakarta

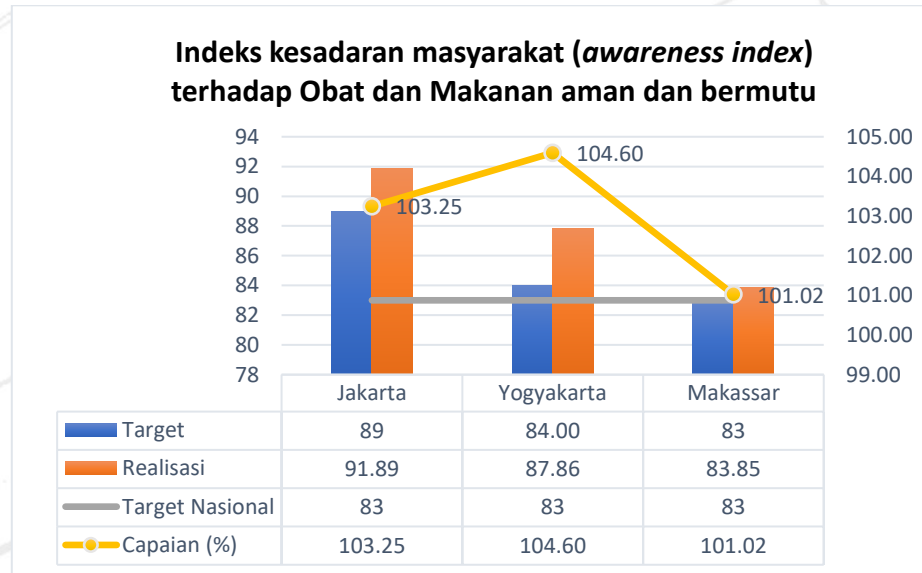


Gambar 28. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan RPJMN

Realisasi indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah periode renstra RPJMN 2020-2024 sebelum dan sesudah review serta sesuai perjanjian kinerja sebagaimana terlampir. Dengan nilai capaian ini dapat disimpulkan bahwa target akhir renstra sesuai perjanjian kinerja diperkirakan akan tercapai ($70\% \leq 99.99\% < 100\%$).

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	91.89	86	106.85%	Tercapai/melampaui ▲
Setelah Review	91,89	91	100.98	Tercapai/melampaui ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	91,89	91.9	99.99	Akan tercapai ▲

6.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 29. Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi indeks kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 sebesar 91.89. Apabila dibandingkan dengan indeks kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Makassar secara berturut-turut sebesar 87.86 dan 83.85, nilai indeks BBPOM di Jakarta menunjukkan nilai tertinggi.

Capaian indeks kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar tahun 2023 secara berturut-turut sebesar 103.25%, 104.60%, dan 101.02%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 89, 84, dan 83, nilai capaian ini telah melampaui target. Target nasional indeks kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan tahun 2023 ialah sebesar 83, sehingga dapat disimpulkan semua capaian indeks oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar telah melampaui target nasional.

6.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa faktor penyebab keberhasilan dari capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya korelasi positif antara aspek pengetahuan dan perilaku. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu ditunjukkan dengan nilai indeks pengetahuan yang tinggi, berdampak positif terhadap perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu sehingga nilai indeks kesadaran masyarakat yang diperoleh tinggi.
- 2) Adanya perkuatan sinergi dengan stakeholder terkait dalam pemberian penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan kepada masyarakat. Dalam hal ini BBPOM di Jakarta menggandeng Tokoh Masyarakat, Anggota Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah (tingkat provinsi maupun kabupaten/kota), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI), akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan media melalui berbagai kegiatan KIE yang telah dilaksanakan.
- 3) Keragaman tema materi/ pesan penyuluhan dan KIE yang disampaikan ke masyarakat yang mencakup semua komoditi Obat dan Makanan, yaitu Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 4) Peningkatan penggunaan media KIE dan penyebaran informasi mengenai pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM kepada masyarakat seperti media sosial, media luar ruang seperti videotron yang ditampilkan di tempat-tempat umum wilayah DKI Jakarta serta

media online dan media cetak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

- 5) Peningkatan konten/ materi informasi edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan tagline KataBPOM, Cek KLIK, dan BPOM Mobile melalui berbagai media, meliputi media online, media cetak maupun media sosial.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk mendorong Masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menggencarkan pemberian informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan terutama terkait kebiasaan membaca informasi pada label dan Cek KLIK.
2. Penguatan koordinasi dan sinergi dalam melakukan penyuluhan dan KIE Obat dan Makanan dengan Stakeholder terkait terutama unsur penta heliks dalam pengawasan Obat dan Makanan, yaitu unsur akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, lintas sektor / pemerintah daerah, dan media.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut program KIE dan hasil survei untuk peningkatan kesadaran Masyarakat di masa mendatang.

6.6 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89	91.89	103.25	316,719,810	316,511,192	99.93%	1,03	0,03	100%

Tabel 33. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.03 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti sarana penyebaran informasi dan KIE Obat dan Makanan yang optimal serta sumber daya manusia yang memadai di bidang komunikasi dan informasi Obat dan Makanan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

6.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan

aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 antara lain:

- 1) Intensifikasi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui berbagai program inovasi, seperti Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta), Kosidah (Kilas Informasi Berfaedah)
- 2) Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.
- 3) Penyelenggaraan KIE Obat dan Makanan dengan beragam tema sesuai pesan KLIK dan komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan.
- 4) Penguatan keterlibatan unsur pentaheliks (akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, lintas sektor / pemerintah daerah, dan media) dalam penyampaian pesan kunci Obat dan Makanan kepada Masyarakat.
- 5) Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman melalui pelibatan anggota Pramuka dalam Kelompok Kerja Pramuka Jakarta Sadar Obat dan Makanan Aman dan SAKA POM (Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan)

6.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Peningkatan koordinasi dan sinergi dalam melakukan penyuluhan dan KIE Obat dan Makanan dengan Stakeholder terkait terutama unsur pentaheliks dalam pengawasan Obat dan Makanan, yaitu unsur akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, lintas sektor / pemerintah daerah, dan media.	Koordinasi dengan Lintas Sektor seperti Tokoh Masyarakat terkait pelaksanaan KIE Obat dan Makanan serta Pemda dan OPD dalam rangka pelaksanaan program intervensi keamanan pangan, dan akademisi pada penyusunan standar pelayanan			Koordinasi dengan media terkait publikasi kegiatan strategis BBPOM di Jakarta belum optimal	Terjalinnnya koordinasi dengan baik terkait publikasi kegiatan strategis BBPOM di Jakarta dengan stakeholder termasuk unsur Pramuka dan media.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
		BBPOM di Jakarta serta media untuk publikasi kegiatan strategis BBPOM di Jakarta				
2	Peningkatan strategi penyuluhan dan KIE dengan cara mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah DKI Jakarta dan memerhatikan	Perencanaan dan pelaksanaan KIE bersama tokoh masyarakat serta sosialisasi keamanan obat dan makanan dalam kerangka Perspektif Gender serta		Belum mencantumkan perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan	Sudah mencantumkan perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan, dan cakupan wilayah.	mengusung tema yang berbeda-beda pada pelaksanaannya .				
3	Memfaatkan media KIE yang banyak diakses masyarakat seperti media luar ruang melalui pemasangan poster, banner, dan	Publikasi informasi Obat dan Makanan melalui Videotron			Publikasi informasi Obat dan Makanan melalui Videotron belum	Optimalisasi publikasi berbagai informasi Obat dan Makanan, berupa iklan layanan Masyarakat serta informasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
	<i>videotron di tempat-tempat umum.</i>				<i>dilakukan secara optimal</i>	<i>mengenai inovasi pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan Masyarakat melalui Videotron.</i>
4	<i>Menyusun konten/materi penyuluhan dan KIE untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, misalnya melalui infografis atau</i>	<i>Penyusunan materi keamanan Obat dan Makanan serta publikasi melalui media sosial melalui inovasi ARIPIN (Asupan Rabuan</i>			<i>Pelaksanaan pemberian informasi mengenai Obat dan Makanan melalui media sosial sebagian besar merupakan</i>	<i>Penyusunan materi informasi Obat dan Makanan secara rutin melalui jadwal publikasi inovasi ARIPIN</i>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
	<i>videografis mengenai nomor izin edar, bahan berbahaya, label produk Obat dan Makanan.</i>	<i>Pintar) dan Kosidah Jakarta (Kilas Informasi Berfaedah) yang berisi Tips-tips Obat dan Makanan</i>			<i>repost dari konten BPOM pusat.</i>	<i>dan Kosidah Jakarta.</i>
5	<i>Menggencarkan promosi tagline KataBPOM dan Cek KLIK melalui berbagai media.</i>	<i>Pencantuman tagline KataBPOM dan Cek KLIK pada setiap konten materi KIE dan publikasi informasi Obat dan Makanan</i>			<i>Sosialisasi tagline KataBPOM sebagian besar dilakukan melalui KIE tatap muka</i>	<i>Optimalisasi sosialisasi tagline KataBPOM dan Cek KLIK baik melalui pertemuan tatap muka maupun media sosial melalui konten materi</i>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
					yang disusun secara rutin.	

Tabel 34. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

6.9 Evaluasi Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja tahun 2023 terkait Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Hasil indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di

wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 diperoleh sebesar 91.89 dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 89.00 diperoleh capaian sebesar 103.25% (Sangat baik). Hasil tersebut dapat menjadi gambaran penyusunan laporan kinerja ditahun selanjutnya.

3.4. SASARAN STRATEGIS III

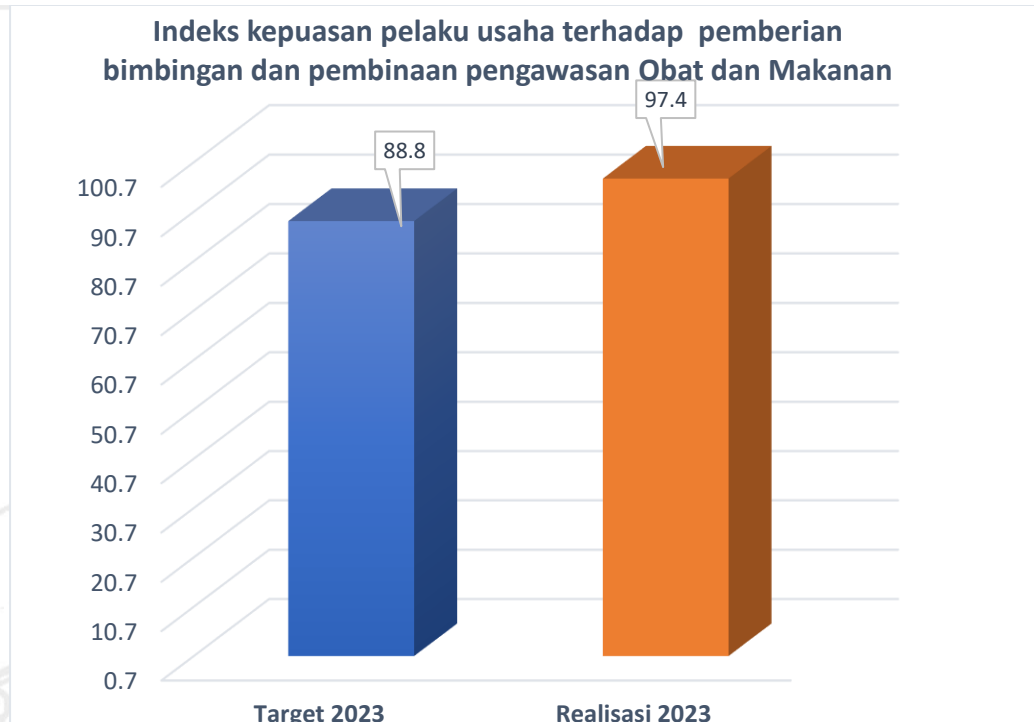
Capaian sasaran strategis III, yaitu meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

7.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,8	97,40	109,68	Sangat Baik

Tabel 35. Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 30. Grafik Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian pelaku usaha terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Pelaku Usaha.

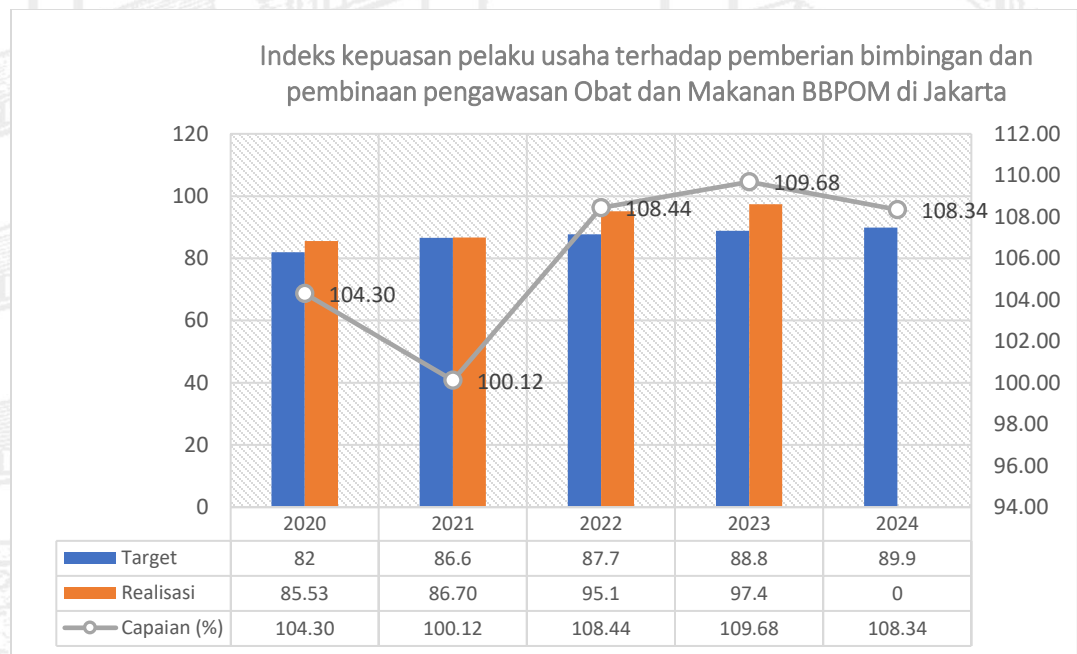
Dasar pelaksanaan survei mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian

Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2021. Teknis pengumpulan data mengacu pada pedoman terbagi atas cara setelah kegiatan bimbingan langsung petugas memberikan link kuisioner yang dapat diakses oleh peserta melalui link <https://surveiprkom.pom.go.id>.

Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 sebesar 97,4 (sembilan puluh tujuh koma empat) dan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 88,8 (delapan puluh delapan koma delapan) maka capaian 109,68 % dengan jumlah kegiatan 79 (tujuh puluh sembilan) kegiatan dan jumlah responden sebanyak 1215 (seribu dua ratus lima belas) responden.

7.2. Perbandingan target dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

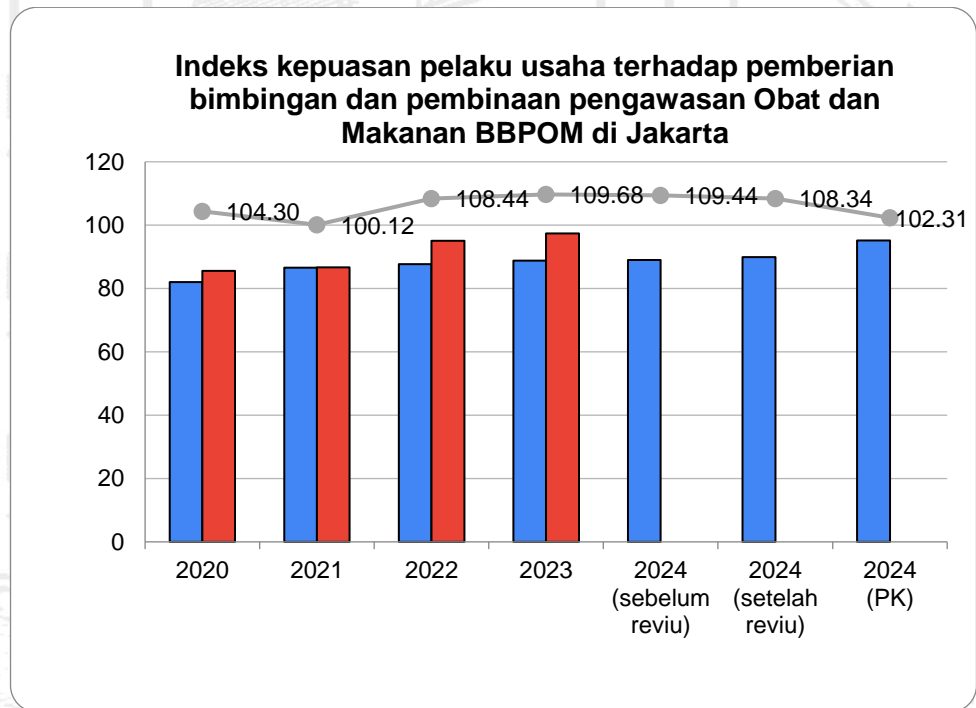


Gambar 31. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, 2021 dan 2022, capaian tahun 2023 mengalami kenaikan dan jika dilihat target tahun 2024 BBPOM Jakarta dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indeks kepuasan pelaku usaha dengan mempertahankan konsistensi dalam melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

7.3. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian sampai tahun 2022 mengalami kenaikan dari 86,70 menjadi 95,10 dan jika dilihat target tahun 2024 BBPOM Jakarta dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indeks kepuasan pelaku usaha dengan mempertahankan konsistensi dalam melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

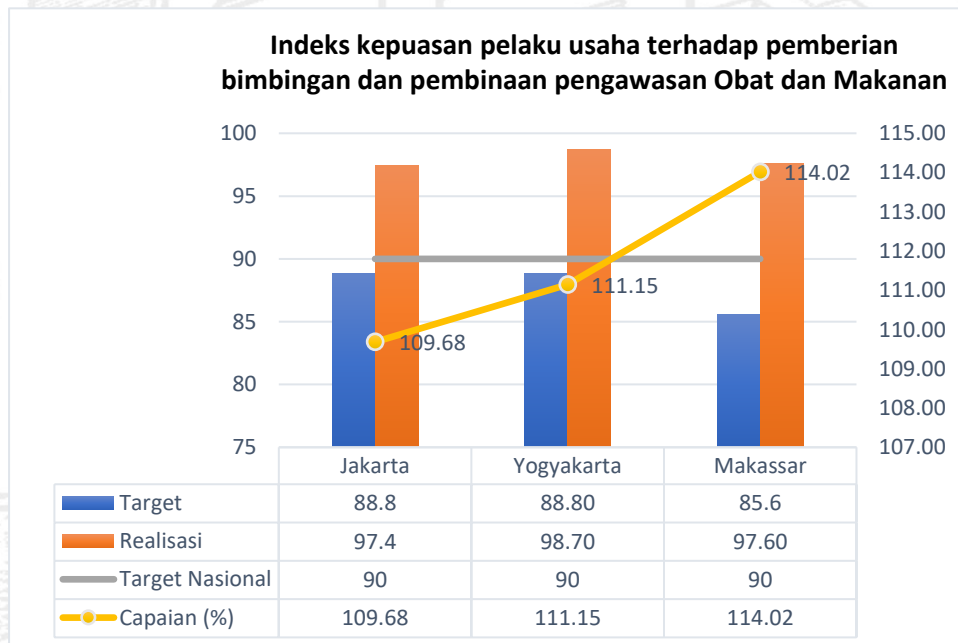


Perbandingan capaian tahun 2023, target sebelum revidi Renstra, target setelah revidi renstra dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tergambar pada tabel berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	97.4	89	109.44%	Tercapai/melampaui ▲
Setelah Review	97.4	89.9	108.34%	Tercapai/melampaui ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	97.4	95.2	102.31%	Tercapai/melampaui ▲

Tabel menunjukkan bahwa realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan ketiga target menunjukkan kategori tercapai/melampaui. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target untuk memastikan bahwa target tidak terlalu rendah yang dapat mengakibatkan menurunnya optimalisasi kinerja. Target yang SMART merupakan salah satu tools untuk memastikan perbaikan berkelanjutan terus diupayakan.

7.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar SEQ Gambar * ARABIC 33. Perbandingan Indeks kepatuhan (Compliance Index) pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023 dengan Balai Lain

Berdasarkan Gambar 33, dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan pelaku usaha BBPOM di Jakarta dan dua unit lain yang setara yaitu BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Makassar melampaui target

nasional tahun 2023 sebesar 90. Dari ketiga unit realisasi BBPOM di Jakarta paling rendah, namun jumlah kegiatan dan jumlah responden paling tinggi. Jumlah kegiatan yang diselenggarakan BBPOM di Jakarta sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) kegiatan dengan jumlah responden 1215 (seribu dua ratus lima belas), sedangkan jumlah kegiatan yang diselenggarakan BBPOM di Yogyakarta 11 (sebelas) kegiatan dengan jumlah responden 191 (seratus Sembilan puluh satu) dan jumlah kegiatan yang diselenggarakan BBPOM di Makasar sebanyak 6 (enam) kegiatan dengan jumlah responden 78 (tujuh puluh delapan). BBPOM di Jakarta mendapat predikat sebagai UPT dengan jumlah kegiatan dan jumlah responden terbanyak.

7.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Adanya peningkatan target nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha yang diberikan kepada Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2023 sebesar 88,8 yang lebih besar dari target tahun 2022 sebesar 87,7. Hal ini dapat menjadi pemicu personil BBPOM di Jakarta untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dalam memberikan bimbingan dan pembinaan dengan lebih baik
2. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan, antara lain diselenggarakan desk CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen permohonan izin penerapan CPPOB, desk registrasi, baik secara luring maupun daring.
3. BBPOM di Jakarta dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan melaksanakan desk registrasi bagi pelaku usaha UMKM pangan yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun yang telah memiliki izin penerapan CPPOB. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan yang

dilakukan oleh BBPOM di Jakarta. Tahun 2023 desk registrasi telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) secara luring di BBPOM di Jakarta

<i>Tanggal kegiatan</i>	<i>Jumlah pelaku usaha</i>	<i>Jumlah NIE yang terbit</i>
<i>21 – 22 Februari 2023</i>	<i>48</i>	<i>32</i>
<i>29 – 30 Maret 2023</i>	<i>46</i>	<i>33</i>
<i>23 – 24 Mei 2023</i>	<i>37</i>	<i>31</i>
<i>26 – 27 Juni 2023</i>	<i>47</i>	<i>22</i>
<i>31 Juli dan 3 Agustus 2023</i>	<i>43</i>	<i>124</i>

<i>Tanggal kegiatan</i>	<i>Jumlah pelaku usaha</i>	<i>Jumlah NIE yang terbit</i>
<i>22 – 23 Agustus 2023</i>	<i>54</i>	<i>109</i>
<i>20 dan 26 September 2023</i>	<i>44</i>	<i>144</i>
<i>30 – 31 Oktober 2023</i>	<i>46</i>	<i>23</i>
<i>23 – 24 November 2023</i>	<i>44</i>	<i>52</i>
<i>11 dan 12 Desember 2023</i>	<i>55</i>	<i>66</i>

4. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendekatkan pelayanan melalui kegiatan kerling dan pelayanan di Mal Pelayanan Publik sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pelayanan bimbingan dan pembinaan.

7.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- 1) Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha pada 2023 Balai Besar POM di Jakarta, secara kontinu melaksanakan desk CAPA untuk perbaikan hasil audit ataupun diskusi terkait perbaikan dokumen untuk pemenuhan dalam rangka penerbitan izin penerapan CPPOB untuk berkomunikasi kepada pelaku usaha terhadap dokumen yang telah disampaikan melalui system e-sertifikasi CPPOB
- 2) Balai Besar POM di Jakarta secara intensif melakukan kegiatan Kerling Jakarta dan Sultan Betawi untuk memberikan informasi bagi pelaku usaha. Kerling Jakarta merupakan kegiatan jemput bola di mana tim Balai Besar POM di Jakarta mengunjungi lokasi-lokasi yang ditunjuk oleh kantor Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi, sedangkan untuk Sultan Betawi layanan diberikan di Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, semua ini dilakukan dalam rangka memudahkan pemberian layanan kepada pelaku usaha.
- 3) Kerling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk memperluas layanan terhadap UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha jika akan memerlukan pelayanan.
- 4) Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both BBPOM di Jakarta yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan

7.7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- 1) Kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan Balai Besar POM di Jakarta meningkat seiring dengan banyaknya pelaku usaha yang mendapatkan feedback segera dari Balai Besar POM di Jakarta
- 2) Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pelayanan Balai Besar POM di Jakarta juga meningkat dengan diselenggarakannya pelayanan prima dalam bentuk desk CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen dalam rangka permohonan izin penarapan CPPOB maupun desk registrasi
- 3) Kegiatan fasilitasi pelaku usaha UMKM pangan, produksi obat tradisional dan produksi kosmetik juga dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Jakarta
- 4) Kegiatan Kerling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling yang bertujuan mendekatkan pelayanan dengan pelaku usaha diharapkan kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan bimbingan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta semakin meningkat

7.8. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder dan masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

8.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET TAHUN 2023</i>	<i>REALISASI TAHUN 2023</i>	<i>CAPAIAN TAHUN 2023 (%)</i>	<i>KATEGORI</i>
<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</i>	78.33	80.10	102.26	Sangat baik

Tabel 36. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

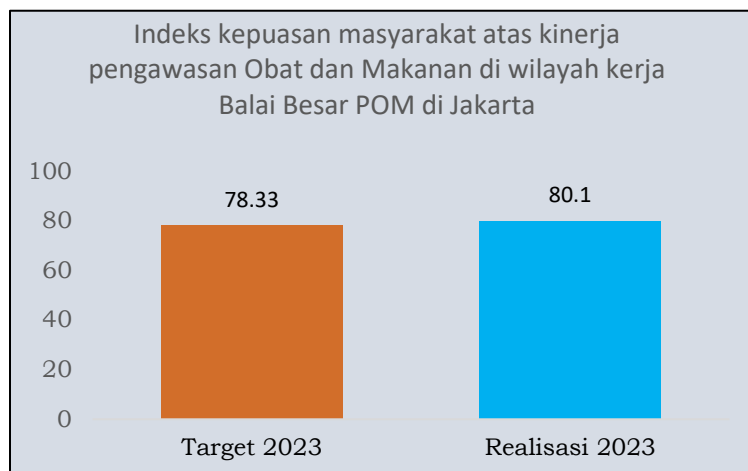
- 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- 2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- 4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi Kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu, dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan metode dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Hasil survei ini digunakan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan. Pengukuran indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Kriteria yang digunakan adalah:



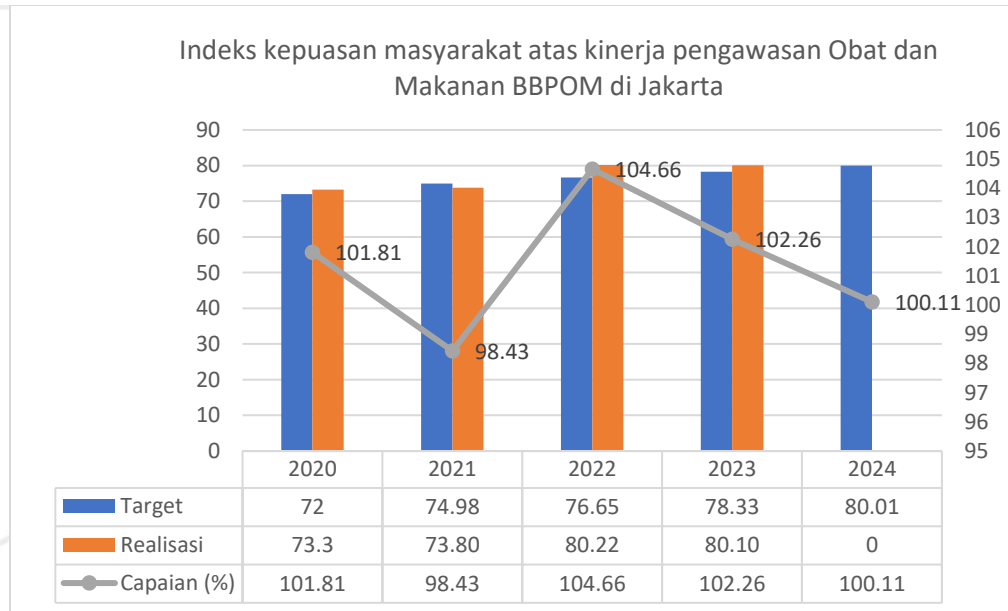
<i>Kategori</i>	<i>Interval Indeks</i>
<i>Tidak Puas</i>	$\leq 45,00$
<i>Kurang Puas</i>	45.01 – 60.00
<i>Cukup Puas</i>	60.01 – 75.00
<i>Puas</i>	75.01 – 90.00
<i>Sangat Puas</i>	≥ 90.01



Realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ini diperoleh sebesar 80,10 dengan kategori Puas. Hasil ini sudah melampaui target sebesar 78.33 dengan capaian sebesar 102.26% (Sangat baik).

Hasil indeks per kategori produk adalah sebagai berikut: Obat sebesar 80.08; Obat Tradisional sebesar 80.04; Suplemen Kesehatan sebesar 80.09; Kosmetik sebesar 80.04; dan Pangan Olahan sebesar 79.87. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat per variabel, yaitu upaya pengawasan sebesar 80.05; upaya penindakan sebesar 81.07; pemberian informasi sebesar 79,15; dan jaminan keamanan sebesar 80.14.

8.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya



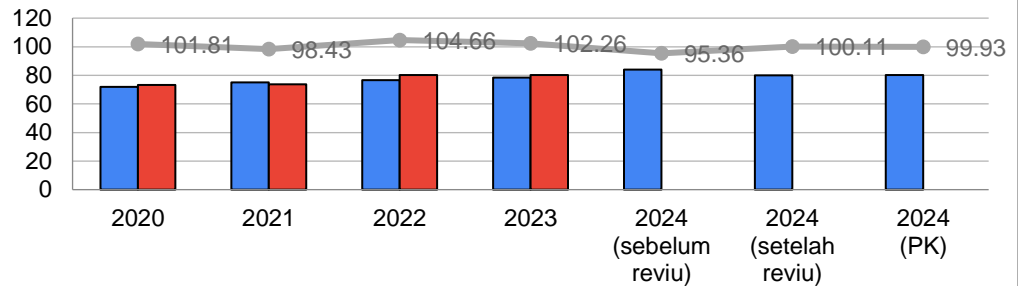
Gambar 35. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta meningkat dari tahun 2020-2023 secara berturut-turut sebesar 73.3 (Cukup Puas), 73.80 (Cukup Puas), 80.22 (Puas), dan 80.10 (Puas). Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021-2022 lebih signifikan dibandingkan peningkatan pada tahun 2020-2021.

Capaian kinerja pada tahun 2020-2023 telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 101.81%, 98.43%, dan 104.66% dan 102.26% secara berurutan.

8.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah periode renstra RPJMN 2020-2024

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta



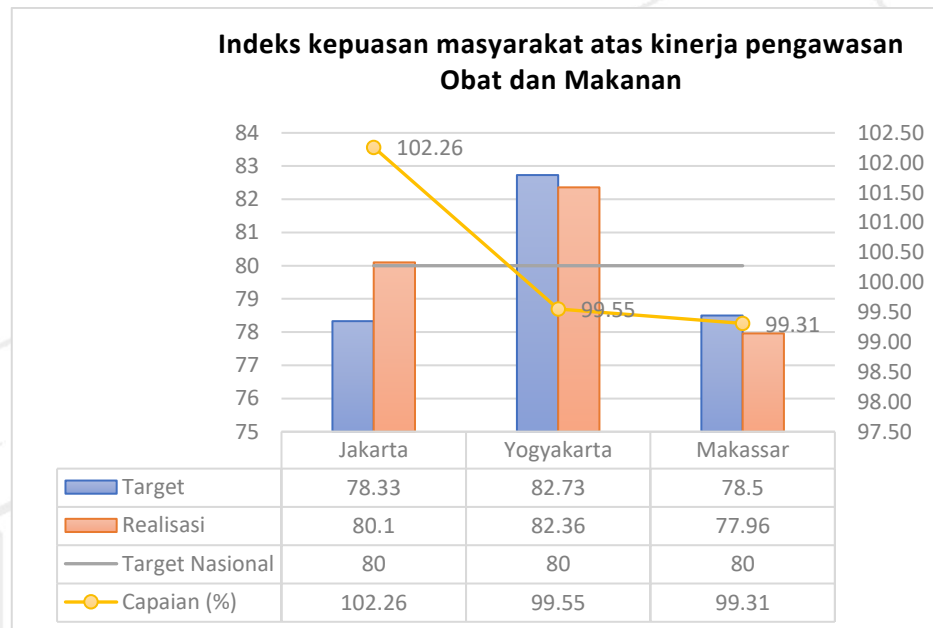
Gambar 36. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020-2023 diperoleh berturut-turut sebesar 73.30, 73.80, 80.22, dan 80.10. Sedangkan apabila capaian tahun 2023 dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebelum dan sesudah revidu renstra serta dengan target perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	80.1	84	95.36%	Akan Tercapai ▲
Setelah Review	80.1	80.01	100.11%	Tercapai/Melampaui ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	80.1	80.16	99.92%	Akan Tercapai ▲

Telah dilakukan langkah yang tepat untuk menyesuaikan target pada perjanjian kinerja Tahun 2024 menjadi 80.16 untuk memastikan target yang SMART. Dapat disimpulkan bahwa target akhir diperkirakan akan tercapai di akhir periode renstra ($70\% \leq 99.93\% < 100\%$).

8.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/ setara dan target nasional



Gambar 37. Perbandingan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/ setara

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 sebesar 80.10. Bila dibandingkan dengan target sebesar 78.33, diperoleh capaian sebesar 102.26% (tercapai/melampaui). Di sisi lain, realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Makassar secara berturut-turut sebesar 82.36 dan 77.96. Jika dibandingkan dengan target sebesar 82.73 dan 78.5 diperoleh capaian sebesar 99.55% dan 99.31% (tidak tercapai target). Target secara nasional ialah 80, sehingga dapat disimpulkan realisasi oleh BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta telah melampaui target secara nasional tahun 2023.

8.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa faktor penyebab capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi publikasi berbagai program pengawasan Obat dan Makanan, seperti pertemuan lintas sektor dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta, konsultasi publik, pemanfaatan subsite dan media sosial melalui berita aktual dan infografis yang menampilkan informasi mengenai kinerja pengawasan yang lebih menarik.
- 2) Peningkatan penyebarluasan/ publikasi hasil kinerja BBPOM di Jakarta terkait upaya pengawasan, penindakan, pemberian informasi, dan jaminan keamanan melalui media cetak dan media elektronik, yaitu koran, radio, videotron, dan media sosial (Twitter, Instagram, dan Facebook) yang mudah diakses masyarakat.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja pada periode mendatang meliputi:

1. Meningkatkan pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan menysasar berbagai lapisan masyarakat, misalnya melalui iklan layanan masyarakat di media cetak maupun elektronik serta media sosial.
2. Meningkatkan publikasi dan kegiatan public relation terkait aktivitas kinerja pengawasan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menyebarluaskan informasi hasil pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat serta pendampingan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik melalui media digital, media sosial, maupun media luar ruang seperti poster/ pamphlet.
3. Meningkatkan engagement dengan masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan fitur media sosial melalui penyusunan konten yang fokus pada cerita yang menarik dan relevan atau interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial

8.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	78.33	80.10	102.26	316,719,810	316,511,192	99.93%	1,02	0,02	100%

Tabel 37. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.02 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti sarana penyebaran informasi dan KIE Obat dan Makanan yang optimal serta sumber daya manusia yang memadai di bidang komunikasi dan informasi Obat dan Makanan dalam rangka

meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

8.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 antara lain:

- 1) Intensifikasi penerapan inovasi peningkatan kinerja, seperti LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi Whatsapp), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi Online), Laron Baja (Verifikasi Lartas Online Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) yang memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada di BBPOM di Jakarta sehingga masyarakat dapat merasakan dampak secara langsung dari kinerja pengawasan BBPOM di Jakarta.
- 2) Terselenggaranya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti intensifikasi pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar, dan produk ilegal serta program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah. Selain itu, terlaksananya program pendampingan bagi pelaku usaha yang akan mendapatkan nomor izin edar serta pengujian untuk pelaku usaha UMKM.

- 3) Peningkatan publikasi kinerja yang menampilkan aktivitas BBPOM di Jakarta yang meliputi upaya pengawasan, upaya penindakan, pemberian informasi, dan jaminan keamanan melalui media cetak (koran), media elektronik (radio), media sosial, dan media luar ruang (videotron).

8.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Peningkatan publikasi terkait kinerja pengawasan dengan pesan utama BPOM melindungi	Publikasi program dan capaian kinerja BBPOM di Jakarta baik secara langsung maupun tidak	-	-	Publikasi program dan capaian kinerja BBPOM di Jakarta melalui	Telah dilakukan publikasi program dan capaian kinerja BBPOM di

	<i>masyarakat melalui berbagai media publikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.</i>	<i>langsung melalui berbagai media, baik media cetak/elektronik maupun media sosial.</i>			<i>berbagai media belum optimal</i>	<i>Jakarta melalui berbagai media promosi meliputi media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media sosial</i>
2	<i>Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan lebih memerhatikan kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, Pendidikan, dan cakupan wilayah sehingga materi dapat lebih</i>	<i>Perencanaan dan pelaksanaan KIE serta sosialisasi keamanan obat dan makanan dalam kerangka Perspektif Gender serta mengusung tema yang berbeda-beda pada pelaksanaannya .</i>	-	-	<i>Belum mempertimbangkan perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan</i>	<i>Sudah mempertimbangkan perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan</i>

	<i>mudah dipahami masyarakat.</i>					
3	<i>Peningkatan KIE secara aktif kepada masyarakat terhadap bahan-bahan berbahaya yang mungkin disalahgunakan pada Obat dan Makanan.</i>	<i>Pelaksanaan KIE serta sosialisasi keamanan pangan melalui kegiatan intensifikasi pengawasan pangan melalui operasional mobil laboratorium keliling ke sekolah, pasar tradisional dan pasar modern.</i>	-	-	<i>Pelaksanaan KIE mengenai keamanan pangan melalui kegiatan intensifikasi pengawasan pangan melalui operasional mobil laboratorium keliling ke sekolah, pasar tradisional dan pasar modern.</i>	<i>Peningkatan kegiatan mobil laboratorium keliling secara terpadu dan melibatkan pramuka sebagai kader keamanan pangan.</i>

Tabel 38. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

8.9 Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja.

Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder terkait lainnya termasuk masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Realisasi kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ini diperoleh sebesar 80,10 dengan kategori Puas. Hasil ini sudah melampaui target sebesar 78.33 dengan capaian sebesar 102.26% (Sangat baik). Berdasarkan hasil tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan laporan kinerja selanjutnya.

9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

9.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
<i>Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</i>	92	94.71	102.95	Sangat baik

Tabel 39. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

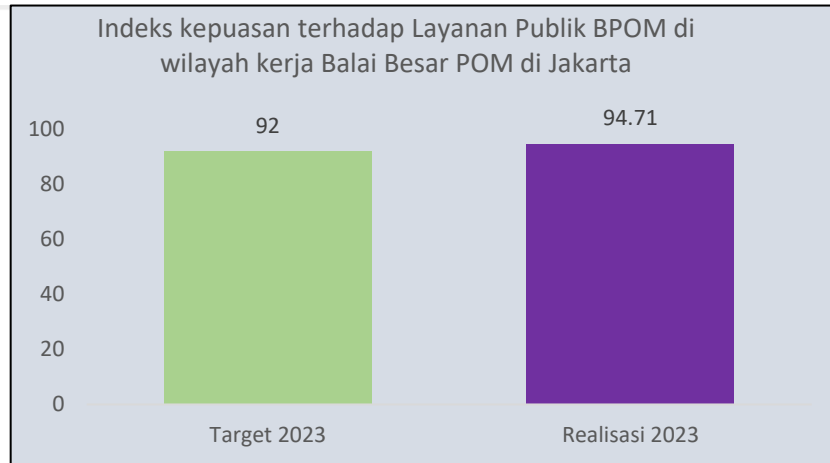
Survei dilakukan bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil dari pelaksanaan survei diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM.

Survei dilakukan dengan dua metode, yaitu secara langsung dan *online* dan diolah oleh aplikasi Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAPA APIP) (<https://sapaapip.pom.go.id/>)

Kriteria yang digunakan adalah:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel 40. Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta



Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 diperoleh sebesar 94,71 dengan mutu Pelayanan A (Sangat Baik). Dengan realisasi ini, diperoleh capaian sebesar 102.95% bila dibandingkan dengan target sebesar 92. Nilai indeks ini diperoleh dari 301 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

<i>No</i>	<i>Karakteristik</i>	<i>Indikator</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
<i>1</i>	<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Laki</i>	<i>119</i>	<i>40%</i>
		<i>Perempuan</i>	<i>182</i>	<i>60%</i>
<i>2</i>	<i>Pendidikan</i>	<i>≤ SMA/Sederajat</i>	<i>51</i>	<i>17%</i>

			<i>DI/D2/D3</i>	38	13%
			<i>D4/S1</i>	145	48%
			<i>S2/Profesi/S3</i>	67	22%
			<i>PNS/TNI/Polri</i>	6	2%
			<i>Peneliti/dosen</i>	6	2%
3	<i>Pekerjaan</i>		<i>Pelajar/Mahasiswa</i>	11	3.7%
			<i>Pegawai Swasta</i>	173	57%
			<i>Wiraswasta</i>	71	24%

		<i>Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan</i>	<i>1</i>	<i>0.3%</i>
		<i>Lainnya</i>	<i>33</i>	<i>11%</i>
<i>4</i>	<i>Usia</i>	<i>≤ 25 Tahun</i>	<i>30</i>	<i>10%</i>
		<i>26 – 30 Tahun</i>	<i>82</i>	<i>27%</i>
		<i>31 – 35 Tahun</i>	<i>53</i>	<i>18%</i>
		<i>36 – 40 Tahun</i>	<i>36</i>	<i>12%</i>
		<i>≥ 41 Tahun</i>	<i>100</i>	<i>33%</i>

Tabel 41. Nilai Indeks Kepuasan dri Responden Tahun 2023

Sedangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat per jenis pelayanan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
<i>Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik</i>	93.33	92.92	95.42	95.42	95.83	96.25	97.5	97.08	95.42	95.46
<i>Sertifikasi cara distribusi yang baik</i>	86.67	86.67	92.22	86.67	90	86.67	93.33	93.33	93.33	89.88
<i>Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik secara bertahap golongan A</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik secara bertahap golongan B</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
<i>Pengujian Obat dan Makanan</i>	95.83	95.83	100	100	100	100	100	100	100	99.07
<i>Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan</i>	92.82	92.73	95.04	94.24	94.59	95.21	96.63	95.83	94.95	94.67
<i>Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap</i>	94.44	88.89	94.44	88.89	88.89	88.89	94.44	88.89	88.89	90.74
<i>Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik</i>	92.86	92.26	94.15	95.54	93.45	95.24	96.73	93.45	93.75	94.16

Tabel 42. Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat per Tahun 2023

Nilai SKM per unsur dan unit layanan adalah sebagai berikut:

Unsur Layanan		2023
<i>U1</i>	<i>Persyaratan</i>	<i>92.97</i>
<i>U2</i>	<i>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</i>	<i>92.69</i>
<i>U3</i>	<i>Waktu Penyelesaian</i>	<i>95.02</i>
<i>U4</i>	<i>Biaya/Tarif</i>	<i>94.63</i>
<i>U5</i>	<i>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</i>	<i>94.57</i>
<i>U6</i>	<i>Kompetensi Pelaksana</i>	<i>95.29</i>
<i>U7</i>	<i>Perilaku Pelaksana</i>	<i>96.79</i>

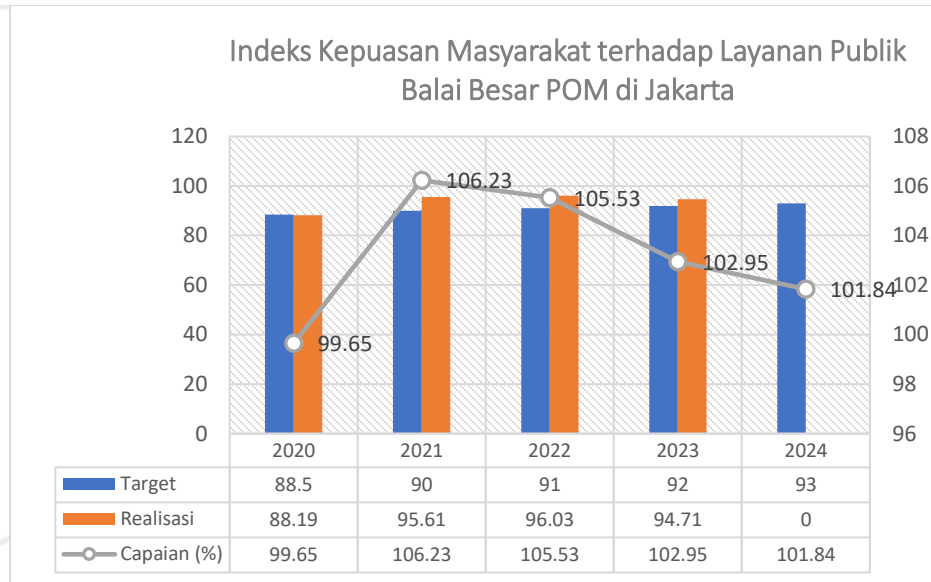
Unsur Layanan		2023
U8	<i>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</i>	<i>95.57</i>
U9	<i>Sarana dan Prasarana</i>	<i>94.85</i>
Nilai SKM Unit Layanan		94.71

Tabel 43

Tabel 44. Nilai dan Unit 2023

SKM per Unsur Layanan Tahun

9.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya



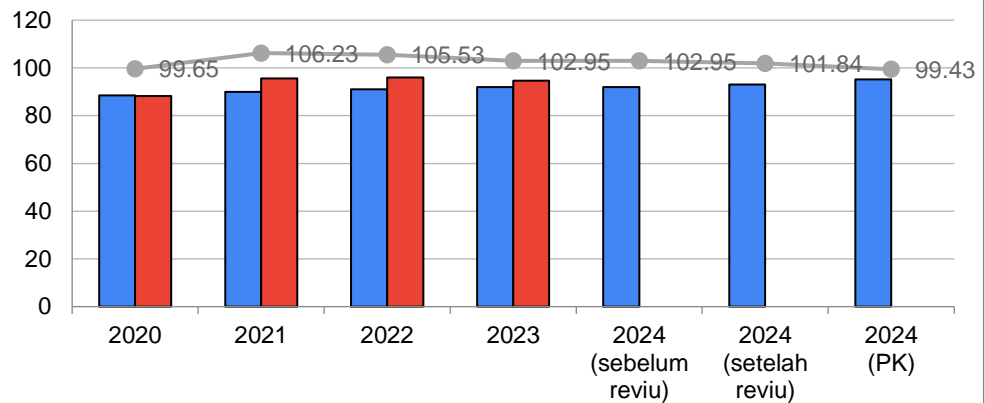
Gambar 39. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jakarta

Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari 2020-2023 secara berturut-turut sebesar 88.19 (Baik), 95.61 (Sangat Baik), 96.03 (Sangat Baik), dan 94.71 (Sangat Baik).

Capaian kinerja pada tahun 2020-2023 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu secara berturut-turut sebesar 99.65%, 106.23%, 105.53%, dan 102.95%.

9.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah periode renstra RPJMN 2020-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta

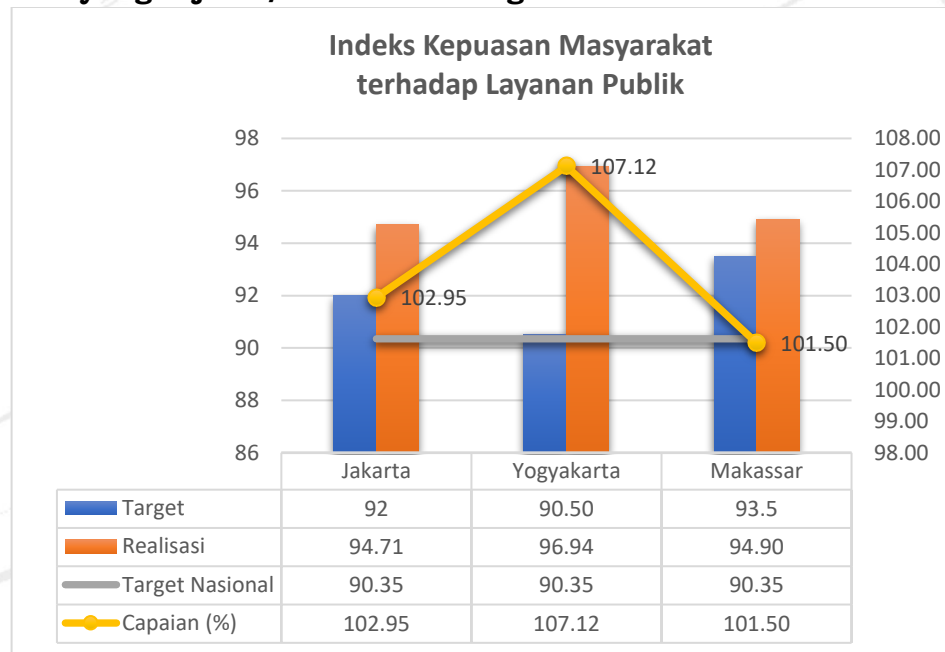


Gambar 40. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Realisasi indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2023 berturut-turut sebesar 88.19, 95.61, 96.03, dan 94.71. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah periode renstra RPJMN 2020-2024, sebelum dan sesudah reviu renstra serta dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dapat diperkirakan target akhir 2024 akan tercapai pada periode akhir renstra ($70\% \leq 99.43\% < 100\%$). Penyesuaian target ini merupakan Langkah yang tepat mengingat capaian pada Tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan pada Renstra dan Reviu Renstra.

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	94.71	92	102.95%	Tercapai/Melampaui ▲
Setelah Review	94.71	93	101.84%	Tercapai/Melampaui ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	94.71	95.25	95.25%	Akan Tercapai ▲

9.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/ setara dan target nasional



Gambar 41. Perbandingan indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/ setara

Realisasi kinerja indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar secara berturut-turut menunjukkan nilai sebesar 94.71, 96.94, dan 94.90. Dengan nilai realisasi ini, nilai indeks kepuasan masyarakat BBPOM di Yogyakarta menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Makassar. Target indeks kepuasan masyarakat BBOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar secara berturut-turut sebesar 92, 90.50, dan 93.5 sehingga diperoleh capaian sebesar 102.95%, 107.12%, dan 101.50% yang artinya capaian kinerja telah tercapai/melampaui. Target nasional indeks kepuasan terhadap Layanan Publik tahun 2023 sebesar 90.35. Oleh karena itu, dapat disimpulkan nilai indeks yang dicapai oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar seluruhnya telah melampaui target secara nasional yang telah ditetapkan.

9.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berikut ini beberapa faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023:

- 1) Optimalisasi penyediaan layanan publik BBPOM di Jakarta melalui berbagai kanal, baik secara tatap muka di loket layanan kantor BBPOM di Jakarta (Senin-Kamis pk. 08.00-16.30 WIB dan Jumat pk. 08.00-16.00 WIB), Mall Pelayanan Publik DMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui inovasi Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) pada hari Selasa pk. 08.00-15.00 WIB serta melalui Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) bekerja sama dengan OPD di tingkat Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Optimalisasi layanan publik melalui online antara lain LAILA (layanan informasi dan pengaduan melalu Whatsapp), None Sisi (layanan online konsultasi sertifikasi), layanan Laron Baja (lartas online BBPOM di Jakarta), SP4N Lapor serta layanan online lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pengguna.
- 3) Peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang informasi layanan informasi dan pengaduan di BBPOM di Jakarta melalui media cetak koran, media sosial dan tayangan media luar ruang seperti banner dan videotron yang mudah diakses masyarakat.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. Intensifikasi sosialisasi standar pelayanan, persyaratan, dan alur pelayanan publik melalui media offline dan online.
2. Pengaktifan kembali pembelajaran bersama antara tim Pemeriksaan dan Infokom melalui Si Kokom untuk meningkatkan kompetensi pelaksana layanan.

9.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	92	94.71	102.95	245,995,000	245,832,745	99.93%	1.03	0.03	100%

Tabel 45 Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.03 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh optimalisasi penyediaan layanan publik serta peningkatan sosialisasi ke masyarakat tentang informasi layanan informasi dan pengaduan di BBPOM di Jakarta dalam rangka meningkatkan kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

9.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 antara lain:

- 1) Adanya komitmen BBPOM di Jakarta dalam mengawal pelaksanaan pelayanan publik dengan melakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri serta melakukan tindak lanjut secara rutin setiap bulan, dilakukan pembahasan pada forum pembahasan/rapat ketua tim kerja.
- 2) Pelaksanaan forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat terkait standar pelayanan publik yang ada di BBPOM di Jakarta sekaligus sebagai wadah aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di BBPOM di Jakarta.

9.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Peningkatan akses layanan informasi berbasis digital baik melalui subsite maupun portal Jakdigital.	Peningkatan akses layanan publik berbasis digital baik melalui subsite (https://jakarta.pom.go.id) maupun portal Jakdigital (https://bbpomjakarta.id)	-	-	Akses layanan publik berbasis digital hanya melalui subsite (https://jakarta.pom.go.id)	Pengembangan portal Jakdigital sebagai upaya peningkatan akses layanan publik berbasis digital yang dapat diakses pada https://bbpomjakarta.id
2	Diadakannya sosialisasi mengenai ruang lingkup	Pencantuman informasi ruang lingkup parameter uji pada aplikasi SiPiket			Aplikasi SiPiket masih dalam	Aplikasi SiPiket sudah dapat diakses Masyarakat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
	<i>parameter uji kepada penerima layanan.</i>	<i>yang dapat diakses melalui portal Jakdigital dan pelaksanaan forum konsultasi publik standar pelayanan publik tahun 2023</i>			<i>proses pengembangan</i>	<i>melalui portal Jakdigital.</i>

Tabel 46. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

9.9 Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan

Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder termasuk masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 diperoleh sebesar 94,71 dengan mutu Pelayanan A (Sangat Baik). Dengan realisasi ini, diperoleh capaian sebesar 102.95% bila dibandingkan dengan target sebesar 92. Hasil tersebut dapat dijadikan gambaran dalam penyusunan laporan kinerja dimasa mendatang.

3.5. SASARAN STRATEGIS IV

Capaian sasaran strategis IV, yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

10.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN 2023 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91,85	100,93	Sangat Baik

Tabel 47. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - A. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - B. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - C. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - D. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(100+100+67,39+100)/4$

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = 91,85

Keterangan:

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

$$A = 602/602 \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

$$B = 199/199 \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

- C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

$$C = 93/138 \times 100\%$$

$$C = 67,39\%$$

- D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

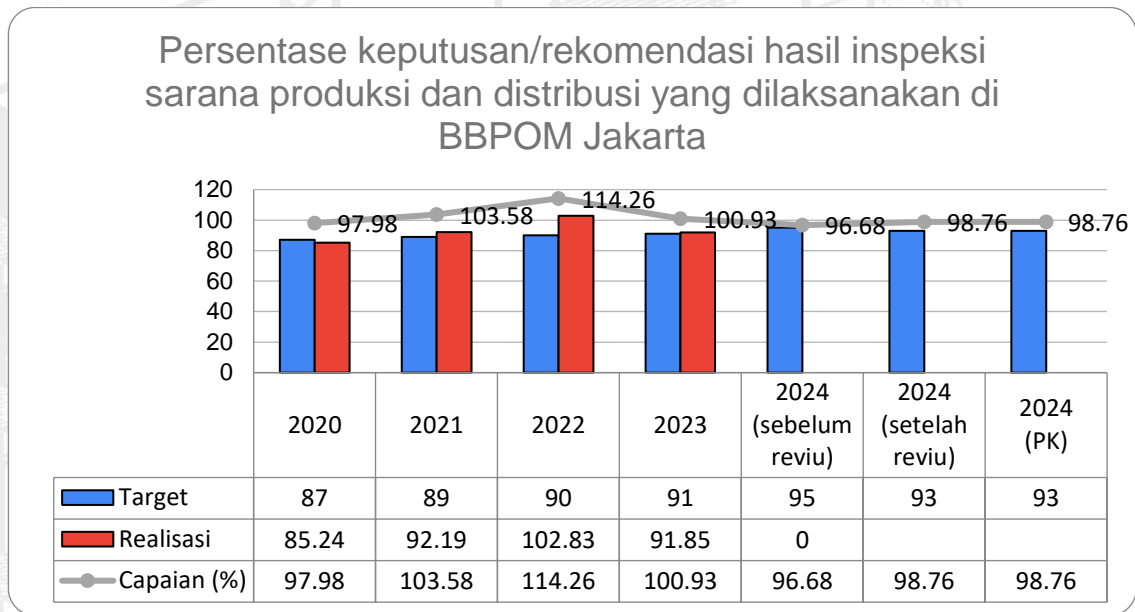
$$A = 65/65 \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2023 melebihi dari target yang

ditetapkan, yaitu 91,85% dengan capaian 100,93% terhadap target sehingga masuk dalam kriteria **Sangat Baik**. Secara kuantitatif, jumlah keputusan/ rekomendasi bertambah dibandingkan tahun 2022

10.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 42. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

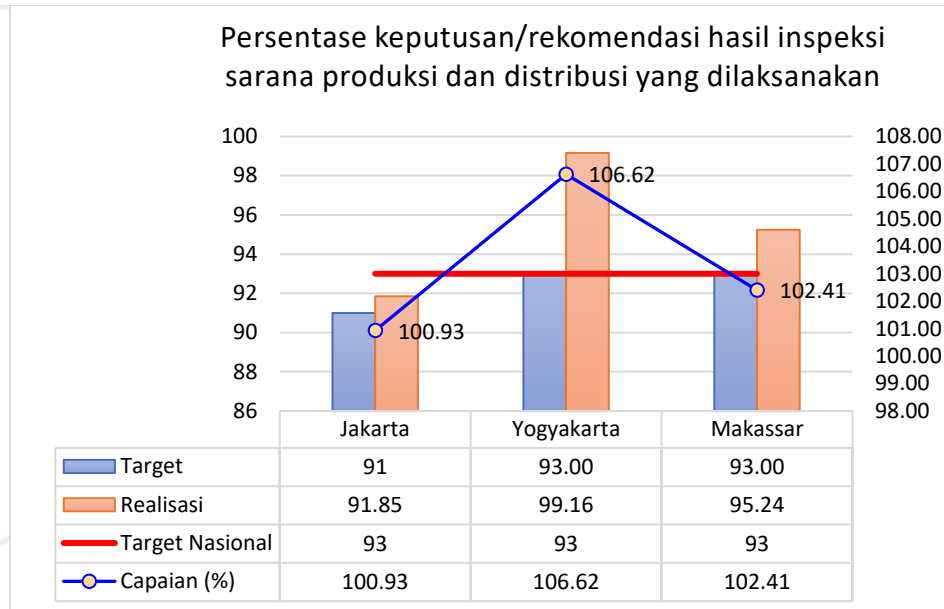
Berdasarkan grafik tersebut, realisasi Indikator meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Meskipun demikian, realisasi masih mencapai target tahun 2023. Perbandingan capaian tahun 2023 dengan target sebelum dan

sesudah rewiu renstra dan dengan perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	91.85	95	96.68%	Akan Tercapai ▲
Setelah Review	91.85	93	98.76%	Akan Tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	91.85	93	98.76%	Akan Tercapai ▲

Pada awalnya, target tahun 2024 adalah 95 sehingga proyeksi capaian indikator adalah 96,68%. Melihat tren capaian target, maka dilakukan review target pada dokumen rewiu renstra menjadi 93. Target ini tetap digunakan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dengan penurunan target ini, BBPOM Jakarta optimis dapat mencapai target tersebut dengan upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2024.

10.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 43. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 dengan UPT lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta paling rendah bila dibandingkan dengan BBPOM Yogyakarta dan BBPOM Makassar dan berada di bawah target nasional. Meskipun demikian, BBPOM Jakarta, BBPOM Yogyakarta dan BBPOM Makassar berhasil mencapai target masing-masing.

10.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja:

1. Seluruh hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan ditindaklanjuti dengan keputusan/ rekomendasi sehingga memperoleh nilai maksimal yaitu 100%

2. BBPOM selalu menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi dari Badan POM Pusat sehingga persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh nilai 100%
3. Rekomendasi dari pemangku kepentingan (pelaku usaha maupun lintas sektor) selalu direspon dan ditindaklanjuti, contoh permohonan pemusnahan narkoba, psiktropika, prekursor dan produk recall

Penurunan kinerja dibandingkan tahun 2022 disebabkan antara lain:

Laporan hasil inspeksi yang dilaporkan ke Badan POM belum mendapat respon. Berdasarkan hasil pertemuan dengan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika pada Desember 2023, pelaporan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi cukup melalui SIPT dan bersifat satu arah sehingga tidak memerlukan respon dari Pusat dan tidak dipertimbangkan dalam perhitungan indikator kinerja.

10.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91,82	100,93	311.152.250	311.050.763	99,97%	1,01	0,01	Efisien

Tabel 48. Persentase

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.01 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini,

tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

10.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- 1) Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain didukung oleh:
- 2) Adanya monitoring rutin terhadap rekomendasi yang diterbitkan BBPOM Jakarta dan respon dari UPT Lain/ Pusat melalui spreadsheet Roti Buaia (Rekapitulasi Respon terhadap Tindak Lanjut Balai Besar POM di Jakarta).
- 3) Adanya monitoring rutin tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan melalui Spreadsheet Si DOEL (Sistem (Spreadsheet) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut).
- 4) Koordinasi yang baik antara BBPOM Jakarta dengan unit-unit di Badan POM dan UPT lain

10.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Meningkatkan koordinasi dengan unit pusat BPOM dan UPT lain	28 Des 23	-	-	Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaks	Kondisi masih sama, namun untuk tahun 2024 sudah ada Solusi untuk

					anakan oleh Pusat/UPT lain masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT	meningkatkan capaian indikator
--	--	--	--	--	---	-----------------------------------

Tabel 49. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

10.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

11.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN 2023 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	82	90,87	110,82	Sangat Baik

oleh pemangku kepentingan				
---------------------------	--	--	--	--

Tabel 50. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha;
- 2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- 3) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- 4) Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- 5) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
- 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/$

- 7) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(59,87\%+100\%)/2$
- 8) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = 79,94

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

Cara perhitungan:

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

$$A = 497/608 \times 100\%$$

$$A = 81,74\%$$

B. Persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

Cara perhitungan:

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

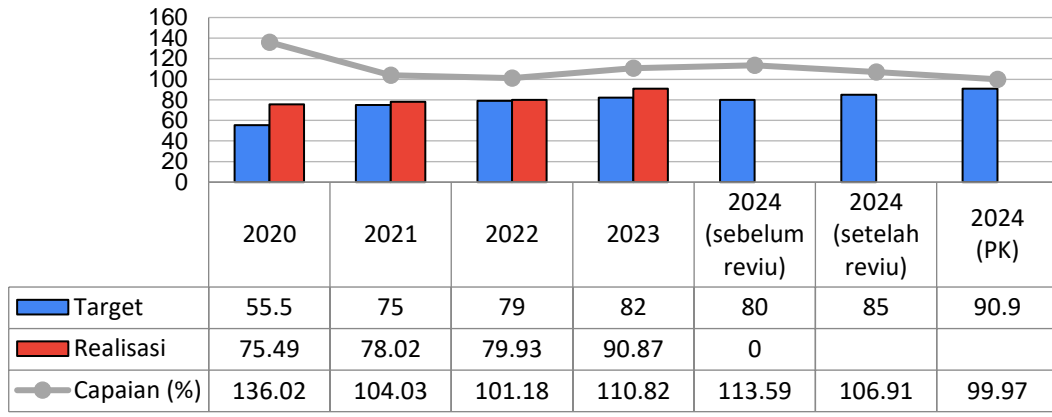
$$B = 13/13 \times 100\%$$

$$B = 100\%$$

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 90,87% telah mencapai target yang ditetapkan yaitu lebih dari 82%. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 110,82% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

17.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di BBPOM Jakarta



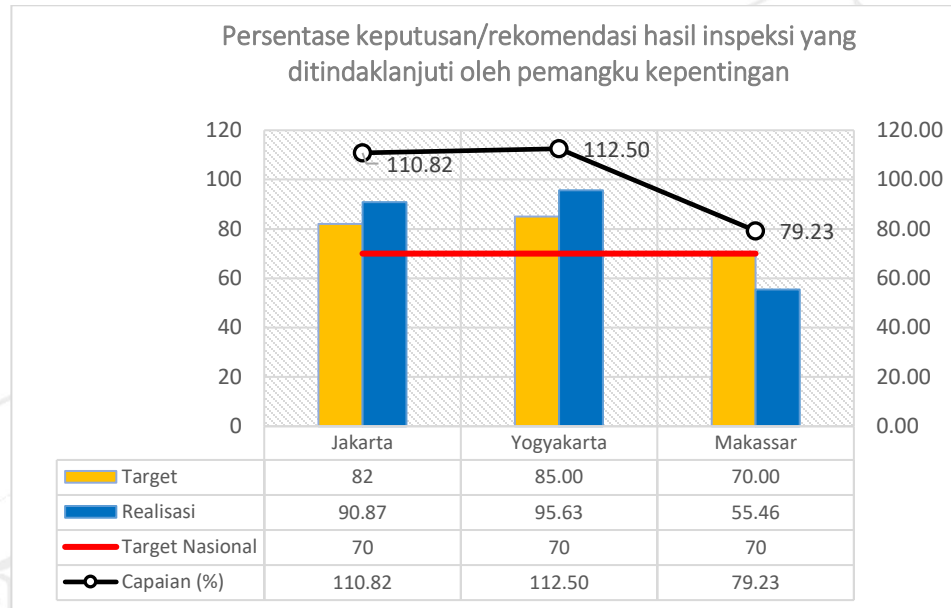
Gambar 44. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Realisasi indikator ini mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai 2023. Demikian juga halnya dengan capaian kinerja. Terdapat perubahan target kinerja pada Rencana strategis sebelum dan sesudah review serta penyesuaian pada target kinerja Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada table berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	90.87	80	113.59%	Tercapai/Melampaui ▲
Setelah Review	90.87	85	106.91%	Tercapai/Melampaui ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	90.87	90.9	99.97%	Akan Tercapai ▲

Kenaikan target tahun 2024 sesuai perjanjian kinerja menjadi 90,9 perlu menjadi perhatian BBPOM di Jakarta, karena perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja agar target dapat terlampaui.

17.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 45. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023 dengan Balai Lainnya

Realisasi BBPOM di Yogyakarta paling tinggi dibandingkan BBPOM Jakarta dan Makassar. Demikian juga dengan target yang ditetapkan oleh Badan POM. BBPOM Yogyakarta dan BBPOM Jakarta berhasil mencapai target sedangkan BBPOM Makassar masih perlu berupaya untuk mencapai target baik target balai maupun target nasional. Target BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta jauh melebihi target nasional, yang berarti ikut berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target Badan POM

17.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah respon yang baik dari lintas sektor terhadap rekomendasi BBPOM Jakarta, dalam hal ini Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait, melalui aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta juga dengan BPOM pusat.

Aspek yang masih belum optimal adalah keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha yaitu 81,74%. Hal ini disebabkan lambatnya respon pelaku usaha terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Jakarta, antara lain pelaku usaha depot jamu dan toko obat di kabupaten kepulauan seribu. Telah dilakukan advokasi dengan Bupati Kepulauan Seribu terkait hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan pada 8 Agustus 2023. Selain itu juga telah dilaksanakan pertemuan dengan asosiasi GP Jamu dan pemerintah daerah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan depot jamu pada 17 Januari 2024.

17.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	90,87	110,82%	311.152.250	311.050.763	99,97%	1,11	0,11	Efisien

Tabel 51. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.02 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

17.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

1. Koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk pembinaan sarana, misal pembinaan sarana pelayanan kefarmasian oleh Dinas/Suku Dinas Kesehatan terkait dengan memberikan tembusan surat rekomendasi tindak lanjut
2. Percepatan tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha
3. Kegiatan pendampingan secara komprehensif terhadap tindaklanjut yang dilakukan lintas sektor terkait dengan Kegiatan Pertemuan dan rapat evaluasi serta pendampingan smart BPOM. FGD Tindak Lanjut Pengawasan PIRT dilaksanakan pada 9 Mei 2023 dan Bimtek Penerapan Aplikasi SP PIRT 30 Mei 2023

17.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelime		
1	Koordinasi dengan lintas sektor tindak lanjut hasil pengawasan IRTP	BBPOM Jakarta berkoordinasi dengan Sudinkes melalui forum FGD terkait tindak lanjut hasil pengawasan IRTP 9 Mei 2023	-	-	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan masih dibawah target yang ditetapkan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah mencapai target yang ditetapkan

Tabel 52. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

17.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

12.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023 (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	96,95	108,93	Sangat Baik

Tabel 53. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



Keputusan penilaian sertifikasi mencakup aspek-aspek berikut ini:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
3. Izin Penerapan CPPOB untuk pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
4. Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik

5. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel early warning system)
6. Verifikasi setelah diterbitkannya Izin Penerapan CPPOB untuk pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
7. Verifikasi setelah diterbitkannya Sertifikat SMKPO (Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan) bagi sarana distribusi pangan olahan.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

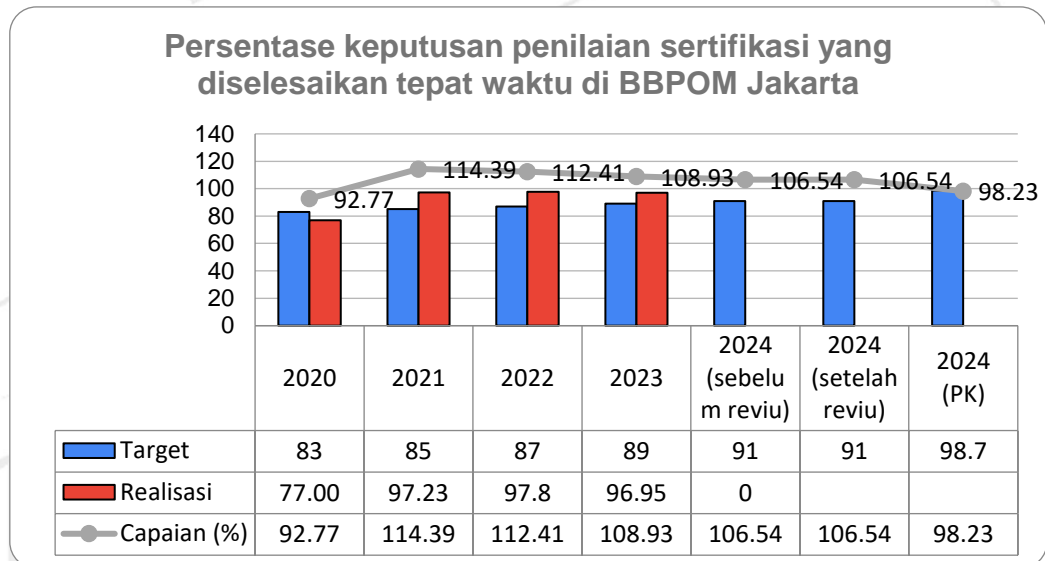
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 96,95 % dari target yang ditetapkan 89 %, jika dihitung terhadap target tahun 2023 sebesar 108,93 % dengan kriteria “ efektif”. Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tahun 2023 sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan). Sebanyak 1004 (seribu empat) merupakan keputusan dari permohonan yang diterima pada tahun 2023 dan 54 (lima puluh empat) merupakan keputusan dari permohonan tahun sebelumnya. Dari 1058 (seribu lima puluh delapan) sebanyak 1054 (seribu lima puluh empat) keputusan memenuhi timeline yang telah ditetapkan dan 4 (empat) keputusan sertifikasi tidak tepat waktu. Permohonan yang diterima tahun 2023 sejumlah 1036 (seribu tiga puluh enam). Adapun jumlah permohonan pengujian sampel ihka ketiga

tahun 2023 sebanyak 90 (sembilan puluh) dan semua diselesaikan tepat waktu.

12.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun tahun sebelumnya dan target akhir periode renstra 2020-2024

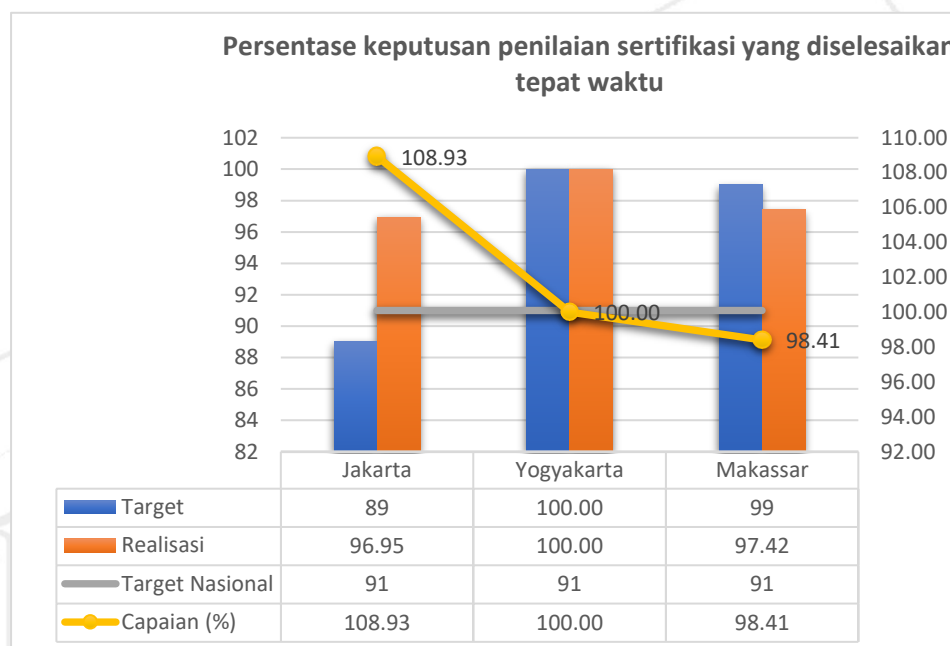


Gambar 47. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di BBPOM di Jakarta

Berdasarkan grafik di atas capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target dari 87 % menjadi 89 %. Jika melihat perbandingan realisasi tahun 2023 dan target capaian sebelum, sesudah renstra serta perjanjian kinerja tahun 2024 BBPOM di Jakarta diharapkan dapat mencapai target pada tahun 2024.

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	96.95	91	106.54%	Tercapai/Melampaui ▲
Setelah Review	96.95	91	106.54%	Tercapai/Melampaui ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	96.95	98.7	98.23%	Akan Tercapai ▲

12.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa persentase capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dan balai lain yang setara melebihi target nasional sebesar 91 %. Jika dibandingkan dengan balai lain yang setara yaitu BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Makasar maka capaian Balai Besar POM di Jakarta memiliki realisasi tertinggi dibandingkan dua balai lainnya

12.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- 1) Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai

diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

- 2) Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan banyaknya permohonan yang masuk. Namun dengan peningkatan jumlah SDM, kemampuan dan kompetensi serta inovasi yang ada pada tata laksana kegiatan sertifikasi yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dapat melebihi target yang telah ditetapkan
- 3) Adanya perubahan sistem pengajuan permohonan yang saat ini melalui Sistem OSS (Online Single Submission) yang diberlakukan sejak akhir tahun 2021 dan terkadang masih terdapat kendala, merupakan tantangan tersendiri baik bagi pelaku usaha maupun bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk memberikan pelayanan. Dengan adanya kendala pada system ini terkadang pelaku usaha mengalami kesulitan cara mengatasinya, begitu juga dengan petugas
- 4) Mulai akhir tahun 2022 berlaku peraturan untuk proses sertifikasi CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) bahwa setelah dilakukan audit hanya diberi kesempatan perbaikan sebanyak maksimal dua kali dengan tenggang waktu masing-masing 40 hari kerja yang semula hanya dibatasi selama 12 bulan semua ketidaksesuaian harus telah diselesaikan oleh pelaku usaha. Hal tersebut memerlukan usaha yang lebih baik untuk pelaku maupun petugas agar dapat menyelesaikan ketidaksesuaian sebanyak dua kali pengiriman perbaikan dengan tenggang waktu 40 hari kerja

12.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan tahun 2023 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain

1. Fasilitasi UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika dapat meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM membuat proses sertifikasi pada UMKM lebih cepat.
2. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Selain *Desk CAPA* dalam rangka pelayanan prima BBPOM di Jakarta juga menyelenggarakan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen Izin Penerapan CPPOB. Dengan diadakan pelayanan ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih paham terkait dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka penerbitan Surat Izin Penerapan CPPOB. Pelaksanaan desk CAPA dan desk CPPOB diselenggarakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan. *Desk CAPA* dan desk CPPOB tahun 2023 telah diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2023, 19 Mei 2023, dan 27 – 28 Juli 2023, 4 Oktober 2023, 20 November 2023, 1 Desember 2023, 4 Desember 2023, 6 Desember 2023 dan 22 Desember 2023 yang diselenggarakan secara luring

3. *Desk* CAPA juga diselenggarakan bagi PBF karena adanya peraturan untuk proses sertifikasi CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) bahwa setelah dilakukan audit hanya diberi kesempatan perbaikan sebanyak maksimal dua kali dengan tenggang waktu masing-masing 40 hari kerja yang semula hanya dibatasi selama 12 bulan semua ketidaksesuaian harus telah diselesaikan oleh pelaku usaha yang berlaku mulai tahun 2023. Untuk mempercepat pemenuhan penyelesaian CAPA maka BPOM di Jakarta mengupayakan dilakukan *desk* CAPA baik secara bersamaan dengan *desk* CAPA yang terjadwal ataupun dilakukan secara sendiri oleh petugas.
4. Sultan Betawi yaitu loket Balai Besar POM di Jakarta pada Mall Pelayanan Publik. Dengan hadirnya BPOM di Jakarta di Mall Pelayanan Publik, pelaku usaha yang akan berkonsultasi tidak harus ke Balai Besar POM di Jakarta
5. Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun sistem monitoring melalui *spread sheet* untuk memantau permohonan yang masuk sampai dengan diterbitkannya rekomendasi oleh Balai Besar POM di Jakarta sehingga kinerja disetiap tahapan dapat terukur.
6. Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling BPOM di Jakarta (Kerling Jakarta) yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk meningkatkan persentase proses yang tepat waktu. Adapun pelaksanaan kerling tahun 2023 telah diselenggarakan sebanyak 20 (dua puluh) kali

No	Tanggal Kegiatan	Lokasi
1	12 April 2023	UP PMPTSP Kecamatan Cempaka Putih

No	Tanggal Kegiatan	Lokasi
2	6 Mei 2023	UP PMPTSP Kecamatan Cipayung
3	10 Mei 2023	UP PMPTSP Kecamatan kramat jati
4	7 Juni 2023	UP PMPTSP Kecamatan Kelapa Gading
5	14 Juni 2023	UP PMPTSP Kecamatan Duren Sawit
6	26 Juni 2023	UP PMPTSP Kecamatan Mampang Prapatan
7	12 Juli 2023	UP PMPTSP Kecamatan Kecamatan Koja

No	Tanggal Kegiatan	Lokasi
8	24 Juli 2023	Walikota Jakarta Barat
9	25 Juli 2023	Walikota Jakarta Timur
10	1 Agustus 2023	Walikota Jakarta Selatan
11	9 Agustus 2023	UP PMPTSP Kecamatan Kecamatan Kalideres
12	18 Agustus 2023	UP PMPTSP Kecamatan Kecamatan Cilandak
13	29 Agustus 2023	UP PMPTSP Kecamatan Kecamatan Pancoran

No	Tanggal Kegiatan	Lokasi
14	31 Agustus 2023	TKK Jakarta Utara
15	7 September 2023	TKK Jakarta Pusat
16	20 September 2023	Kecamatan Kemayoran
17	21 Oktober 2023	Prasadha Jinarakkhita, Jakarta Barat
18	25 Oktober 2023	Kecamatan Tebet
19	8 November 2023	Kecamatan Pulo Gadung

<i>No</i>	<i>Tanggal Kegiatan</i>	<i>Lokasi</i>
<i>20</i>	<i>19 Desember 2023</i>	<i>Kecamatan Grogol Petamburan</i>

Tabel 54. *Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kerling Jakarta Tahun 2023*

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

- 1 Pemahaman sebagian sarana terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan
- 2 Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan awareness dari pelaku usaha.
- 3 Data perusahaan pada OSS terutama nomor telepon sering tidak dapat dihubungi sehingga menyulitkan komunikasi dalam rangka konfirmasi jadwal audit

12.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

- 1) Sebagian sarana memiliki pemahaman yang rendah terhadap persyaratan baik karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
- 2) Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan awareness dari pelaku usaha.

- 3) Data perusahaan pada OSS terutama nomor telepon sering tidak dapat dihubungi sehingga menyulitkan komunikasi dalam rangka konfirmasi jadwal audit
- 4) Beberapa kendala pada system online yang menyebabkan beberapa data hilang pada system, sehingga harus mengulang kembali proses input sampai evaluasi sampai terbit rekomendasi

12.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- 1) Akan terus dilakukan program desk CAPA maupun diskusi perbaikan dokumen persyaratan CPPOB yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA
- 2) Untuk mempercepat proses registrasi pangan olahan bagi UMKM yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun izin penerapan CPPOB maka diskusi terkait proses registrasi pangan olahan akan terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan
- 3) Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan sharing knowledge antara petugas di Kelompok subtansi Pemeriksaan dan Kelompok subtansi Infokom. Selain itu juga akan dilakukan pelatihan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan penyegaran kembali bagi petugas.
- 4) Untuk pelayanan secara cepat terhadap kebutuhan informasi dari pelaku usaha yang disampaikan melalui nomor pelayanan public akan dibuat grup chat di whatsapp antara Kelompok Subtansi Infokom dengan Kelompok Subtansi Pemeriksaan
- 5) Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka program kerling dan pelayanan di Mal Pelayanan Publik akan terus dilakukan

13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

13.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN 2023 (%)	KRITERIA
Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	73,93	113,73	Sangat Baik

***Tabel 55.** Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023*

- Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.
- Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:
 1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat
 2. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
 3. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
 4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 5. SOP Makro

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

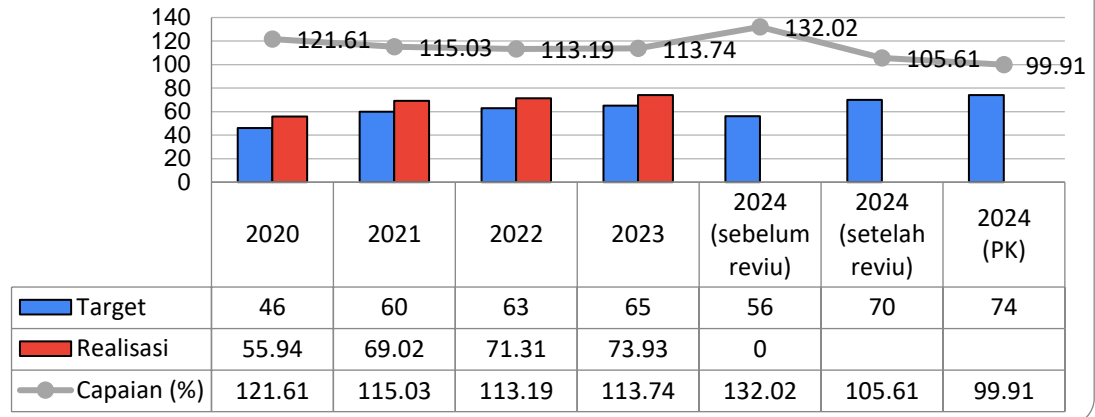
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = $258/349 \times 100\%$

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = 73,93%

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta yaitu 73,93%, melebihi target 65% dengan capaian 113,73% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

13.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di BBPOM Jakarta



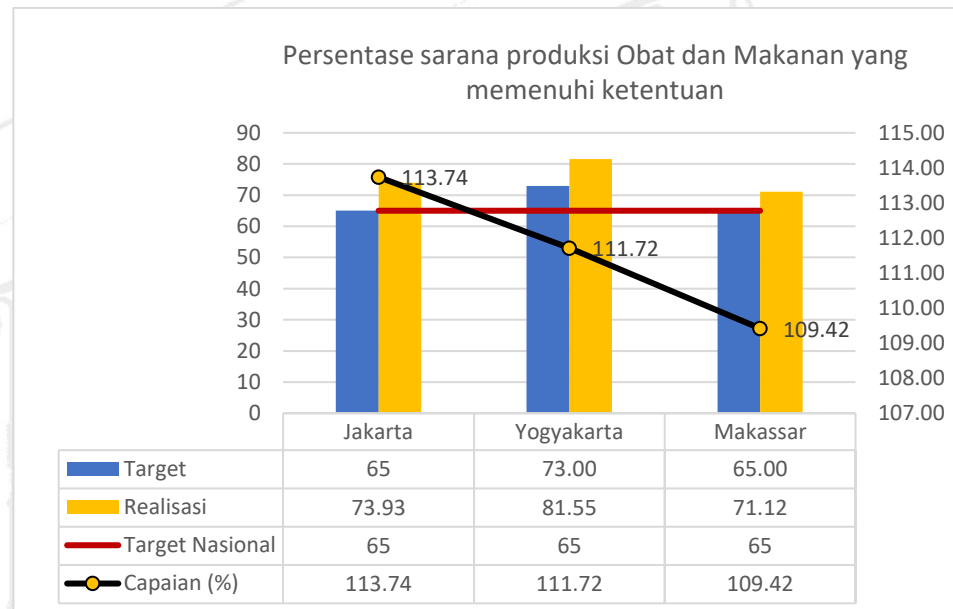
Gambar 49. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar dalam grafik. Capaian kinerja mengalami penurunan karena adanya peningkatan target dari tahun ke tahun. Realisasi selalu mencapai target sejak awal periode renstra sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan proyeksi terhadap target RPJMN 2020-2024, sebelum dan sesudah target direview dan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana table berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	73.93	56	132.02%	Tercapai/Melampaui ▲
Setelah Review	73.93	70	105.61%	Tercapai/Melampaui ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	73.93	74	99.91%	Akan Tercapai ▲

Penyesuaian target kinerja wajib dilaksanakan untuk mendapatkan target yang SMART. Terlihat apabila target tetap mengikuti sebelum Resntra, maka akan menjadi tidak dapat disimpulkan. Oleh karenanya kenaikan target sesuai perjanjian kinerja menjadi 74 merupakan target yang akan tercapai dengan meningkatkan kinerjanya secara optimal

13.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 50. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik diatas, Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan paling tinggi diraih oleh BBPOM Yogyakarta. Demikian pula dengan target yang ditetapkan, Target BBPOM Yogyakarta berada jauh diatas target nasional dan BBPOM Jakarta serta Makassar. Secara umum, BBPOM Jakarta, BBPOM Yogyakarta dan Makassar berhasil mencapai target dengan kriteria MELAMPAUI/TERCAPAI dan berada di atas target nasional sehingga berkontribusi signifikan terhadap kinerja Badan POM

13.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh berdasarkan data hasil pemeriksaan sarana produksi selama periode Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1	Industri Farmasi	28	26	2
2	Fasilitas Bahan Baku	0	0	0
3	Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	6	5	1
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	10	6	4
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	21	11	10
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	1	1
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	5	5	0
9	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
11	Industri Kosmetik	35	21	14
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0

13	Industri Pangan	156	124	32
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	86	60	26
TOTAL		349	258	91

Tabel 56. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan melebihi target karena sebagian besar sarana yang diperiksa sudah memenuhi ketentuan. Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa sebanyak 349 sarana, dengan hasil 258 sarana diantaranya Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan sarana produksi paling banyak adalah Industri Pangan dengan hasil sebanyak 79,48% (124 dari 156) memenuhi ketentuan. Sarana produksi yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan adalah Industri pangan dan IRTP. Sebagian besar IRTP yang tidak memenuhi ketentuan adalah IRTP di Kepulauan Seribu karena keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya pemahaman terhadap prinsip CPPOB. Beberapa UKOT tidak memenuhi ketentuan karena tidak memenuhi ketentuan penandaan kemasan

13.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Advokasi dengan Bupati Kepulauan Seribu tanggal 8 Agustus 2023 terkait hasil pengawasan di Kepulauan Seribu
- Bimtek Pelaku Usaha Produksi dan Distribusi Obat Tradisional tanggal 30 Oktober 2023
- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain Bimtek Peningkatan Kompetensi Petugas Inspektur Kosmetik tanggal 11 Agustus 2023

13.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	73,93	113,74%	114.967.600	114.851.529	99,90 %	1,14	0,14	Efisien

Tabel 57. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.14 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

13.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Melakukan pembinaan terhadap sarana industri pangan	Melakukan pembinaan terhadap sarana industry pangan	-	-	Persentase sarana produksi obat & makanan yang memenuhi ketentuan sudah melebihi target yang ditetapkan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan

Tabel 58. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

13.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

14. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

14.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN 2023 (%)	KRITERIA
Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	79,96	102,51	Sangat Baik

Tabel 59. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2023

- Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;
 - 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
 - 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
 - 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

- 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 6) Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

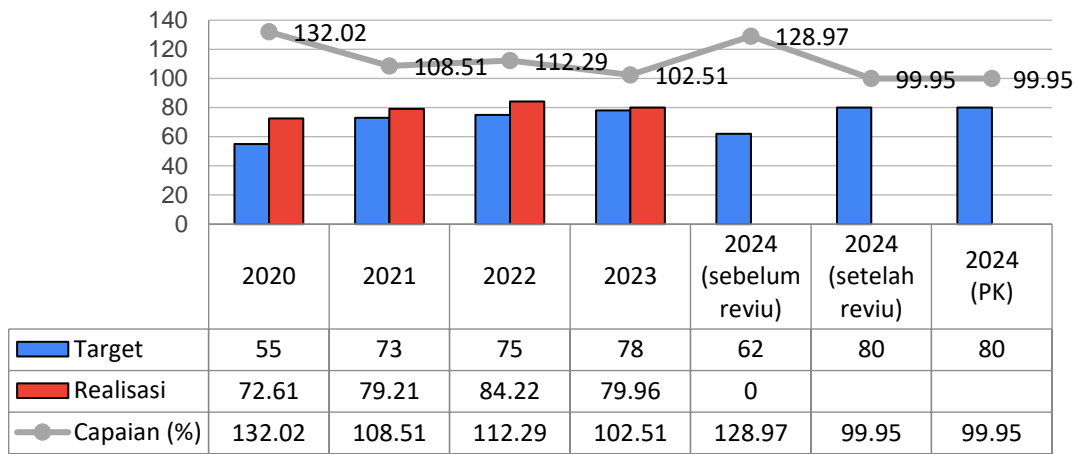
$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan = $1253/1567 \times 100\% = 79,96\%$

Realisasi Persentase Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta yaitu 79,96%, sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 78% sehingga capaian 102,51% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

14.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di BBPOM Jakarta

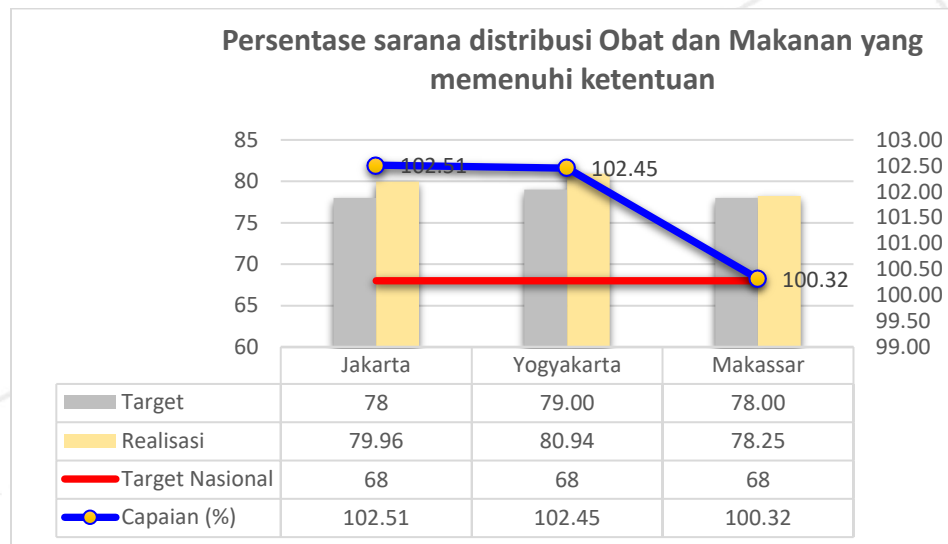


Gambar 51. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat mengalami peningkatan pada tahun 2021 sampai 2022 namun menurun pada tahun 2023. Meskipun demikian, target selalu tercapai. Berdasarkan proyeksi terhadap target RPJMN 2020-2024, sebelum target direview, yaitu 62 maka capaian 128,97, oleh karena itu target diusulkan untuk dinaikkan menjadi 80 sehingga proyeksi capaian menjadi 99,95 dan hal ini disetujui Badan POM. BBPOM Jakarta perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target tahun 2024.

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	79.96	62	128.97%	Tercapai/Melampaui ▲
Setelah Review	79.96	80	99.95%	Akan Tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	79.96	80	99.95%	Akan Tercapai ▲

14.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tertinggi dicapai oleh BBPOM Yogyakarta dengan realisasi 80,94%, diikuti oleh BBPOM di Jakarta, kemudian BBPOM Makassar. Seluruh UPT tersebut telah mencapai target masing-masing. Realisasi kinerja BBPOM Yogyakarta, BBPOM Jakarta dan BBPOM di Makassar jauh berada diatas target nasional dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja Badan POM pada indikator ini.

14.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah sebagai berikut :

SARANA DISTRIBUSI		
-------------------	--	--

NO		JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	127	96	31
2	Apotek	100	71	29
3	Toko Obat	37	19	18
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	6	6	0
5	Rumah Sakit (RS)	79	71	8
6	Puskemas	80	79	1
7	Klinik	86	62	24
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	3	3	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	229	173	56
11	Fasilitas Distribusi Suplemen	32	32	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	261	220	41
13	Klinik Kecantikan	19	11	8
14	Fasilitas Distribusi Pangan	508	410	98
TOTAL		1567	1253	314

Tabel 60. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2023 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan data tersebut, sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan cukup banyak dibandingkan jumlah sarana distribusi yang diperiksa.

Banyaknya sarana distribusi kosmetika, obat tradisional dan pangan serta apotek yang tidak memenuhi ketentuan karena peredaran pangan tanpa izin edar serta obat tradisional tanpa izin edar atau mengandung Bahan Kimia Obat pada masa-masa tertentu yang ditemukan dalam program intensifikasi pengawasan, contoh intensifikasi pengawasan pangan menjelang Lebaran, Nataru dan intensifikasi pengawasan sarana depot jamu serta kosmetika di area pasar serta klinik kecantikan. Selain itu juga terdapat program

intensifikasi pengawasan peredaran obat-obat tertentu serta pengawasan toko obat tidak berizin (warung) di Kepulauan Seribu.

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah: Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) mandatory untuk PBF, sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.

14.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	79,96	102,51 %	382.876.000	382.829.692	99,99%	1,03	0,03	Efisien

Tabel 61. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.13 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

14.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- 1) Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.
- 2) Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.
- 3) Perkuatan Sinergitas Pentahelix dalam Pencegahan dan Pengawasan Peredaran Obat Tradisional mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) pada tanggal 16 November 2023
- 4) Bimtek Pelaku Usaha Produksi dan Distribusi Obat Tradisional pada tanggal 30 Oktober 2023

14.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan pembinaan terhadap sarana Distribusi pangan, kosmetik dan saryanfar	N/A	Melakukan pembinaan terhadap sarana Distribusi pangan, kosmetik dan distribusi obat tradisional khususnya Depot Jamu	Des 2023		

Tabel 62. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

14.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

15. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta

15.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET TAHUN 2023</i>	<i>REALISASI TAHUN 2023</i>	<i>CAPAIAN TAHUN 2023 (%)</i>	<i>KATEGORI</i>
<i>Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta</i>	<i>4.55</i>	<i>4.84</i>	<i>106.37</i>	<i>Sangat baik</i>

Tabel 63. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

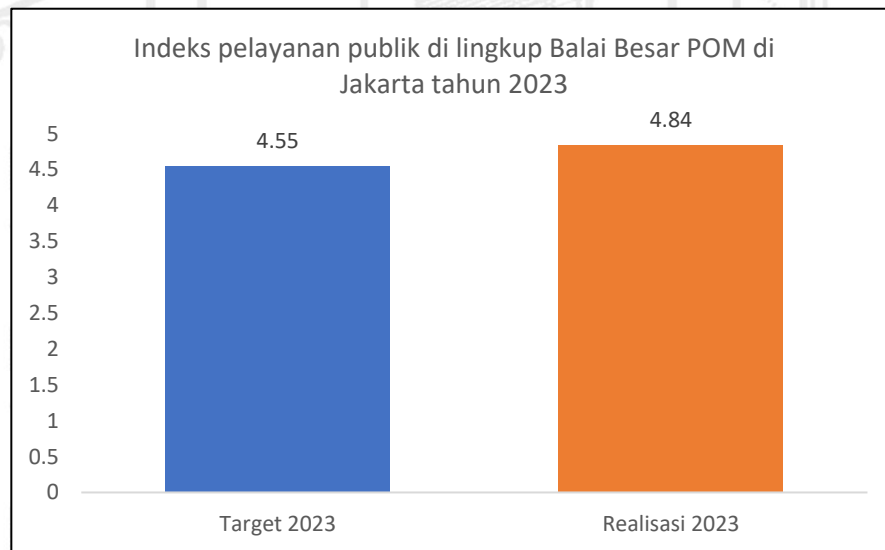
- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

<i>Range Nilai</i>	<i>Kategori</i>	<i>Makna</i>
<i>0 – 1,00</i>	<i>F</i>	<i>Gagal</i>
<i>1,01 – 1,50</i>	<i>E</i>	<i>Sangat Buruk</i>
<i>1,51 – 2,00</i>	<i>D</i>	<i>Buruk</i>
<i>2,01 – 2,50</i>	<i>C-</i>	<i>Cukup (dengan catatan)</i>
<i>2,51 – 3,00</i>	<i>C</i>	<i>Cukup</i>
<i>3,01 – 3,50</i>	<i>B-</i>	<i>Baik (dengan catatan)</i>

3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

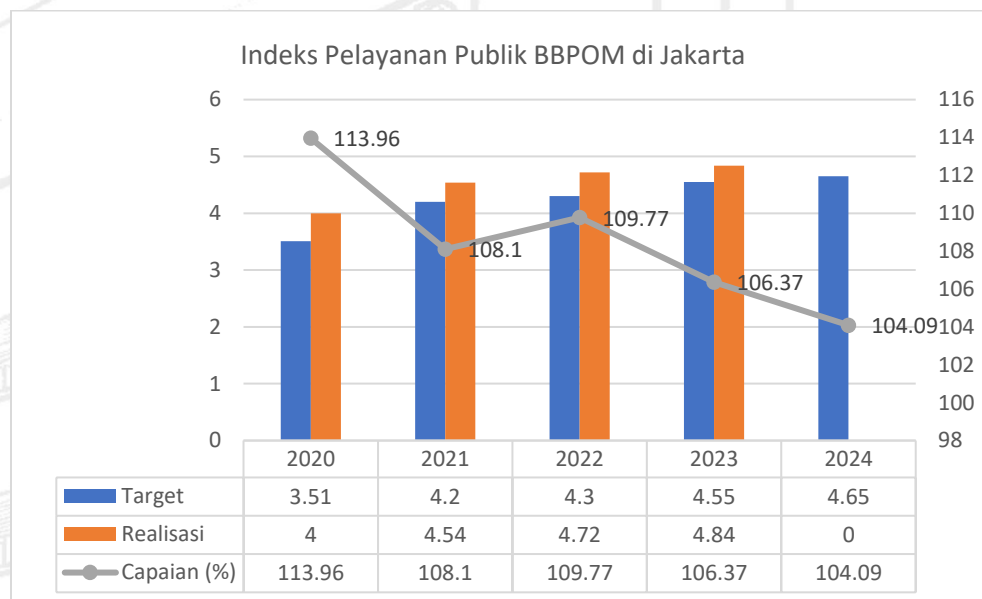
Tabel 64. Penilaian Kinerja UPP BPOM



Hasil penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM tahun 2023 menunjukkan indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2023 sebesar 4.84 (Pelayanan Prima) dengan kategori A, Pelayanan Prima. Hasil ini sudah melampaui target sebesar 4.55 dengan capaian sebesar 106.37%. Apabila dilihat dari masing-masing aspek yang dinilai meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5)

Konsultasi dan Pengaduan, serta 6) Inovasi, aspek tertinggi adalah sarana prasarana dengan nilai sebesar 5, sedangkan aspek yang masih perlu ditingkatkan yaitu aspek konsultasi dan pengaduan dengan perolehan sebesar 4.4.

15.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

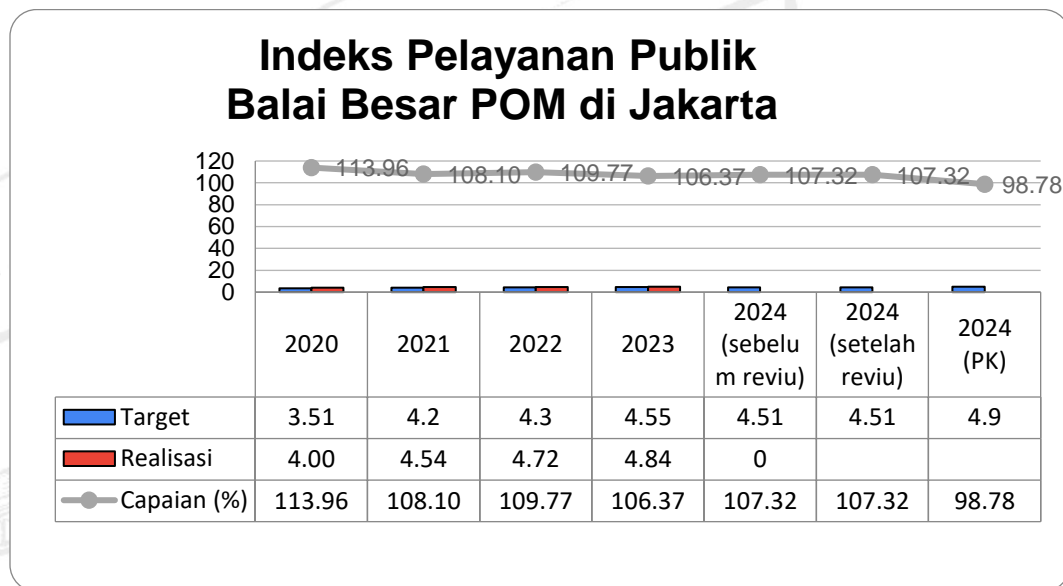


Gambar 54. Grafik Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta

Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta terus meningkat dari tahun 2020-2023 berturut-turut sebesar 4.00 pada 2020, 4.54 pada 2021, 4.72 pada 2022, dan 4.84 pada 2023.

Capaian kinerja indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta pada 2020-2023 yaitu 113.96%, 108.10%, 109.77%, dan 106.37% menandakan realisasi yang diperoleh telah melampaui target yang ditetapkan.

15.3 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 55. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023

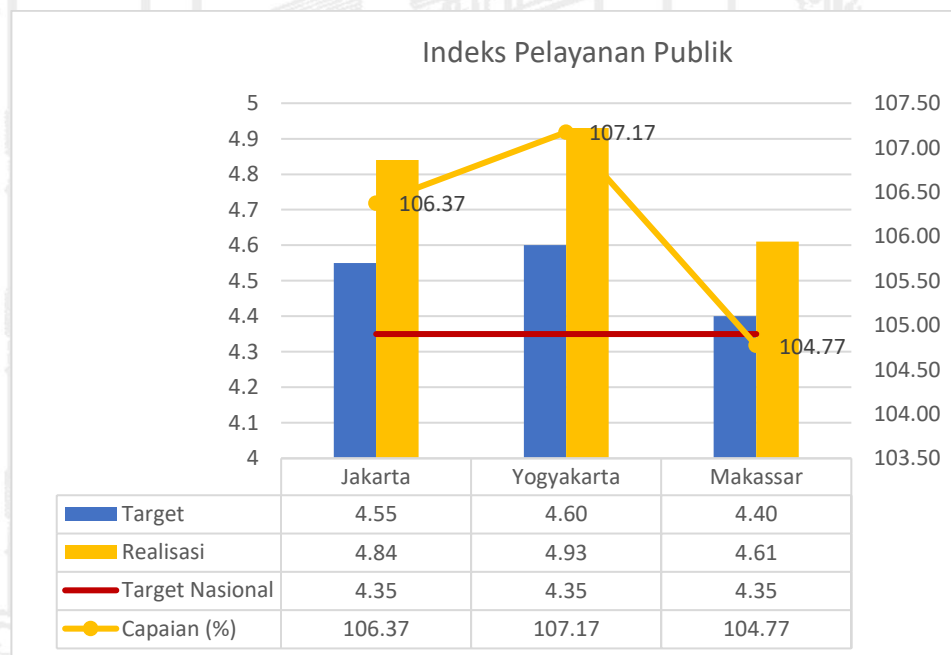
Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2023 berturut-turut sebesar 4.00, 4.54, 4.72, dan 4.84. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah periode renstra 2020-2024 dengan target 2024 sebelum revidi, setelah revidi dan target akhir PK 2024 diperoleh gambaran sesuai tabel berikut.

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	4.84	4.51	107.32%	Tercapai/Melampaui ▲
Setelah Review	4.84	4.51	107.32%	Tercapai/Melampaui ▲

Sesuai Perjanjian Kinerja	4.84	4.9	98.78%	Akan Tercapai ▲
---------------------------	------	-----	--------	--------------------

Penetapan target ini telah ideal karena mempertimbangkan capaian sebagai *baseline*. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM selalu berupaya untuk mendapatkan gambaran kinerja secara optimal. Dapat diperkirakan target PK 2024 akan tercapai pada periode akhir renstra ($70\% \leq 98.78\% < 100\%$).

15.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja unit kerja yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 56. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara

Realisasi indeks pelayanan publik BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar tahun 2023 sebesar 4.84, 4.93, dan 4.61. Dengan nilai ini, jika dibandingkan dengan target sebesar 4.55, 4.60, dan 4.40 secara berurutan, diperoleh capaian sebesar 106.37%, 107.17%, dan 104.77%. Sehingga dapat disimpulkan capaian

indeks pelayanan publik BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar tahun 2023 sudah melampaui target. Begitu pula jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 4.35, capaian-capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

15.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa faktor penyebab keberhasilan diperolehnya indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2023 antara lain:

- 1) Telah terpenuhinya seluruh indikator pada aspek sarana prasarana, yaitu kelayakan tempat parkir, taman dan penghijauan, kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan, kelayakan fasilitas toilet, tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan, sarana penunjang lainnya dan sarana front office.
- 2) Pelaksanaan penyusunan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan perwakilan masyarakat dan stakeholder (praktisi, instansi terkait, organisasi masyarakat, dan media massa).
- 3) Publikasi Standar Pelayanan telah memenuhi 6 komponen service delivery pada SIPPN Nasional, media elektronik, non elektronik, media sosial, dan subsite.
- 4) Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik baik secara elektronik dan non elektronik.
- 5) Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Publik secara mandiri dengan monitoring dan evaluasi tindak lanjut maskan dari masyarakat setiap bulan.

- 6) Telah tersedia sarana konsultasi dan pengaduan pada UPP baik secara tatap muka maupun melalui email, aplikasi percakapan, media sosial, website pengaduan mandiri dan telah terhubung dengan SP4N Lapor!.
- 7) Implementasi berbagai inovasi pelayanan publik BBPOM di Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi Whatsapp), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi Online), Laron Baja (Verifikasi Lartas Online Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), Sultan Betawi (Konsultasi Layanan Informasi Sertifikasi Bersama Balai Besar POM Wilayah DKI), Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling), dan Jak Digital (Jendela Akses Digital Data Library Balai Besar POM di Jakarta) melalui <https://bbpomjakarta.id>.

Adapun terdapat beberapa rekomendasi yang diperoleh dari hasil penilaian internal terhadap peningkatan indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta periode mendatang, antara lain:

1. Optimalisasi pemutakhiran informasi pelayanan publik pada subsite.
2. Menetapkan kebijakan penambahan waktu pelayanan di luar jam kerja dan di luar hari kerja secara rutin
3. Meningkatkan sosialisasi aplikasi SP4N Lapor kepada pengguna layanan.

15.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023:

	<i>Output</i>	<i>Input (anggaran)</i>	<i>IE</i>	<i>TE</i>	
--	---------------	-------------------------	-----------	-----------	--

<i>Indikator</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>%</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>%</i>			<i>Capaian TE</i>
<i>Indeks pelayanan publik dilingkup Balai Besar POM di Jakarta</i>	4.55	4.84	106.37	326,317,380	326,102,440	99.93%	1.06	0.06	100%

Tabel 65. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.06 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai serta implementasi berbagai inovasi pelayanan publik BBPOM di Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkup BBPOM di Jakarta.

15.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 hingga mencapai Pelayanan Prima, antara lain:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan inovasi portal Jak Digital (Jendela Akses Digital Data Library Balai Besar POM di Jakarta) melalui <https://bbpomjakarta.id> sebagai sarana penyediaan layanan publik digital.

- 2) Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik melalui Capacity Building, workshop serta bimtek terkait pelayanan publik..

15.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	<i>Optimalisasi pemutakhiran informasi pelayanan publik pada subsite</i>	<i>Pemutakhiran informasi pelayanan publik pada subsite</i>	-	-	<i>Informasi pelayanan publik sudah terpenuhi dan mutakhir pada subsite</i>	<i>Informasi pelayanan publik pada subsite lebih lengkap, mudah dijangkau, dan mutakhir.</i>



2	Meningkatkan dan mempertahankan mekanisme yang ada untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai	Implementasi sistem pemberian penghargaan pegawai sesuai SK yang telah ditetapkan.	-	-	Belum adanya sistem reward dan punishment bagi pegawai.	Implementasi penyampaian penghargaan bagi pegawai sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam SK.
---	--	--	---	---	---	---

Tabel 66. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

15.9 Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Hasil penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM tahun 2023 menunjukkan indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2023 sebesar 4.84 (Pelayanan Prima) dengan kategori A, Pelayanan Prima. Hasil ini sudah melampaui target sebesar 4.55 dengan capaian sebesar 106.37% dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan laporan kinerja ditahun selanjutnya.

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

16.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023 (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	CAPAIAN TAHUN 2023 2023 (%)	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Provinsi DKI Jakarta	79	79	100	Baik

Tabel 67. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Provinsi DKI Jakarta



Gambar 57. *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Provinsi DKI Jakarta*

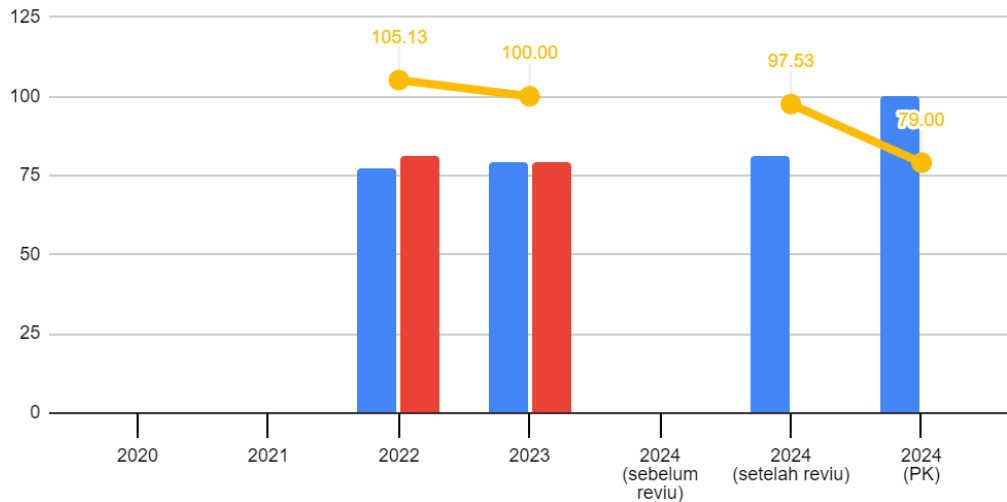
Target tahun 2023 dihitung dari rata-rata target pendampingan UMKM Obat Tradisional, UMKM Kosmetika dan UMKM pangan olahan. Adapun target realisasi pendampingan UMKM obat tradisional tahun sebesar 100 % berupa kegiatan penetapan target, bimtek, sertifikasi dan monitoring evaluasi dan pelaporan. Target realisasi pendampingan UMKM kosmetika sebesar 100 % berupa penetapan target, bimtek, dan pelaksanaan pendampingan. Target realisasi pendampingan UMKM pangan olahan sebesar 100 % berupa penetapan target, pendampingan dan penerbitan Izin Penerapan CPPOB. Sehingga jika rata-rata dari ketiga jenis sarana maka target tahun 2023 adalah sebesar 100 %

Realisasi juga diperhitungkan dari rata-rata masing-masing capaian pendampingan masing-masing sarana. Tahun untuk UMKM untuk semua tahapan yaitu penetapan target, bimtek, pendampingan, pelaporan dan monitoring evaluasi.

16.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan periode akhir RPJMN pada target sebelum dan sesudah Renstra serta perjanjian kinerja Tahun 2024 terlihat pada Gambar 58.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau per OT dan kosmetik yang baik



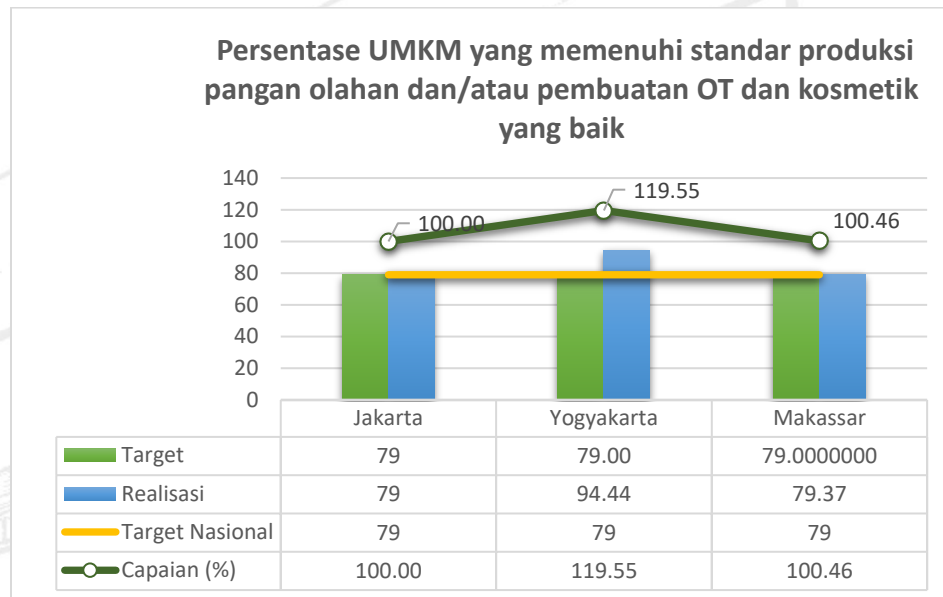
Gambar 58. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik

Jika dilihat pada gambar di atas capaian dan realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik melampaui target nasional dan pada tahun 2024 BBPOM di Jakarta dapat mencapai target. Indikator ini baru dimulai tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian atau realisasi tahun sebelumnya. Sedangkan perkiraan capaian target dijabarkan pada tabel berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	79	-	-	-
Setelah Review	79	81	97.53%	Akan Tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	79	100	79%	Akan Tercapai ▲

Mengingat target yang cukup tinggi pada Tahun 2024, kategori capaian adalah akan tercapai. BBPOM di Jakarta perlu menyiapkan strategi terbaik diantaranya perkuatan koordinasi lintas sektor untuk dapat melampaui target.

16.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 59. *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik*

Berdasarkan Gambar 59, dapat dilihat bahwa indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik untuk ketiga balai yang setara memenuhi target dan realisasi BBPOM di Yogyakarta paling tinggi.

16.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- 1) Dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19 di mana pemerintah telah melakukan pelonggaraan terhadap kegiatan masyarakat maka tahun 2023 visitasi terhadap calon UMKM yang akan diikuti sertakan pada program fasilitasi terlebih dahulu dapat dilakukan untuk pemastian sarana dan prasarana sebelum dilakukan penetapan UMKM yang akan ikut program fasilitasi

- 2) Pelatihan bagi fasilitator Balai Besar POM di Jakarta yang tidak tepat waktu oleh Pusat sehingga waktu pelaksanaan Bimtek di Balai bagi pelaku usaha mengalami penundaan waktu
- 3) Bimbingan teknis bagi pelaku usaha peserta fasilitasi yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan pelaku usaha dapat segera mendapatkan sertifikat untuk fasilitas produksi yang pada akhirnya segera mendapatkan nomor izin edar untuk produk
- 4) Terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta. Pada tahun 2023 BBPOM di Jakarta melakukan kolaborasi untuk fasilitasi UMKM pangan olahan dengan Dinas PPKUKM dengan melibatkan para pendamping dari Dinas PPKUKM yang telah dilatih pada tahun sebelumnya.

16.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- 1) Melakukan percepatan visitasi dan penggalangan komitmen bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada tahun 2023, sehingga diharapkan program fasilitasi dapat dimulai lebih awal.
- 2) Melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada fasilitasi tahun 2023 baik UMKM yang akan didampingi secara langsung oleh BBPOM di Jakarta dengan dibantu oleh fasilitator eksternal, maupun yang akan didampingi oleh pendamping dari Dinas PPKUKM. Bimtek untuk pelaku usaha pangan olahan yang akan didampingi langsung oleh BBPOM di Jakarta telah diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2023 untuk bimtek tahap satu, sedangkan bimtek tahap dua diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2023. Bimtek bagi pelaku usaha pangan olahan yang akan didampingi oleh pendamping dari Dinas PPKUKM telah diselenggarakan di wilayah Jakarta Timur pada tanggal 20, 21 dan 24 Maret 2023 serta di wilayah Jakarta Barat pada tanggal 5, 6 dan 7 Juni 2023, di wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 26 – 27 Juni

2023, di wilayah Jakarta Utara pada tanggal 22-24 Agustus 2023 , di wilayah Jakarta Pusat 2 – 4 Agustus 2023 untuk bimtek tahap satu, sedangkan bimtek tahap dua di wilayah Jakarta Timur diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 Juni 2023, di wilayah Jakarta Barat diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2023 dan 1 Agustus 2023, di wilayah Jakarta Selatan diselenggarakan pada tanggal 1 dan 11 Juli 2023, di wilayah Jakarta Pusat diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2023 dan wilayah Jakarta Utara diselenggarakan pada tanggal 11 dan 12 September 2023. Sedangkan bimtek untuk pelaku usaha di bidang kosmetik diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2022 dan bimtek untuk pelaku usaha di bidang obat tradisional diselenggarakan pada tanggal 5 dan 6 April 2023 serta bimtek dan desk registrasi pelaku usaha di bidang obat tradisional diselenggarakan tanggal 21 September 2023. Dengan adanya bimtek tersebut diharapkan pelaku usaha lebih memahami pentingnya dan cara melakukan produksi yang baik dan memiliki komitmen untuk melakukan produksi dengan cara yang baik secara konsisten

- 3) Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD). Dengan adanya program kolaborasi tersebut diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan berusaha dan perizinan. Pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha produsen pangan olahan berskala mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin edar.

16.6 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

1. Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Dinas PPKUM melakukan visitasi luring untuk melakukan seleksi terhadap pelaku usaha yang memungkinkan untuk difasilitasi dalam waktu dekat.

Visitasi bertujuan untuk melihat kesiapan pelaku usaha dalam mempersiapkan tempat produksi sehingga diharapkan fasilitasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran

2. Balai Besar POM di Jakarta mengadakan pelatihan fasilitator UMKM yang berasal dari personil Jakpener dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam membantu pelaku usaha dalam menerapkan sistem CPPOB sehingga pelaku usaha dapat segera memperoleh izin penerapan CPPOB sebagai persyaratan pembuatan akun perusahaan pada system sertifikasi produk pangan Badan POM.

16.7 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian IKU yang telah memenuhi target pada Tahun 2023 menjadi *baseline* untuk menetapkan Langkah tindak lanjut untuk dapat meningkatkan capaian seiring target yang akan meningkat pada Tahun 2024.

3.7. SASARAN STRATEGIS V

Capaian sasaran strategis V, yaitu meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

17.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di	95.8	95.86	100.06	Sangat baik

Tabel 68. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

<i>wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</i>				
---	--	--	--	--

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1. KIE melalui media cetak dan elektronik;
2. KIE langsung ke masyarakat; dan
3. KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; dan
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

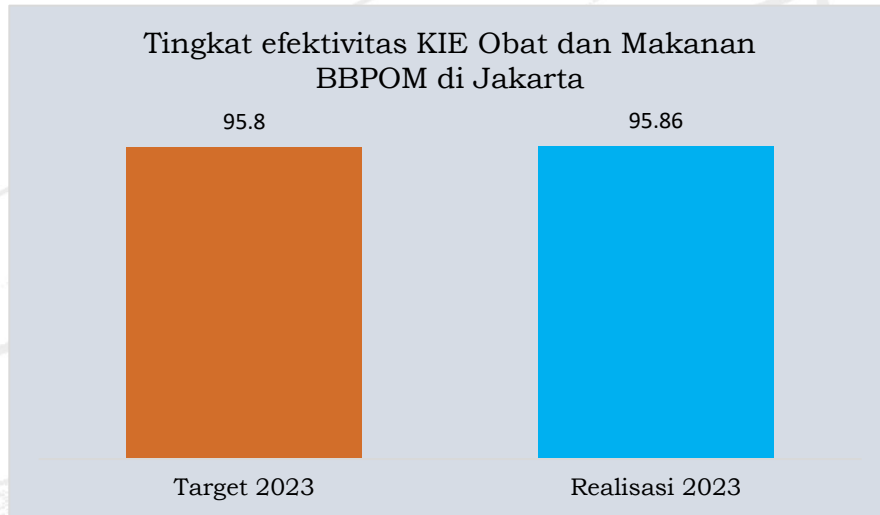
Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

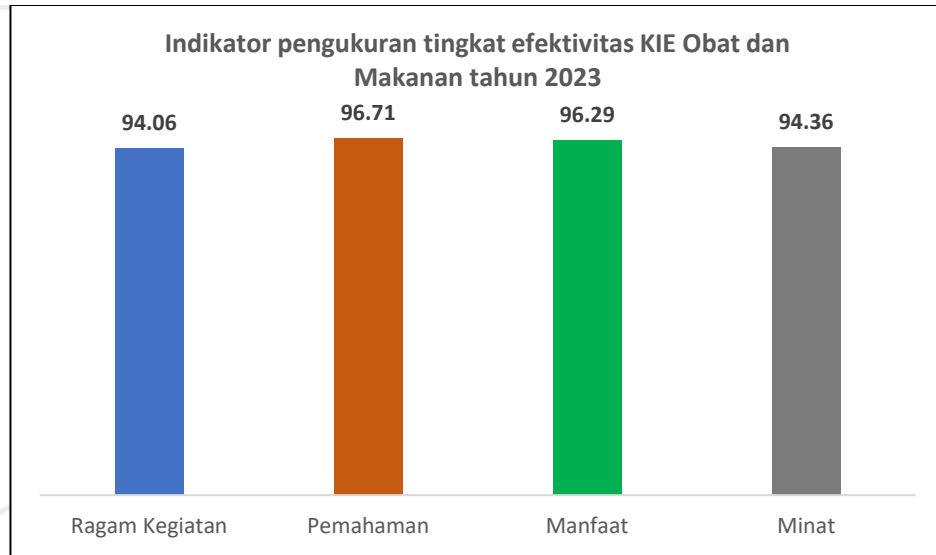
<i>Skor Indeks</i>	<i>Interpretasi Efektivitas</i>
<i>100</i>	
<i><65,00</i>	<i>Kurang Efektif</i>

65,01-75,00	<i>Cukup Efektif</i>
75,01-85,00	<i>Efektif</i>
85,01-95,00	<i>Sangat Efektif</i>
95,01-100	<i>Sangat Efektif Sekali</i>

Tabel 69. Pengukuran tingkat efektivitas KIE



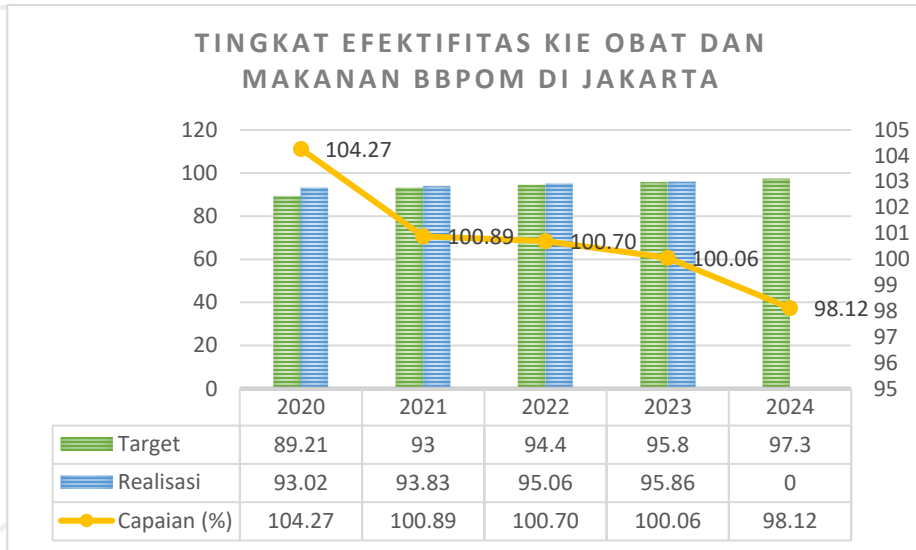
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 95.86 (Sangat Efektif Sekali) dan telah melampaui target tahun 2023 sebesar 95,8 dengan capaian sebesar 100,06%, kriteria Tercapai/Melampaui. Nilai ini diperoleh dari 452 responden suvei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan pada periode triwulan I-IV tahun 2023.



Gambar 61. Indikator pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023

Apabila dilihat dari masing-masing indikator pengukuran, diperoleh hasil indikator pemahaman memiliki indeks tertinggi sebesar 96.71 kemudian diikuti indeks manfaat sebesar 96.29, kemudian minat sebesar 94.36, dan ragam kegiatan sebesar 94.06. Nilai indikator pemahaman yang tinggi menandakan tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima dari kegiatan KIE Obat dan Makanan BPOM di Jakarta sudah baik.

17.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

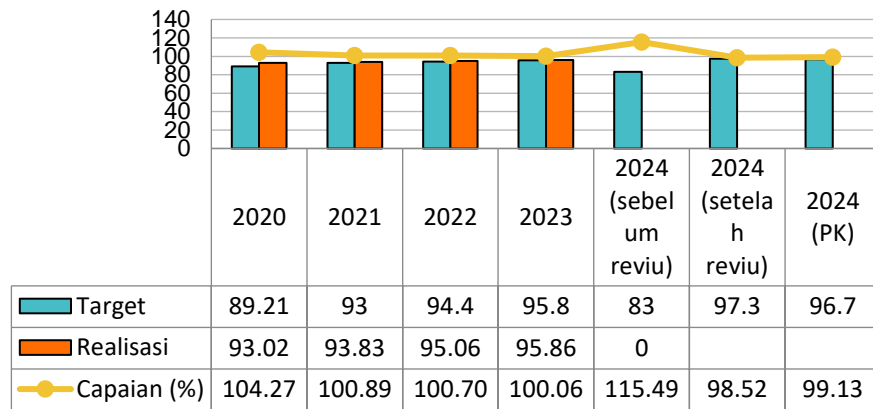


Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020-2023 yaitu sebesar 93.02 pada tahun 2020, 93.83 pada tahun 2021, 95.06 pada tahun 2022 serta 95.86 pada tahun 2023.

Capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2020-2023 secara berturut-turut sebesar 104.27%, 100.89%, 100.70%, dan 100.06% sehingga dapat disimpulkan capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan.

17.3. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM DI JAKARTA

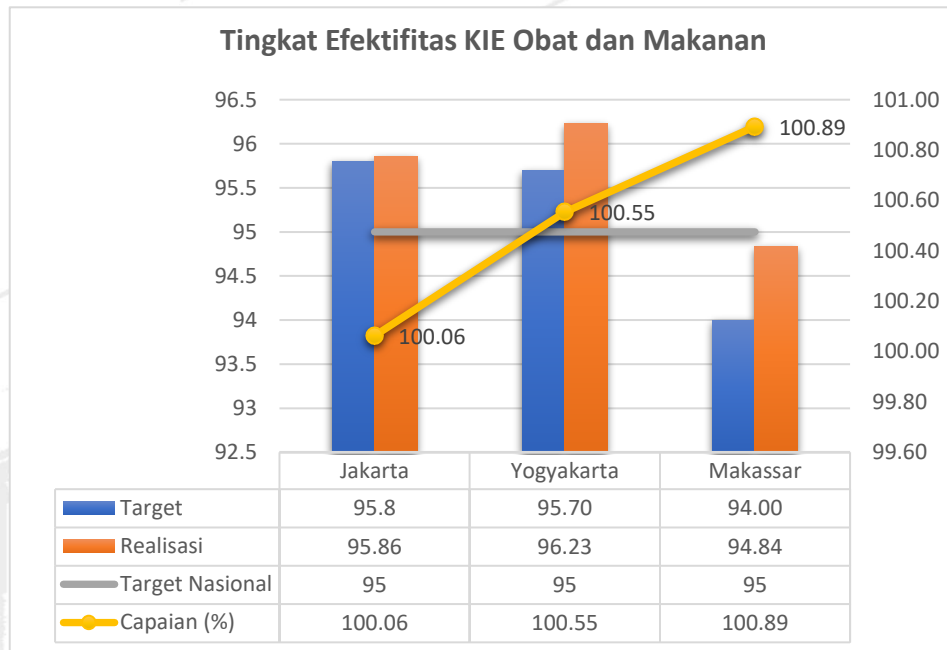


Gambar 63. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2020-2023 berturut-turut sebesar 93.02, 93.83, 95.06, dan 95.86. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah periode renstra 2020-2024, sebelum revidu sebesar 83 dan setelah revidu sebesar 97.3, diperoleh capaian sebesar 115,49% dan 98,52%. Target akhir sesuai PK 2024 ialah sebesar 96.7, maka realisasi sampai dengan tahun 2023 dapat dihitung capaiannya sebesar 99.13%. Dengan capaian ini, dapat diperkirakan bahwa target PK 2024 dapat dicapai pada periode akhir renstra ($70\% \leq 99.13\% < 100\%$). Gambaran detail perbandingan terlampir pada table berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	95.86	83	115.49%	Tercapai/Melampaui ▲
Setelah Review	95.86	97.3	98.52%	Akan Tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	95.86	96.7	99.13%	Akan Tercapai ▲

17.4. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis setara dan target nasional



Realisasi nilai Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar tahun 2023 secara berturut-turut diperoleh sebesar 95.86, 96.23, dan 94.84. Apabila dibandingkan dengan target masing-masing sebesar 95.8, 95.70, dan 94, maka diperoleh capaian sebesar 100.06%, 100.55%, dan 100.89%. Dengan capaian ini maka nilai tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar tahun 2023 seluruhnya telah melampaui target yang telah ditetapkan. Target secara nasional untuk tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 sebesar 95. Jika dibandingkan dengan nilai ini, capaian oleh BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta yang telah melampaui target secara nasional.

17.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Jakarta tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya kegiatan KIE berupa Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat Komisi IX DPR RI, secara tatap muka sebanyak 50 titik di Wilayah DKI Jakarta dengan total peserta sebanyak 25000 orang, KIE melalui Operasional Mobil Laboratorium Keliling, dan KIE masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan di Kepulauan Seribu, serta Bimtek Kader Pramuka Jakarta Sadar Obat dan Makanan Aman
- 2) Narasumber BPOM di Jakarta pada berbagai kegiatan dengan stakeholder, misalnya Penyuluhan Keamanan Pangan bertujuan memberikan bimbingan teknis mengenai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), keamanan pangan, label pangan kepada pelaku usaha pangan dan masyarakat, Bahan Tambah Pangan, Peraturan perundang-undangan di bidang Pangan.
- 3) Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan KIE mengenai program prioritas keamanan pangan melalui program PJAS aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, khususnya dalam pembentukan dan pemberdayaan kader keamanan pangan di sekolah, desa, dan pasar di wilayah intervensi Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 4) Terselenggaranya penyebaran informasi terkait Kosmetik Aman bersama dengan Duta Kosmetik Aman Provinsi DKI Jakarta melalui media radio.
- 5) Terselenggaranya kegiatan KIE Obat dan Makanan melalui kegiatan Pameran Jakarta Fair tahun 2023 pada 14 Juni-16 Juli 2023

sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terkait Obat dan Makanan melalui anjungan BBPOM di Jakarta yang menyediakan berbagai informasi berupa media televisi berisi iklan layanan informasi Obat dan Makanan, pajangan contoh produk Obat dan Makanan berizin edar BPOM, leaflet-leaflet informasi, brosur pelayanan publik, e-book sertifikasi Obat dan Makanan, contoh 4 bahan berbahaya pada pangan (Boraks, Formalin, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow), link integrasi informasi dan pelayanan publik BBPOM di Jakarta melalui <https://s.id/garasi-jakarta>.

- 6) Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan penggunaan identitas KIE kataBPOM pada kegiatan KIE Obat dan Makanan dengan tagline “bukan kata orang pastikan kataBPOM” sehingga KIE dapat lebih diingat oleh Masyarakat dengan ciri khas tersebut.

Untuk menyempurnakan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilakukan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kolaborasi pentaheliks dengan stakeholder kunci untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait pengembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami, dan menarik minat Masyarakat.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan media sosial dengan baik sebagai media KIE termasuk mengenali karakter/ algoritma dari setiap platform media sosial untuk penyesuaian konten sesuai dengan target.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Kader Keamanan Pangan dan Kader Pramuka Jakarta Sadar Obat dan Makanan atau SAKA POM sebagai kepanjangan tangan BBPOM di Jakarta dalam melakukan KIE Obat dan Makanan kepada Masyarakat.

17.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kegiatan

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ini antara lain:

1. Metode KIE secara tatap muka yang dinilai efektif dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan secara langsung kepada masyarakat serta meningkatkan pula keterlibatan dan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Pembentukan kader keamanan pangan di sekolah, desa/kelurahan, dan pasar intervensi dan kader pramuka Jakarta sadar Obat dan Makanan Aman/ SAKA POM sebagai kepanjangan tangan dari BPOM dalam melakukan KIE kepada komunitasnya.
3. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan reels melalui implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, dan Twitter) serta Kosidah Jakarta (Kilas Informasi Berfaedah BBPOM di Jakarta) yang berisi tips-tips praktis Obat dan Makanan.
4. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui layanan ULPK, media sosial SMS Blast, iklan layanan Masyarakat melalui media radio, dan videotron.
5. Adanya upaya penganeekaragaman KIE dan publikasi informasi melalui kuis pada media sosial yang dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan pemahaman dan minat akan informasi yang telah disosialisasikan.

17.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif diwilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	95.8	95.86	100.06	7,345,813,000	7,342,049,750	99.95 %	1.00 1	0.00 1	100%

Tabel 70. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif diwilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.001 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung sarana penyebaran informasi dan KIE Obat dan Makanan yang optimal serta sumber daya manusia yang memadai di bidang komunikasi dan

informasi Obat dan Makanan dalam rangka meningkatkan efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

17.8. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	<i>Optimalisasi pemanfaatan media digital dalam pemberian informasi dan KIE Obat dan Makanan</i>	<i>Memanfaatkan media radio untuk melaksanakan KIE melalui talkshow dan iklan</i>	-	-	<i>Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media sosial hanya berupa infografis</i>	<i>Optimalisasi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media elektronik dan media sosial menjadi</i>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		<i>layanan masyarakat</i>			<i>(dua dimensi).</i>	<i>infografis, video (reels) yang memiliki reach dan view lebih tinggi, sehingga mampu lebih menjangkau Masyarakat.</i>
2	<i>Optimalisasi pemanfaatan Kader Keamanan Pangan dan Kader Pramuka Sadar Obat</i>	<i>Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan dengan berkolaborasi dengan Kader</i>	<i>-</i>		<i>Belum melibatkan kader-kader dalam melaksanakan amplifikasi KIE Obat</i>	<i>Melakukan intensifikasi peran kader sebagai kepanjangan tangan BPOM dalam melaksanakan</i>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline
	<i>dan Makanan sebagai kepanjangan tangan BBPOM di Jakarta dalam melakukan KIE Obat dan Makanan kepada Masyarakat</i>	<i>Pramuka Sadar Obat dan Makanan di 5 wilayah kota administrasi Jakarta</i>			<i>dan Makanan n KIE Obat dan Makanan langsung kepada masyarakat</i>	

Tabel 71. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

17.9. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi

pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder termasuk masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 95.86 (Sangat Efektif Sekali) dan telah melampaui target tahun 2023 sebesar 95,8 dengan capaian sebesar 100,06%, kriteria Tercapai/Melampaui. Capaian ini dapat dijadikan pedoman dalam menyusun laporan kinerja dimasa yang akan datang.

18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

18.1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
<i>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</i>	90	90	100.00	Baik

Tabel 72. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Adapun kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; dan
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS aman seperti dijelaskan di atas. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan sebagai berikut:

<i>No</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Skor</i>	<i>Target Pelaksanaan</i>
-----------	-----------------	-------------	---------------------------

1	<i>Advokasi Lintas Sektor PJAS</i>	20%	<i>Januari-April (TW 1-TW 2)</i>
2	<i>Sosialisasi Keamanan Pangan</i>	10%	<i>Maret-April (TW 1-TW 2)</i>
3	<i>Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah</i>	15%	<i>April-Juni (TW 1-TW 2)</i>
4	<i>Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan</i>	10%	<i>April-November (TW 2-TW 4)</i>
5	<i>Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%)</i> - <i>Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%)</i> 	15%	<i>Juli-September (TW 3-TW 4)</i>
6	<i>Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman</i>	20%	<i>Agustus-November (TW 4)</i>
7	<i>Pengawasan</i>	10%	<i>Oktober-Desember (TW 4)</i>

<i>Total Skor</i>	<i>100%</i>
-------------------	-------------

Tabel 73. Realisasi Kegiatan Terkait PJAS Tahun 2023

Realisasi progress tahapan intervensi keamanan PJAS tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi PJAS dan mencapai target intervensi terhadap 90 sekolah (25 sekolah intervensi baru dan 65 sekolah dalam rangka pengawalan intervensi tahun 2020-2022). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi keamanan PJAS sebesar 100% telah mencapai target tahun 2023, 90 sekolah dan progress tahapan 100% dengan capaian 100,00% (Tercapai/ melampaui).

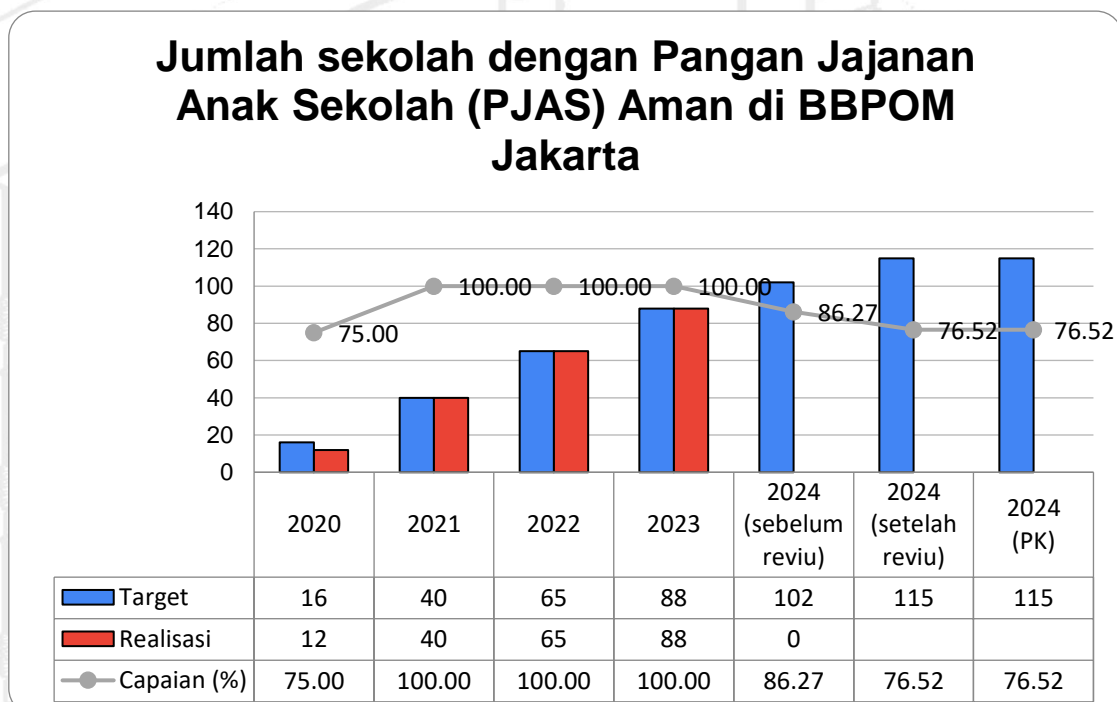
17.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya



Target jumlah Sekolah dengan PJAS aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 ialah sebanyak 115 sekolah. Pada tahun 2020, capaian sekolah dengan PJAS aman ialah sebanyak 12 sekolah, kemudian mengalami penambahan jumlah sekolah pada tahun 2021 sebanyak 28 sekolah sehingga total 40 sekolah pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi sekolah dengan PJAS aman terhadap 25 sekolah lainnya sehingga total pada 2022 ialah 65 sekolah.

Kemudian pada tahun 2023 dilakukan intervensi terhadap 25 sekolah dengan total sebanyak 90 sekolah. Realisasi ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% pada 2020-2023.

17.3 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2019-2021 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



Gambar 65. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM Jakarta

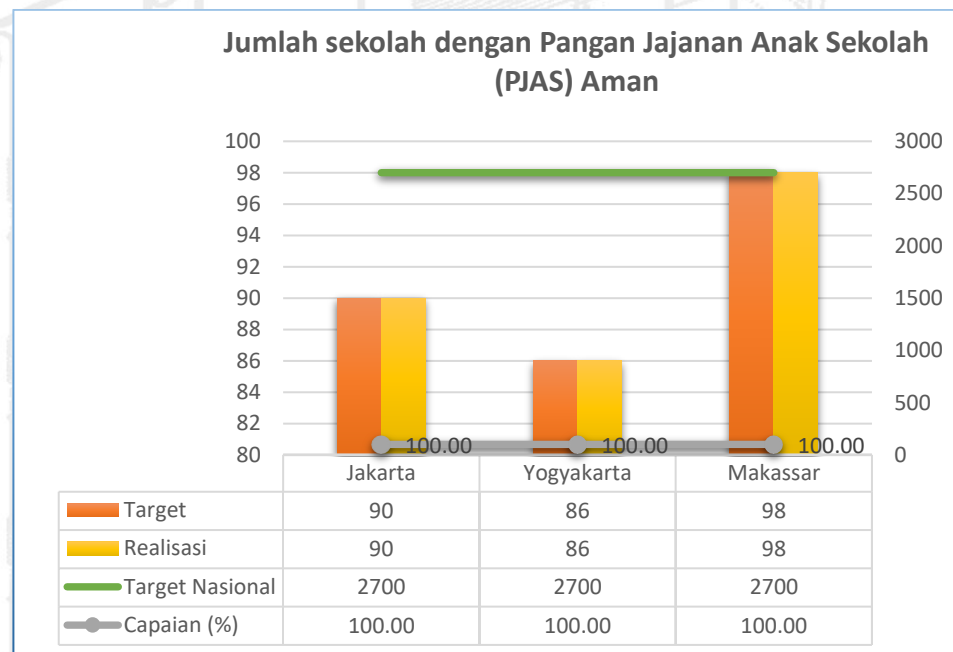
Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan dengan target jangka menengah periode renstra 2020-2024 sebesar 102 sekolah sebelum reviu, setelah reviu dan target PK tersaji pada table berikut

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	88	102	86.27%	Akan Tercapai ▲

Setelah Review	88	115	76.52%	Akan Tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	88	115	7.52%	Akan Tercapai ▲

Jumlah sekolah intervensi ini bersifat akumulatif, dengan target intervensi tahun 2024 sebanyak 25 sekolah, maka akan dicapai target intervensi sebanyak 115 sekolah di akhir periode.

17.4 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan balai lain yang sejenis/setara dan target nasional



Realisasi jumlah jumlah sekolah dengan PJAS aman oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar tahun 2023 secara berturut-turut adalah 90 sekolah, 86 sekolah, dan 98 sekolah. Realisasi jumlah sekolah intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00%. Program intervensi

sekolah dengan PJAS aman di 34 provinsi memiliki target jumlah sekolah tahun 2023 secara nasional sebanyak 2700.

17.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	90	90	100.00	703,121,000	702,48,9213	99.91 %	1.001	0.001	100%

Tabel 75. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.001 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat

disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung terbentuknya forum komunikasi terhadap sekolah-sekolah intervensi serta peningkatan koordinasi yang dilakukan secara kontinu dengan pemerintah daerah kota Administrasi Jakarta Utara, OPD terkait dalam rangka mencapai target intervensi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

17.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sebagai mitigasi risiko pencapaian kinerja di periode mendatang, telah dilakukan upaya peningkatan koordinasi melalui kegiatan Audiensi serta Advokasi dengan lintas sektor terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara serta Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara serta telah dibentuk forum komunikasi dengan sekolah-sekolah intervensi untuk memudahkan dalam koordinasi terkait pelaksanaan program.

17.7 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

<i>N o</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Tindak Lanjut</i>	
		<i>Selesai</i>	<i>Belum</i>

			Rencana Aksi	Timelin e
1	<i>Dilakukan koordinasi mengenai kegiatan pengawalan melalui Whatsapp group sehingga sekolah dapat mempersiapkan waktu dan pelaksanaan dapat sesuai perencanaan</i>	<i>Telah dilakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah intervensi tahun 2020-2021 dan pengawalan melalui mobil laboratorium keliling sesuai perencanaan.</i>		

Tabel 76. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

17.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait jumlah sekolah dengan PJAS aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk

dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder terkait termasuk komunitas sekolah sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi PJAS dan mencapai target intervensi terhadap 90 sekolah (25 sekolah intervensi baru dan 65 sekolah dalam rangka pengawalan intervensi tahun 2020-2022). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi keamanan PJAS sebesar 100% telah mencapai target tahun 2023, 90 sekolah dan progress tahapan 100% dengan capaian 100,00% (Tercapai/ melampaui). Hasil tersebut dapat dijadikan gambaran dalam penyusunan laporan kinerja tahun selanjutnya.

19. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

18.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	28	28	100.00	Baik

Tabel 77. Realisasi desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang menjadi sasaran intervensi dapat terdiri dari desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria sebagai berikut:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa; dan
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi tahun 2023 di wilayah Provinsi DKI Jakarta ialah 28 kelurahan yang meliputi 7 kelurahan intervensi baru dan 21 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020-2022.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah desa/kelurahan baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan sebagai berikut:

<i>No</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Skor</i>	<i>Target Pelaksanaan</i>
<i>1</i>	<i>Advokasi Kelembagaan Desa</i>	<i>20%</i>	<i>Januari-April</i>

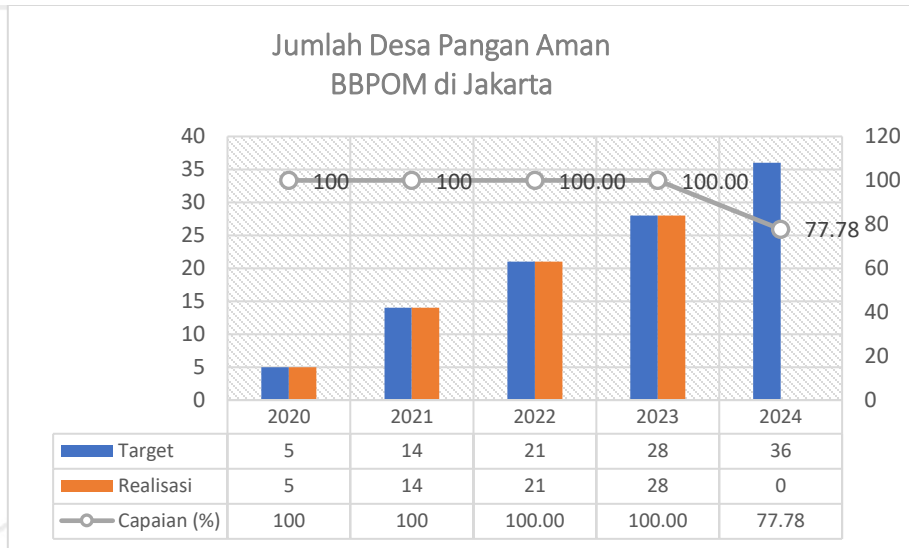
No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
			<i>(TW 1-TW 2)</i>
2	<i>Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test, dll.</i>	5%	<i>Januari-April (TW 1-TW 2)</i>
3	<i>Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)</i>	15%	<i>April-Juli (TW 2-TW 3)</i>
4	<i>Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas</i>	15%	<i>Mei-September (TW 2-TW 3)</i>
5	<i>Fasilitasi Keamanan Pangan</i>	10%	<i>Juni-september (TW 2-TW 3)</i>
6	<i>Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan</i>	10%	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pre Intervensi: Mei-September (dapat dilakukan bersamaan dengan bimtek komunitas)</i> - <i>Post Intervensi: September-Oktober (dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data/ survei post intervensi)</i>

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
7	<p><i>Monitoring dan Evaluasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Survei post intervensi untuk kader dan komunitas</i> • <i>Pertemuan lintas sektor</i> 	10%	<ul style="list-style-type: none"> • <i>September-Oktober</i> • <i>November-Desember</i>
8	<i>Lomba Desa Pangan Aman</i>	5%	<i>Desember</i>
9	<i>Pengawasan</i>	10%	<i>Juni-Desember (TW 2-TW 4)</i>
<i>Total Skor</i>		100%	

Tabel 78. *Realisasi Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2023*

Realisasi jumlah Desa/Kelurahan Pangan Aman tahun 2023 ialah 28 kelurahan dengan rincian 7 kelurahan intervensi tahun 2023 dan 21 kelurahan intervensi tahun 2020-2022 dalam rangka pengawasan. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa/Kelurahan Pangan Aman telah mencapai target yaitu 28 desa dengan dengan capaian 100% (Tercapai/ melampaui).

18.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

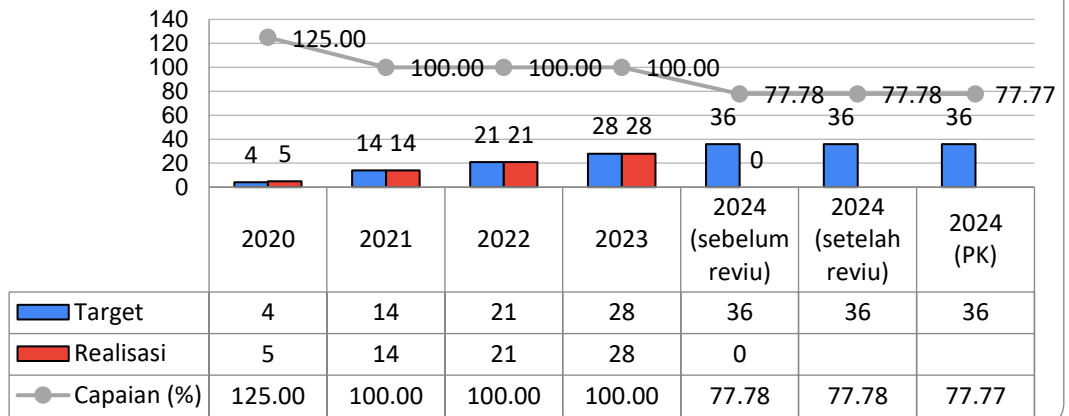


Gambar 67. Grafik Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Jakarta

Target jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 ialah sebanyak 36 desa/kelurahan. Pada tahun 2020, capaian Desa Pangan Aman ialah sebanyak 5 desa/kelurahan, kemudian mengalami penambahan jumlah Desa pada tahun 2021 sebanyak 9 desa sehingga total 14 desa/kelurahan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi Desa Pangan Aman terhadap 7 desa/kelurahan lainnya sehingga total pada 2022 ialah 21 kelurahan. Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan intervensi terhadap 7 kelurahan, sehingga total desa/ kelurahan intervensi ialah 28. Realisasi ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100.00% pada 2020-2023.

18.3 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Jakarta



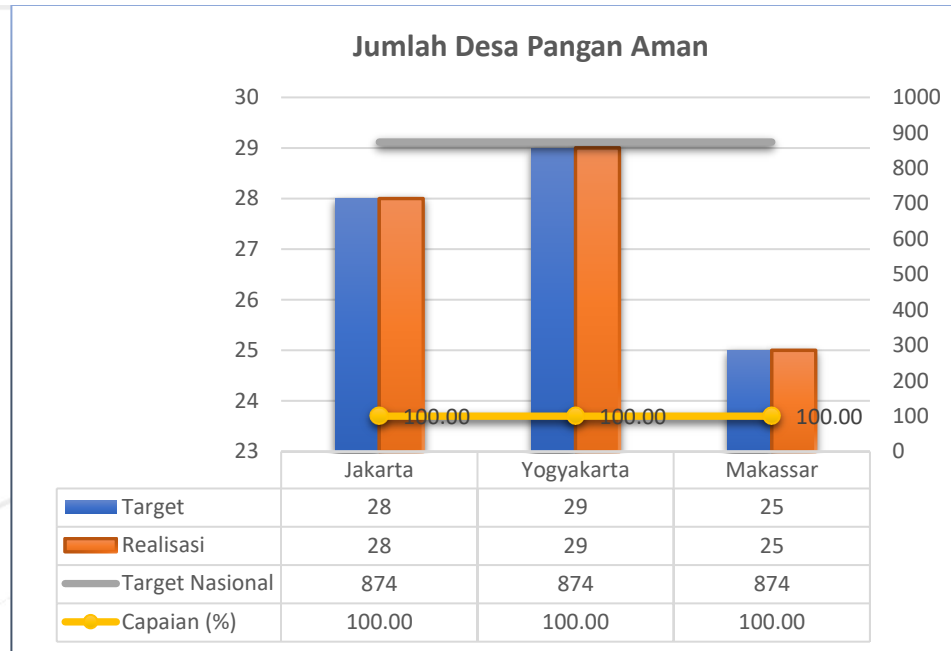
Gambar 68. Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 dan 2022

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target jangka menengah periode sebelum dan sesudah review renstra 2020-2024 dan PK 2024 sebagai berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	28	36	86.27%	Akan Tercapai ▲
Setelah Review	28	36	76.52%	Akan Tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	28	36	7.52%	Akan Tercapai ▲

Jumlah desa/ kelurahan intervensi ini bersifat akumulatif, dengan target intervensi tahun 2024 sebanyak 8 kelurahan, maka akan dicapai target intervensi sebanyak 36 kelurahan di akhir periode.

18.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Realisasi jumlah jumlah desa pangan aman oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar tahun 2023 secara berturut-turut adalah 28 desa, 29 desa, dan 25 desa. Realisasi jumlah desa intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00%. Program intervensi desa pangan aman di 34 provinsi memiliki target jumlah desa/kelurahan tahun 2023 secara nasional sebanyak 874.

18.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tercapainya target kinerja program Desa Pangan Aman pada tahun 2023 yaitu yaitu adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai hasil kegiatan Audiensi dan Advokasi, telah terbentuknya forum komunikasi dengan kelurahan-kelurahan intervensi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan

kegiatan serta telah terbentuk Tim dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan sebagai pelaksana program keamanan pangan di kelurahan.

Sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan pencapaian kinerja program Desa Pangan Aman di periode selanjutnya dapat dilakukan perkuatan koordinasi dengan pemerintah daerah lokus intervensi melalui Audiensi dan Advokasi serta melibatkan OPD terkait keamanan pangan, mengingat program Desa Pangan ini merupakan program yang memerlukan integrasi dengan melibatkan berbagai lintas sektor, seperti Sudinkes, Sudin PPKUKM, Sudin KPKP, dan Sudindik serta stakeholder terkait lainnya. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap rencana aksi yang telah disusun kelurahan intervensi sebagai monitoring dalam kegiatan pengawalan.

18.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai	28	28	100.00	1,059,366,000	1,058,135,992	99.88 %	1.00 1	0.00 1	100%

Besar POM di Jakarta									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 79. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.001 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dan Advokasi, telah terbentuknya forum komunikasi dengan kelurahan-kelurahan untuk tercapainya target jumlah desa / kelurahan anga naman diwilayah kerja BBPOM di Jakarta.

18.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah adanya koordinasi dan sinergitas dengan kegiatan lintas sektor terutama program yang ada di kelurahan terkait keamanan pangan sehingga pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman dapat diintegrasikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. Adanya sinergitas ini dimulai melalui forum Advokasi Kelembagaan Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan Program PJAS aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Selain itu, telah terbentuknya Tim dan Kader Keamanan Pangan memudahkan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan di kelurahan intervensi.

18.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Refreshment materi keamanan pangan terhadap Tim dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan Intervensi Tahun sebelumnya serta koordinasi penyusunan rencana aksi keamanan pangan	Telah dilaksanakan Pengawasan melalui bimtek tentang keamanan pangan dan stunting dan kelurahan intervensi telah menyusun rencana aksi keamanan pangan	-	-	Kelurahan intervensi belum Menyusun dan memiliki rencana aksi keamanan pangan	Pelaksanaan pengawasan dan penysunan rencana aksi telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	<i>Bersama dengan tim keamanan pangan kelurahan tahun 2023</i>					

Tabel 80. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Sebelumnya

18.9 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan serta mengoptimalkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder terkait lainnya termasuk kader dan komunitas di kelurahan sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

19.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 81.
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TRIWULAN III TAHUN 2023	CAPAIAN TRIWULAN III TAHUN 2023 (%)	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	4	4	100.00	Baik

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan cara ritel pangan yang baik (CRPB) oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya; dan
2. Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ialah 4 (empat) pasar yaitu 1 pasar intervensi baru dan 3 pasar pengawalan intervensi tahun 2020-2022.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan sebagai berikut:

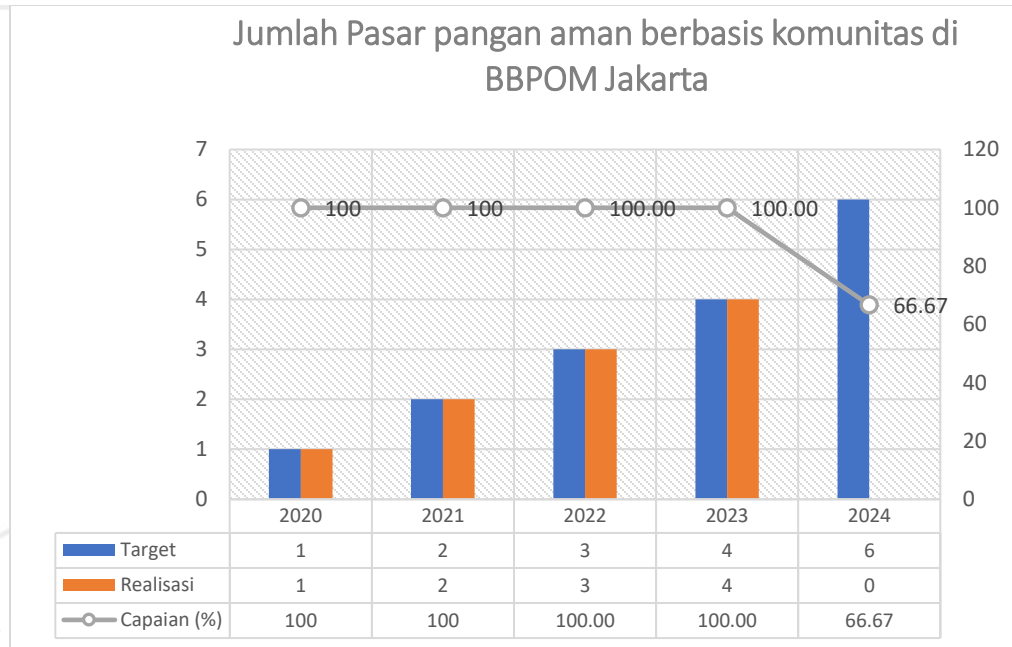
No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Survei Pasar	5%	Januari-April (TW 1-TW 2)
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei (TW 2)
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	15%	April-Mei (TW 2)
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
6	Kampanye	10%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	15%	September-Oktober (TW 3-TW 4)
8	Pengawalan	10%	Februari-Oktober (TW 1-TW 4)
Total Skor		100%	

Tabel 82. Realisasi Kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023

Realisasi progress tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 ialah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terhadap 4 pasar intervensi (1 pasar intervensi baru dan 3 pasar pengawalan intervensi tahun 2020-2022). Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 sebesar 100% (tercapai/melampaui).

19.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

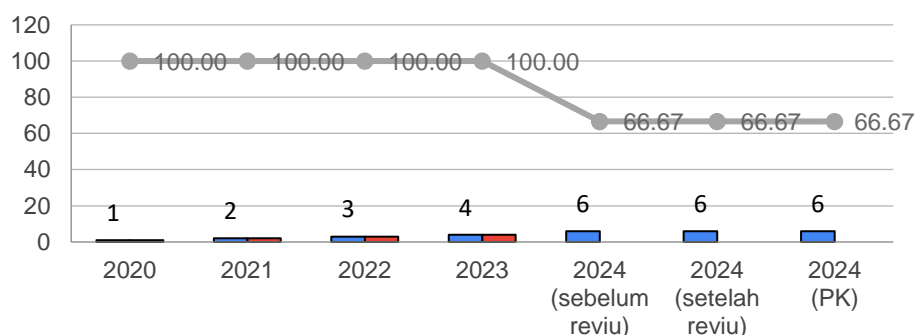


Gambar 70. Grafik Jumlah Pasar Aman Bebrasi Komunitas di BBPOM di Jakarta

Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 ialah sebanyak 6 pasar. Pada tahun 2020, capaian Pasar Pangan Aman ialah sebanyak 1 pasar, kemudian mengalami penambahan jumlah pasar pada tahun 2021 sebanyak 1 pasar sehingga total 2 pasar pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi pasar terhadap 1 pasar lainnya sehingga total pada 2022 ialah 3 pasar. Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan intervensi terhadap 1 pasar sehingga total pasar intervensi sebanyak 4 pasar. Realisasi ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% pada 2020-2023.

19.3 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di BBPOM Jakarta



Gambar 71. Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020 dan 2021

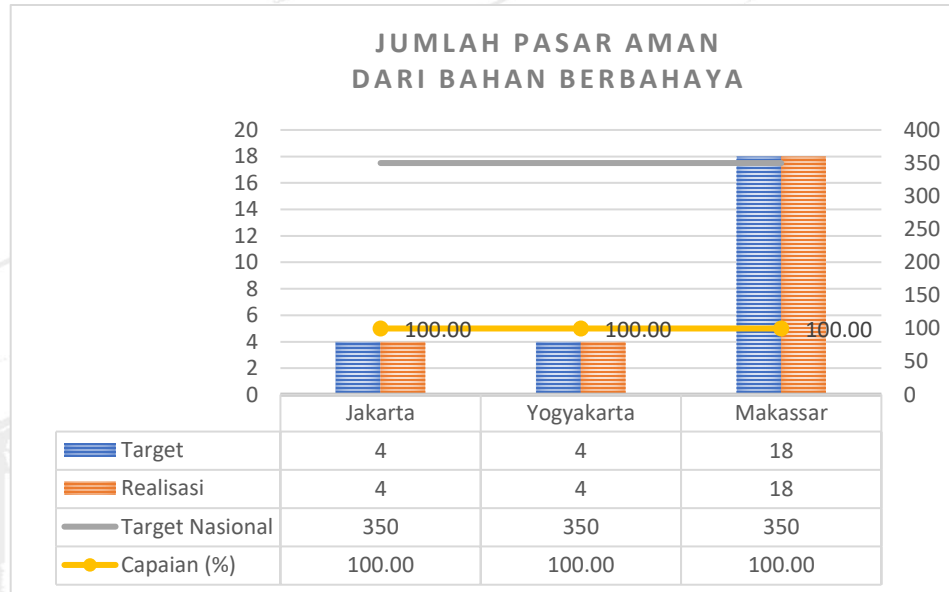
Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di lingkungan BBPOM di Jakarta tahun 2020-2023 berturut-turut sebanyak 1, 2, 3, dan 4 pasar. Tidak terdapat perubahan target pada periode sebelum dan sesudah revidi renstra dan pada PK 2024.

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	4	6	66.67%	Perlu Upaya Keras ▼
Setelah Review	4	6	66.67%	Perlu Upaya Keras ▼
Sesuai Perjanjian Kinerja	4	6	66.67%	Perlu Upaya Keras ▼

Tabel di atas menunjukkan kategori perlu upaya keras untuk mencapai target pada periode akhir renstra (66.67% < 70%). Namun karena jumlah pasar intervensi ini bersifat akumulatif, dengan target intervensi tahun

2024 sebanyak 2 pasar, maka akan dicapai target intervensi sebanyak 6 pasar di akhir periode.

19.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 72. Perbandingan realisasi jumlah jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan Balai Lainnya

Realisasi jumlah jumlah desa pangan aman oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Makassar tahun 2023 secara berturut-turut adalah 4 pasar, 4 pasar, dan 18 pasar. Realisasi jumlah pasar intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00%. Program intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas di 34 provinsi memiliki target jumlah pasar tahun 2023 secara nasional sebanyak 350.

19.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja tahapan progress intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas antara lain adanya kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya sebagai instansi yang membawahi pasar tradisional

di DKI Jakarta, adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dan Advokasi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, telah terbentuknya forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan serta telah terbentuknya Fasilitator Pasar Aman sebagai kepanjangan tangan dari BPOM yang dapat melakukan implementasi pengawasan pangan di pasar.

Sebagai rekomendasi perbaikan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya yaitu akan dilaksanakan audiensi dan advokasi dengan Pemerintah Daerah lokus intervensi dan Perumda Pasar Jaya untuk menentukan pasar intervensi yang sesuai kriteria sehingga dapat dilakukan kegiatan survei pasar yang memadai.

19.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023:

<i>Indikator</i>	<i>Output</i>			<i>Input (anggaran)</i>			<i>IE</i>	<i>TE</i>	<i>Capaian TE</i>
	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>%</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>%</i>			
<i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>100.00</i>	<i>106,629,000</i>	<i>104,644,000</i>	<i>98.14 %</i>	<i>1.02</i>	<i>0.02</i>	<i>100%</i>

kerja Balai Besar POM di Jakarta									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 83. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0.02 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya serta adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait dalam rangka tercapainya target intervensi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

19.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media Whatsapp sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu serta peran Fasilitator Pasar Aman yang dapat melakukan tugas pengawasan keamanan pangan di pasar sesuai penugasan yang ditetapkan.

19.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum		

			Rencana Aksi	Timeline		
1	<i>Verifikasi pelaksanaan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan petugas pasar agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan</i>	<i>Telah dilakukan sampling dalam rangka monev tahap 1 dan 2 sesuai dengan perencanaan</i>	-	-	<i>Adanya ketidaksesuaian hasil sampling dan pengujian oleh petugas pasar</i>	<i>Hasil pengujian pangan oleh petugas pasar sudah diverifikasi dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan</i>

Tabel 84. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

19.9 Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder terkait termasuk perumda Pasar Jaya dan komunitas pasar sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 sebesar 100% (tercapai/melampaui). Dengan realisasi progress tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 ialah sebesar 100% dengan telah terselenggaranya seluruh tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terhadap 4 pasar intervensi (1 pasar intervensi baru dan 3 pasar pengawasan intervensi tahun 2020-2022). Capaian ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan laporan kinerja.

3.8. SASARAN STRATEGIS VI

Capaian sasaran strategis VI, yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

20.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Berikut adalah realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Kategori Capaian
-------------------	-------------------------------	-------------------	-----------	--------------------	------------------

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik
--	--	-----	-----	-----	-------------

Tabel 85. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

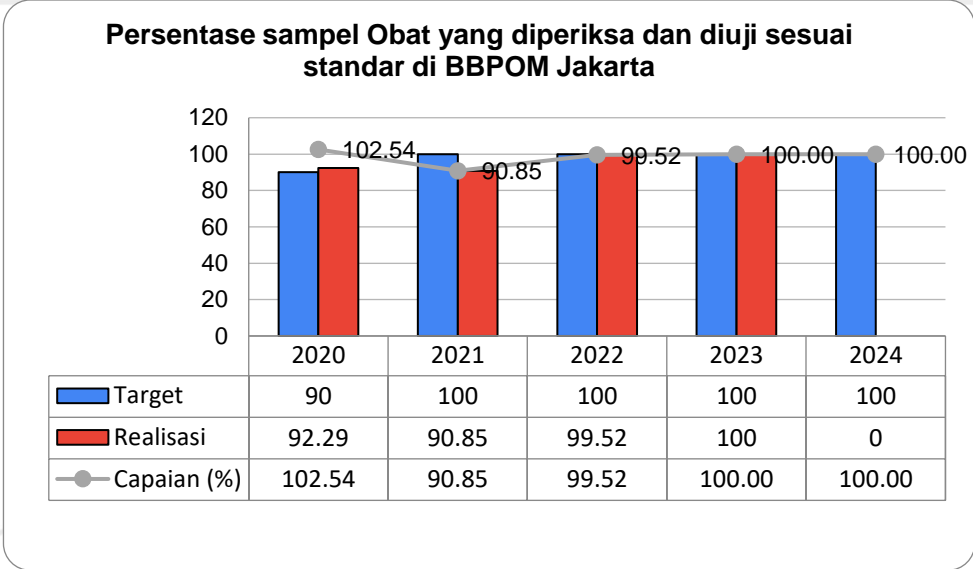
Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{100\%} \times$$

Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM Jakarta adalah 100% dengan kriteria “Baik”. Capaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan Badan POM yaitu 100%.

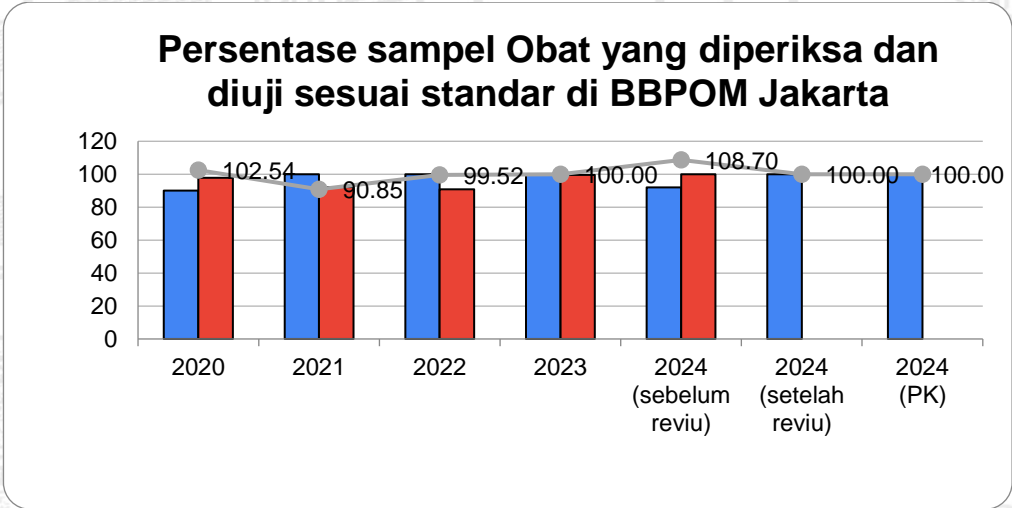
20.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022



Gambar 73. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar mengalami peningkatan mulai tahun 2021 sampai tahun 2023. Tahun 2023, realisasi dan capaian sudah memenuhi target yang ditetapkan.

20.3 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



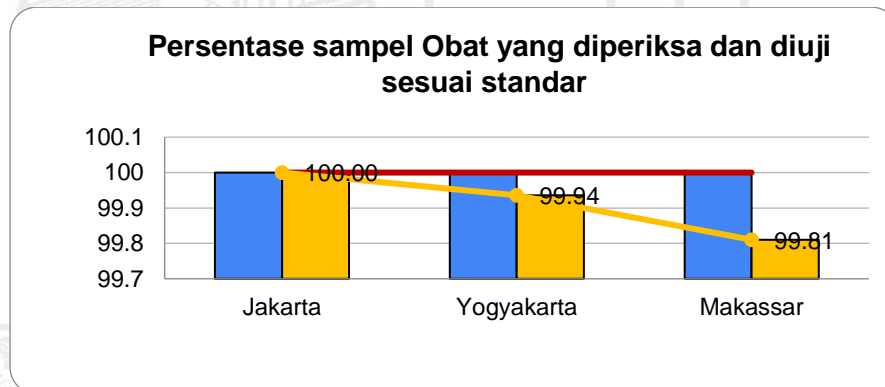
Target presentase obat yang diperiksa dan diuji pada awal RPJMN ditetapkan 92%, Namun dengan capaian tahun 2023 sebesar 98.75

yang telah melampaui maka dilakukan penyesuaian target menjadi 100%. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase obat yang diperiksa dan diuji tetap 100% untuk motivasi dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	100	92	108.70	Tercapai/Melampaui ▲ i
Setelah Review	100	100	100	Tercapai/Melampaui ▲ i
Sesuai Perjanjian Kinerja	100	100	100	Tercapai/Melampaui ▲ i

Tabel 86. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 Beserta Kategorinya

20.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis/setara dan target nasional



Gambar 75. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan yang terendah adalah BBPOM Makassar. Realisasi BBPOM di Jakarta sudah mencapai target nasional.

20.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan IV tahun 2023 memenuhi target yang ditentukan yaitu 100 %, sehingga capaiannya adalah 100 %. Dari 2148 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 2166 sampel yang masuk ke laboratorium semuanya telah selesai diuji sesuai dengan standar. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Jakarta berbeda dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium, hal ini karena diterapkannya sistem regionalisasi laboratorium yang memungkinkan laboratorium mengirimkan sampel dari dan ke UPT lain sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan regionalisasi laboratorium.

20.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Jakarta tahun 2023:

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	120.00	120.00	436,125,900	436,109,846	100.00	1.20	0.20	88% (efisien)

Tabel 87. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Target Presentase yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan nilai IE > 1. Presentase capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran dapat. Maksimal.

20.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan/pencapaian kinerja

Program / Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan alat laboratorium dan sarana prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

20.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Selesai. (Tahun 2023 telah dilaksanakan Bimtek Awareness ISO 17025:2017)	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023	Sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 sudah diterapkan namun masih perlu ditingkatkan	Sudah terpenuhinya penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 dengan mengadakan <i>refreshment</i> dan bimbingan teknis terkait
2	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Selesai	Melakukan program pemeliharaan alat yang bekerjasama dengan vendor	Akhir tahun 2023	Kondisi alat laboratorium seringkali mengalami kerusakan dan memerlukan penggantian spare part	Dengan adanya program pemeliharaan alat yang bekerjasama dengan vendor, diharapkan kerusakan alat dapat dikurangi dan penggantian spare part dapat dilakukan tepat waktu sebelum terjadi kerusakan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
3	Pengembangan kompetensi personil baik personal lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal	Selesai (Tahun 2023 telah dilaksanakan bimtek internal dan magang di PPPOMN untuk seluruh laboratorium)	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023	Kompetensi personal masih perlu ditingkatkan dengan melakukan bimbingan teknis sesuai dengan perencanaan	Sudah terlaksananya pengembangan kompetensi personil dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal sesuai perencanaan

Tabel 88. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

20.9 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,51	98,51	Cukup

Tabel 89. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

- a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*.
- b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

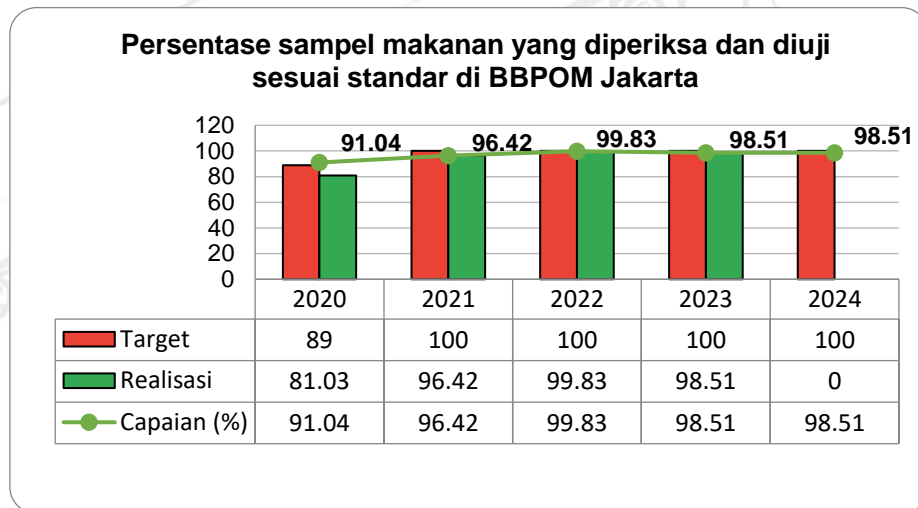
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	$= \frac{A + B}{2}$
$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel makanan satu tahun}} \times 100\%$	
$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}} \times 100\%$	

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

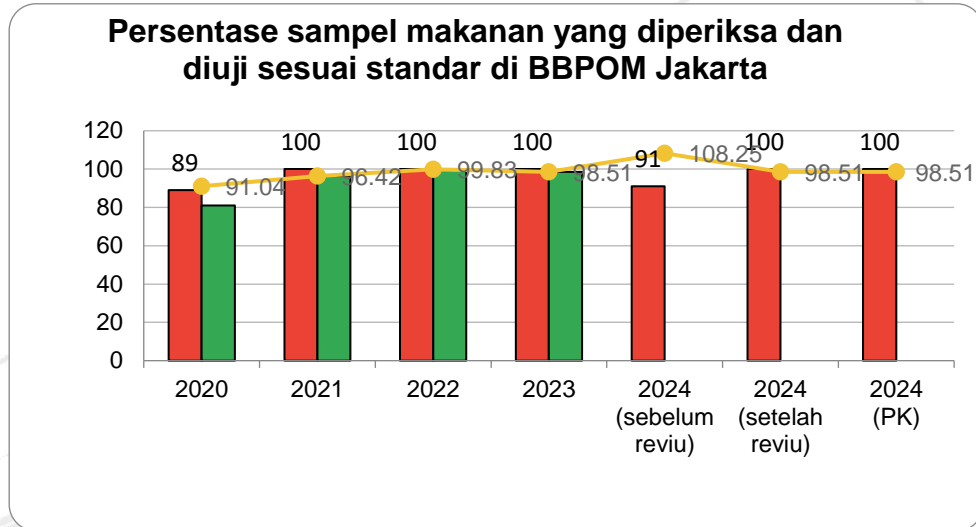
Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM Jakarta adalah 98,51% dengan kriteria **“cukup**. Capaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan Badan POM yaitu 100%.

b. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022



Capaian pada tahun 2020 sebesar 91,04% (akan tercapai), tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 96,42% (akan tercapai) dan tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 99,83% (akan tercapai). Peningkatan persentase capaian menunjukkan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin bertambah. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 98,51% dengan kriteria **“cukup”**. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan.

c. **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**



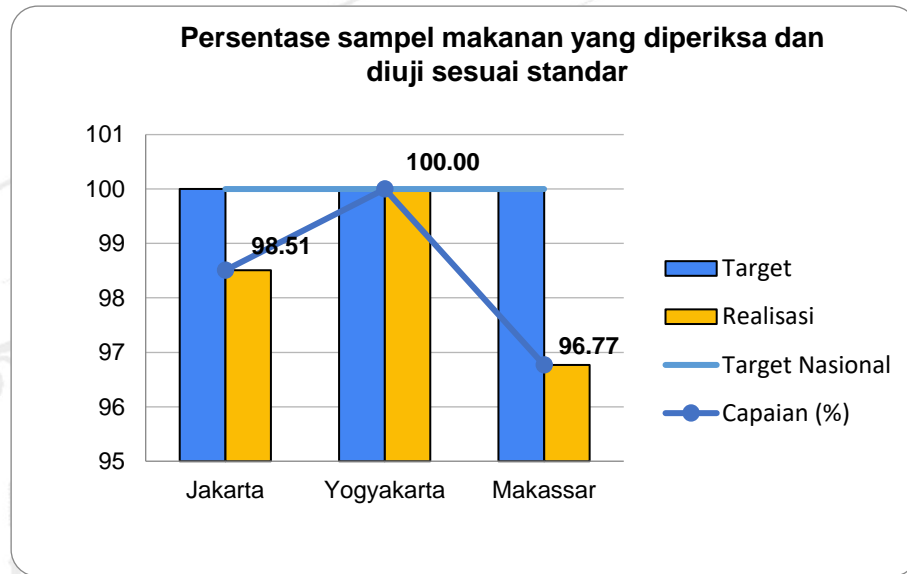
Target presentase makanan yang diperiksa dan diuji pada awal RPJMN ditetapkan 91%, Namun, realisasi tahun 2023 sebesar 98.51 maka dilakukan penyesuaian target menjadi 100%. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase makanan yang diperiksa dan diuji tetap 100% untuk motivasi dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut:

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	98,51	91	108.25%	Tercapai/Melampau ▲
Setelah Review	98,51	100	98.51	akan tercapai ▲

Sesuai Perjanjian Kinerja	98,51	100	98,51	akan tercapai ▲
---------------------------	-------	-----	-------	--------------------

Tabel 90. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Balai lain yang Sejenis/Setara dan target Nasional



Dari grafik diketahui bahwa target tahunan untuk Balai Besar POM Jakarta, Balai Besar POM Yogyakarta dan Balai Besar POM di Makassar sama dengan target nasional, yaitu 100 %. Capaian Balai Besar POM di Jakarta adalah 98,51% dengan kriteria **“akan tercapai”**, Balai Besar POM di Yogyakarta 100% dan Balai Besar POM di Makassar 96,77 %. Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM Makassar belum mampu mencapai target, hal ini menunjukkan masih ada sampel yang diperiksa dan diuji tidak sesuai standar.

e. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tidak tercapainya target indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar disebabkan adanya beberapa sampel yang belum dapat diuji Nitrofurazonnya akibat terjadinya

kekurangan test kit Nitrofurazon. Pengadaan tambahan test kit Nitrofurazon terkendala ketersediaan di distributor (*indent*), sehingga pengujian dilakukan setelah test kit tersedia. Telah diupayakan untuk meminta dari Balai lain, namun ternyata stok di Balai lain pun terbatas. Pada tahun 2023 jumlah sampel yang diperiksa sesuai standar berjumlah 1161 sampel dan jumlah sampel yang diuji sesuai standar berjumlah 1310 sampel.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023:

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	98.51	98.51	243,912,900	243,900,363	99.99	0.99	-0.01	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** dengan nilai $IE \leq 1$. Presentase capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian kinerja persentase makanan yang diuji sesuai standar dipengaruhi oleh kompetensi personal yang melakukan pengujian, validitas metode pengujian, kondisi peralatan yang digunakan,

ketersediaan kebutuhan pengujian dan manajemen laboratorium. Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

1. Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji dilakukan dengan mengikutsertakan personil penguji dalam berbagai bimbingan teknis dan magang.
2. Pemanfaatan dan pemenuhan peralatan laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal guna menjamin kelancaran dan pelaksanaan pengujian.
3. Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian terus menerus dilakukan guna menjamin tersedianya metode yang valid dalam pengujian dengan meningkatkan metode uji dan melakukan verifikasi Metoda Analisis, mengikuti Uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal, juga mengikuti Uji Kolaborasi antar laboratorium. Peningkatan metode uji tersebut juga meliputi penambahan jenis metode untuk satu parameter uji sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terhadap kendala kerusakan alat yang dipakai secara rutin agar kecepatan pengujian tidak terhambat.
4. Perencanaan kebutuhan pengujian (reagen, baku pembanding, test kit dan lain-lain) harus dilakukan secara lebih tepat agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

h. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timelin e		
1	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Selesai. Tahun 2023 telah dilaksanakan Bimtek Awareness ISO 17025:2017	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2023	Sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 sudah diterapkan namun masih perlu ditingkatkan	Sudah terpenuhinya penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 dengan mengadakan <i>refreshment</i> dan bimbingan teknis terkait

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timelin e		
2	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Selesai	Melakukan program pemeliharaan alat yang bekerjasama dengan vendor	Akhir tahun 2023	Kondisi alat laboratorium seringkali mengalami kerusakan dan memerlukan penggantian spare part	Dengan adanya program pemeliharaan alat yang bekerjasama dengan vendor, diharapkan kerusakan alat dapat dikurangi dan penggantian spare part dapat dilakukan tepat waktu sebelum terjadi kerusakan.
3	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan	Selesai Tahun 2023 telah dilaksanakan bimtek internal dan magang di PPPOMN untuk	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023	Kompetensi personal masih perlu ditingkatkan dengan melakukan bimbingan teknis sesuai	Sudah terlaksananya pengembangan kompetensi personil dengan melakukan bimbingan teknis secara

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timelin e		
	melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal.	seluruh laboratorium			dengan perencanaan	internal maupun eksternal sesuai perencanaan

Tabel 91. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya

3.9. SASARAN STRATEGIS VII

Capaian sasaran strategis VII, yaitu meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

23. Tingkat persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Data perbandingan target dan realisasi terkait efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	% CAPAIAN TAHUN 2023	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	61	61.54	100.89	Sangat Baik

Tabel 92. Indikator kinerja, target dan realisasi tahun 2023

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara]

Nilai Tingkat Keberhasilan

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Adapun rincian data capaian penindakan kejahatan di wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tahapan	Target		Realisasi		Nilai Realisasi	Capaian Perkara	% Keberhasilan Penindakan
	Perkara tahun n berjalan	Perkara <i>carry over</i>	Perkara s.d bulan n	Perkara <i>carry over</i>			
SPDP			3		15.00%	100.00%	61.54%
Tahap I	6	10	1		27.69%		
P21			2	8	17.69%		
Tahap II				2	1.15%		
Jumlah			6	10	6		

Tabel 93. Capaian penindakan kejahatan di wilayah DKI Jakarta

Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 adalah sangat baik dengan capaian sebesar 100,89%. Hasil perhitungan tersebut

menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar POM di Jakarta **telah berhasil** memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan, yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan.

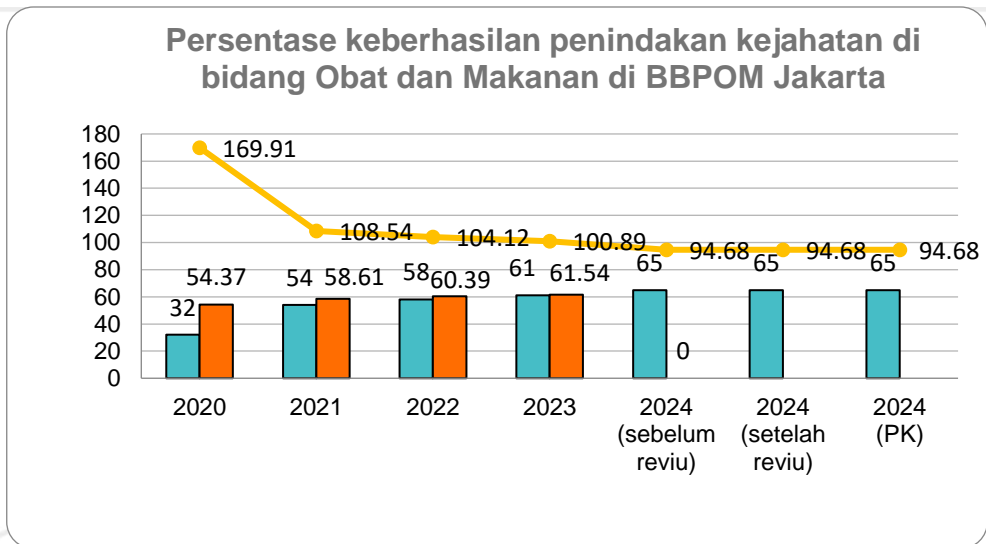
b. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Target indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” pada tahun 2023 adalah 61 dengan realisasi sebesar 61,54 atau 100,89% yang masuk dalam kriteria “**sangat baik**”. Adapun perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja selama periode Renstra tahun 2020 hingga 2024 tercantum dalam tabel berikut:

Perbandingan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di BBPOM di Jakarta			
2020	2021	2022	2023
169,91%	108,54%	104,12%	100,89%

Tabel 94. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja terkait penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

Bila dianalisis, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, meski menunjukkan tren penurunan persentase capaian sebagaimana terlihat pada gambar. Penurunan persentase capaian ini karena adanya perubahan metode pengukuran capaian indikator kinerja, dimana keberhasilan penindakan diukur hingga pelaksanaan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa. Pencapaian kinerja dari tim kerja Penindakan ini terwujud sebagai hasil dari penyelesaian berkas perkara tunggakan dan penanganan perkara selama tahun 2020 hingga 2023.



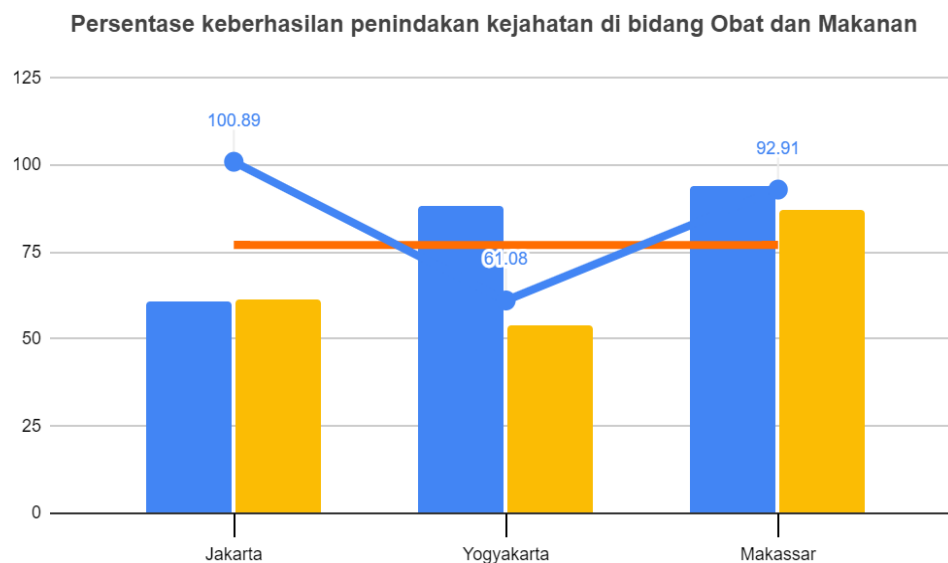
Gambar 79. Perbandingan capaian indikator kinerja efektivitas penindakan BBPOM di Jakarta tahun 2020-2024

Pada dokumen Renstra jangka menengah, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditetapkan untuk Penindakan pada tahun 2024 adalah sebesar 65. Dengan demikian, capaian indikator kinerja tahun 2023 terhadap target tersebut adalah 94,68% yang masuk kategori **“akan tercapai”**. Gambaran tersebut dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 sehingga bisa mencapai target kinerja yang semakin meningkat. Adapun perkara yang ditargetkan pada tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023, yakni sebanyak 6 (enam) perkara. Perbandingan ditampilkan pada table berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	61.54	65	94.68%	akan tercapai ▲
Setelah Review	61.54	65	94.68%	akan tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	61.54	65	94.68%	akan tercapai ▲

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai Besar POM di Yogyakarta dan Balai Besar POM di Makassar. Kinerja 3 (tiga) UPT ini disajikan pada gambar. Berdasarkan realisasi tersebut, diketahui bahwa hanya capaian Balai Besar POM di Jakarta yang masuk dalam kategori “tercapai/melampaui” karena capaiannya di atas 100%, sementara capaian Balai Besar POM di Makassar masuk dalam kategori “akan tercapai” yakni 92,91% yang berada dalam rentang 70% -100%, dan Balai Besar POM di Yogyakarta capaiannya <70% yakni sebesar 61,08%, sehingga masuk dalam kategori “perlu upaya keras”.



Perbandingan realisasi kinerja ini memberikan peluang pada UPT BPOM untuk bisa melakukan *benchmark* baik dalam mengatasi kendala yang dihadapi maupun untuk mitigasi resiko yang dapat menghalangi tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Efektivitas penanganan perkara kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja masing-masing merupakan hasil dari kerja sama tim penindakan dan juga lintas sektor terkait atau *Criminal Justice System* (CJS) terkait.

d. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis terhadap keberhasilan Tim Penindakan Balai Besar BPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Implementasi sistem *monitoring* dan evaluasi kinerja secara efektif

Sistem *monitoring* dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan *spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh personel di mana saja dan kapan saja, yaitu matriks pemantauan penyelesaian perkara. *Spreadsheet* ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring maupun luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindak lanjutnya. Kinerja Tim Penindakan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan. Target jumlah perkara dapat tercapai apabila tahapan kegiatan tersebut bisa dijalankan dengan optimal. Dengan pemanfaatan sistem monev yang efektif maka Ketua Tim Penindakan dapat memaksimalkan potensi dan kinerja seluruh Tim Penindakan. Selain itu, diadakan juga dialog kinerja setiap periode bersama dengan Kepala Balai Besar POM di Jakarta sehingga progres penyelesaian perkara dan kegiatan penindakan lainnya dapat dipantau dengan optimal.

2. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) yang lebih optimal

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Sebagai hasil dari koordinasi

tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat penyelesaian atas beberapa perkara tunggakan yang mempengaruhi indikator kinerja tahun 2023. Tindak pidana yang ditangani PPNS Balai Besar POM di Jakarta merupakan ranah spesialis, yakni tindak pidana terkait obat dan makanan. Perlu adanya kesepahaman antara PPNS dengan CJS untuk persamaan persepsi dan tafsir dalam penyelesaian perkara. Pencapaian kinerja tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan keberhasilan penindakan dan penanganan perkara di wilayah kerja Balai Besar BPOM di Jakarta.

3. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait

Di tengah maraknya sistem perdagangan secara daring yang diawasi melalui skema patroli siber, Tim Penindakan tetap waspada akan peredaran produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. Pada tahun 2023 ini, terjalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengungkap produksi kosmetik ilegal, obat tradisional mengandung BKO, peredaran pangan olahan impor ilegal, dan juga peredaran obat-obat tertentu secara bebas dilakukan di sarana tanpa kewenangan serta personel tanpa kewenangan dan keahlian. Kerja sama juga dijalin dengan Bea Cukai Pasar Baru dalam upaya cegah tangkal terhadap masuknya produk obat dan makanan ilegal dari luar negeri yang disalahgunakan dari tujuan pemakaian pribadi menjadi tujuan komersil.

Selain itu juga dilakukan upaya penggalangan yang melibatkan jajaran penyidik di wilayah kerja Polda Metro Jaya, mulai dari Polsek hingga Polres, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, dan juga Satpol PP. Tujuan kegiatan penggalangan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan

terhadap potensi kejahatan obat dan makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4. Pelaksanaan kegiatan operasi terkait penindakan secara optimal
Sepanjang tahun 2023 ini, kegiatan intelijen dan siber dilakukan lebih intensif. Kegiatan pelaporan dan analisis atas hasil verifikasi informasi yang diperoleh dilakukan sesuai rencana. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut menjadi rumusan untuk penyusunan rencana operasi penindakan. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan kinerja.

e. Analisis terhadap penggunaan sumber daya

Hasil penilaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kelompok Substansi Penindakan masuk ke dalam **kategori efektif**. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2023. Penggunaan anggaran untuk indikator persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di Jakarta mencapai 99,96%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.170.678.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.170.239.995. Perhitungan TE menunjukkan angka 0.01 yang tergolong kategori **efisien**. Efektivitas dalam pengelolaan anggaran ini dapat terwujud karena hal-hal sebagai berikut: (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala; (2) Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan secara cermat dan tepat. Meskipun pemanfaatan sumber daya yang mendukung kinerja penindakan tahun 2023 dinyatakan efektif dan efisien, namun perlu dilakukan evaluasi untuk capaian yang lebih optimal di tahun mendatang.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian kinerja Tim Penindakan ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis dan pemetaan rawan kasus

hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal. Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, rekomendasi dari BPOM, pengaduan masyarakat, dan juga akses informasi. Setelah kebenaran informasi dapat diverifikasi dan diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi. Sepanjang tahun 2023, penindakan telah mengidentifikasi 746 akun yang berpotensi melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi *takedown*. Tindak lanjut yang berupa kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kombinasi dari 4 (empat) fungsi ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Tim Penindakan. Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara. Capaian yang maksimal juga didukung oleh semakin efektifnya kerja sama dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut dari Kejati DKI Jakarta. Program yang dijalankan adalah eskspose perkara antara PPNS dengan Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut sehingga berkas perkara yang ditangani PPNS bisa segera dinyatakan lengkap dan bisa dilimpahkan. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan koordinasi secara rutin dengan pihak CJS sebanyak 112 kali koordinasi. Tim Penindakan juga masih secara aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan cegah tangkal yakni verifikasi barang kiriman untuk penggunaan pribadi yang masuk melalui jasa kiriman pos di Kantor Pos Besar Pasar Baru. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa upaya pencegahan peredaran produk yang terkena Larangan Pembatasan BPOM yang disalahgunakan untuk kegiatan komersil. Upaya pencegahan ini melibatkan UPT BPOM di wilayah lain dengan penyampaian informasi untuk ditindaklanjuti.

g. Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tindak lanjut terkait perbaikan kinerja pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 95. Tindak lanjut perbaikan kinerja penindakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pemenuhan unsur-unsur yang disangkakan dalam perkara dan koordinasi dengan CJS yang lebih intensif	Selesai dilaksanakan	Koordinasi intens dengan CJS (Jaksa Penuntut di Kejati DKI Jakarta dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya)	Desember 2023	Diperlukan peningkatan koordinasi dengan CJS untuk memastikan pemenuhan unsur-unsur yang disangkakan dalam perkara sehingga dapat meningkatkan keberhasilan penindakan	Telah terwujud persamaan persepsi dan pemahaman dalam upaya pembuktian dan pemenuhan unsur-unsur yang disangkakan melalui pelaksanaan gelar perkara dan ekspose perkara

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk menyusun strategi di tahun 2024, yaitu: (1) Sebagai bahan reviu dalam memetakan potensi kejahatan obat dan makanan yang diprediksi akan terjadi di tahun 2024. Hal ini dapat menjadi dasar penyusunan *Plan of Action* tim penindakan dalam mencapai target 6

perkara dengan tingkat keberhasilan 65; (2) Pemanfaatan anggaran yang lebih efisien untuk mencapai target kinerja secara efektif. Dengan penerapan strategi perkuatan kerja sama dengan CJS maka alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut akan direviu sehingga bisa digunakan dengan efektif dan efisien; (3) Pemanfaatan sumber daya dalam melakukan fungsi intelijen, siber, dan cegah tangkal secara cermat dan tepat sehingga dapat mengatasi kendala dan tantangan yang masih akan dihadapi di tahun mendatang.

3.10. SASARAN STRATEGIS VIII

Capaian strategis VIII, yaitu terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal Indeks reformasi birokrasi Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

24. Indeks reformasi birokrasi

24.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Berikut ini adalah realisasi indeks reformasi birokrasi Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks RB BBPOM di Jakarta	84,4	90.41	107.12	Sangat Baik

Tabel 96. Realisasi Indeks RB BBPOM di Jakarta Tahun 2023

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang

bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Balai Besar POM di Jakarta telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020 dan terus berupaya untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Predikat ini diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Perhitungan Indeks RB didasarkan pada penjumlahan komponen pengungkit dan komponen hasil. Berikut adalah tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)	Aspek pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai
1	Manajemen Perubahan	8%	3.39%	3.67%	7.06%
2	Penataan Tatalaksana	7%	2.67%	2.5%	5.17%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4.42%	5%	9.42%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	4.74%	3.46%	8.20%
5	Penguatan Pengawasan	15%	6.23%	7.5%	13.73%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	4.49%	4.59%	9.08%

Tabel 97. Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

Berikut adalah tabel rincian bobot indikator komponen hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

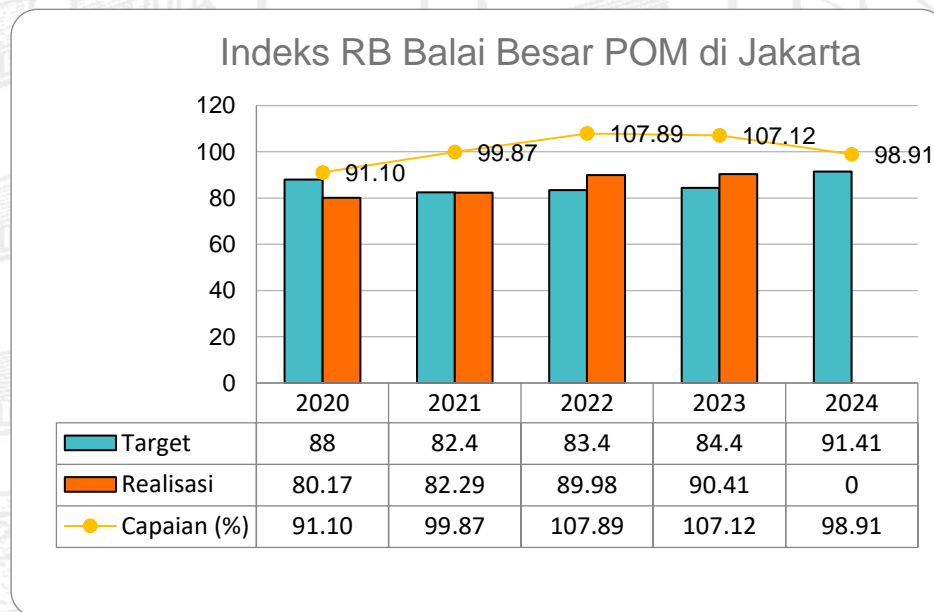
No	Komponen Hasil	Bobot (40%)	Total Nilai
----	----------------	-------------	-------------

I	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22.5%	20.86%
	a. Nilai Survei Persepsi Korupsi	17.5%	17.11%
	a. Capaian Kinerja Lebih Baik	5%	3.75%
II	Pelayanan Publik yang Prima	17.5%	16.89%
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17.5%	16.89%

Tabel 98. Bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

24.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

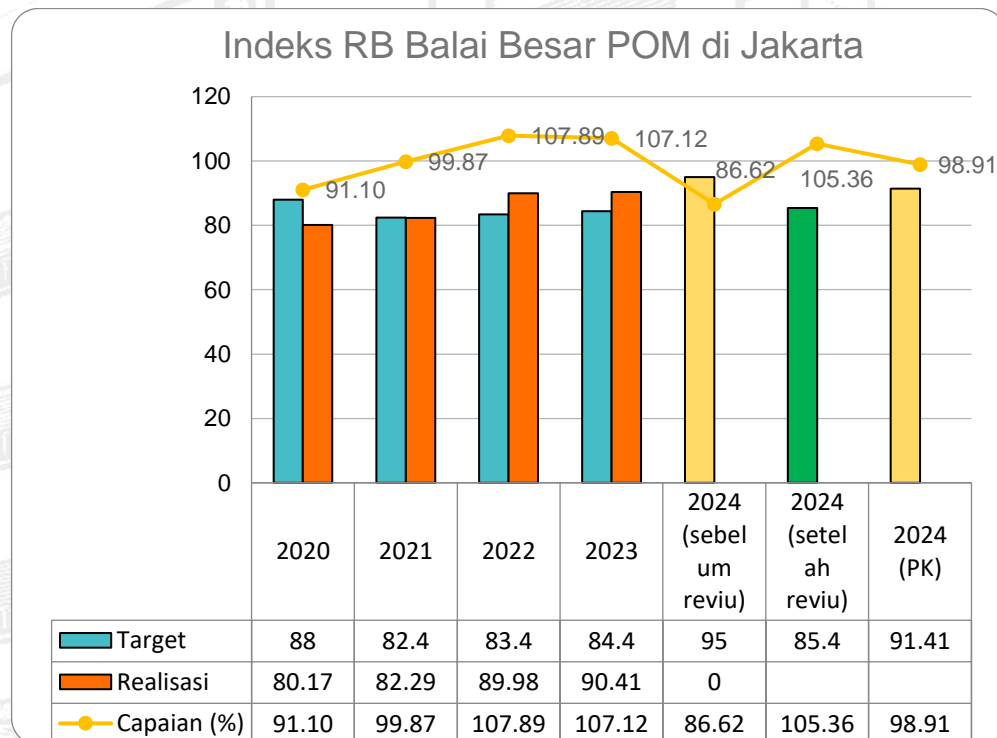
Nilai Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang ditetapkan pada tahun 2020. Terdapat penyesuaian target Indeks RB, sesuai dengan Reviu Renstra yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.11A5.12.21.13478 tanggal 18 November 2021.



Target pada tahun 2023 adalah 84,4 dengan realisasi sebesar 90,41% dengan capaian 107,12%. Capaian ini merupakan tahun kedua BBPOM di Jakarta dapat melampaui target semenjak IKU Indeks RB ditetapkan. Target 2024 ditetapkan sesuai *roadmap* Balai Besar POM di Jakarta mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

sebelum RPJMN berakhir pada tahun 2024. Hal ini merupakan tindak lanjut capaian Wilayah Bebas dari Korupsi yang diraih Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020.




24.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra



Gambar 82. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

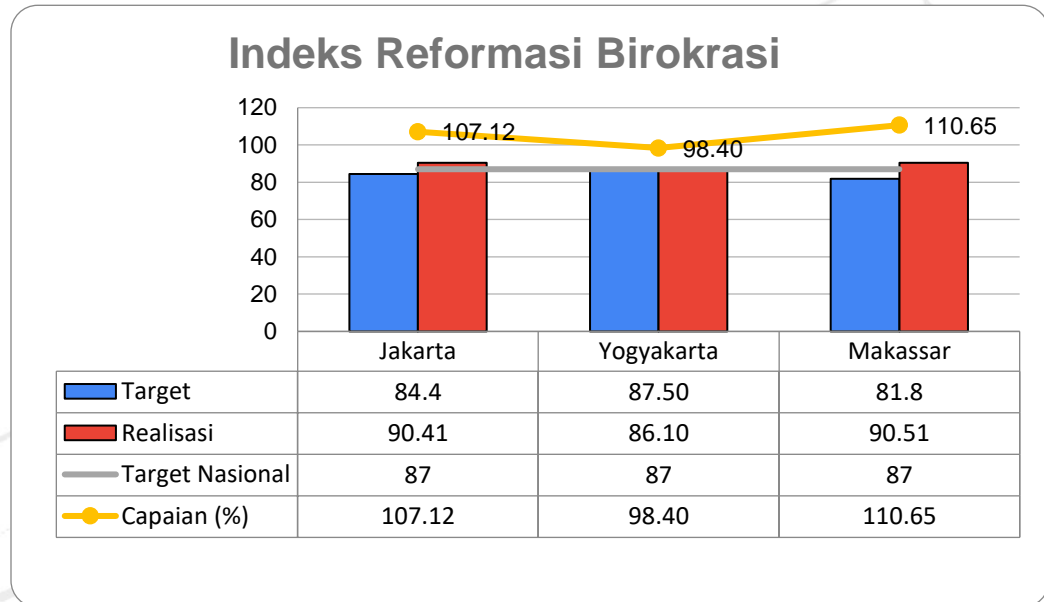
Target Indeks RB mengalami beberapa perubahan pada Rencana Strategis. Pada awal RPJMN ditetapkan, target Indeks RB tahun 2024 ditetapkan cukup tinggi sebesar 95. Mengingat pada tahun 2020 Balai Besar POM di Jakarta sedang merintis upaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, target ini dinilai tidak mungkin dapat dicapai, sehingga

dilakukan penyesuaian target pada reuiu renstra tahun 2021 menjadi 85.4 yang merupakan batas minimal nilai pengajuan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penilaian Indeks RB yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang diimplementasikan sejak tahun 2022, memberikan hasil Indeks RB yang cukup tinggi. Oleh karenanya agar tetap memenuhi target yang SMART, Tahun 2024 target Indeks RB dinaikkan menjadi 91.41. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum Reuiu	90.41	95	86.62	Akan Tercapai 
Setelah Reuiu	90.41	85.4	105.36	Tercapai 
Sesuai Perjanjian Kinerja	90.41	91.41	98.91	Akan Tercapai 

Tabel 99. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 Beserta Kategorinya

24.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai lain yang setara



Gambar 83. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel menunjukkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 untuk Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Yogyakarta dan Balai Besar POM di Makassar yang menunjukkan hasil baik untuk Yogyakarta dan sangat baik untuk Jakarta dan Makassar.

24.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sudah melampaui target 100%. Keberhasilan peningkatan kinerja ini disebabkan oleh :

1. Telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020 dan mempertahankan sampai dengan saat ini;
2. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas dan terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja;
3. Telah memiliki SOP untuk setiap proses bisnis yang dilaksanakan dan telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik;
4. Unit kerja telah melakukan upaya penataan sistem manajemen SDM mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penempatan pegawai,

mutasi internal, dan pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala;

5. Pimpinan unit kerja telah terlibat dalam pengelolaan kinerja dari proses perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja;
6. Upaya penguatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah dilaksanakan diantaranya telah tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada September 2022 serta membangun inovasi SI_AGAKU pada portal Jak Digital untuk mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan;
7. Inovasi yang dilakukan telah mendorong upaya perbaikan pelayanan publik yang (lebih cepat dan mudah) serta mendekatkan diri kepada masyarakat diantaranya melalui inovasi SIMANTEN (Sistem Mesin Antrean), SABBENI (Sarana Balai Buat Edukasi dan Informasi Obat dan Makanan), dan Laron Baja (Lartas Online BBPOM di Jakarta).
8. Rekomendasi perbaikan kinerja

Capaian IKU yang melampaui target perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Beberapa rekomendasi perbaikan kinerja ke depan adalah :

1. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM;
2. Melibatkan seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatkan kontribusi seluruh pegawai dalam membangun budaya kerja dan melakukan perubahan di Unit Kerja serta melaksanakan internalisasi core value ASN secara menyeluruh kepada seluruh pegawai dan menuangkan bentuk penerapannya kedalam SOP setiap kegiatan yang telah dibuat;
4. Terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas seluruh inovasi serta melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi seluruh inovasi/program yang telah dibangun sehingga

inovasi memiliki dampak positif yang konkret bagi Balai Besar POM di Jakarta antara lain meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh Unit Kerja/Instansi lain;

5. Memanfaatkan hasil capaian/monitoring atas seluruh perjanjian kinerja untuk dijadikan dasar pemberian reward and punishment;
6. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai sesuai tugas dan fungsi;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pemanfaatan IT atas inovasi dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan publik dan ditindaklanjuti secara berkala
8. Menindaklanjuti seluruh hasil Pengawasan dari BPK/APIP
9. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

24.6 Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja

Target kinerja Indeks RB yang telah terlampaui dapat tercapai melalui berbagai kegiatan diantaranya :

1. Terselenggaranya rencana aksi Agen Perubahan yang menekankan pada implementasi Core Values ASN dengan komprehensif;
2. Komunikasi internal terkait Reformasi Birokrasi yang disampaikan melalui apel yang dilaksanakan tiap minggu;
3. Berbagai program peningkatan awareness dan Implementasi Zona Integritas Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2023 diantaranya Workshop Implementasi Core Values ASN Ber-Akhlak pada 14-16 September 2023 dan Komitmen Penguatan Integritas pada 13 Desember 2023 yang melibatkan seluruh pegawai;
4. Implementasi Sistem Mutu secara konsisten baik untuk ISO IEC 17025: 2017, QMS 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2017

24.7 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Capaian kinerja Indeks RB Tahun 2023 menentukan capaian BBPOM di Jakarta secara keseluruhan, dan turut menyumbang tercapainya predikat Istimewa untuk BBPOM di Jakarta sehingga perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk terus meningkatkan capaian.

24.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Menginternalisasikan core value ASN BerAKHLAK sebagai fondasi baru bagi ASN dengan	Selesai	Workshop Implementasi dan	Desember 2023	Core values ASN belum	Pegawai telah mendapat

	<i>pemaparan melalui berbagai media</i>		<i>Pembuatan Ber-AKHLAK corner)</i>		<i>tersosialisasi secara optimal</i>	<i>pemahaman yang lebih baik terkait ASN Ber-AKHLAK</i>
2	<i>Monitoring evaluasi dari pemanfaatan teknologi informasi secara berkala dalam hal transformasi digital pada bidang proses bisnis utama, administrasi pemerintahan serta pelayanan public yang telah dimasukkan dalam menu Jakdigital</i>	<i>Selesai</i>	<i>Membuat laporan monitoring bulanan terkait pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Desember 2023</i>	<i>Belum dilakukan monitoring pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Monitoring pemanfaatan teknologi informasi tersedia setiap bulan</i>
3.	<i>Analisis dampak kemanfaatan inovasi serta peningkatan terus menerus telah dilaksanakan terhadap inovasi Kerling Jakarta yang telah mendapat kesempatan untuk lulus administrasi dalam lomba Inovasi Pelayanan Publik Nasional</i>	<i>Selesai</i>	<i>Laporan analisis dampak kemanfaatan inovasi telah disusun</i>	<i>Desember 2023</i>	<i>Belum tersedia analisis dampak kemanfaatan inovasi</i>	<i>Analisis dampak kemanfaatan inovasi telah disusun sebagai rekomendasi perbaikan berkelanjutan</i>
4.	<i>Program pembangunan ZI maupun program perubahan telah membawa pengaruh kepada capaian target kinerja utama yang 50% lebih baik dari tahun sebelumnya</i>	<i>Selesai</i>	<i>Menyusun program inovasi yang memiliki output yang dapat dihitung sebagai capaian kinerja</i>	<i>Desember 2023</i>	<i>Inovasi berjalan tanpa memberi dampak yang signifikan terhadap capaian output</i>	<i>Inovasi menghasilkan output yang dapat dihitung sebagai capaian kinerja, misal program UMKM J@wara dan JakOfficer</i>
5.	<i>Inovasi BBPOM di Jakarta dapat direplikasi instansi/Unit lain</i>	<i>Selesai</i>	<i>Membuat surat komitmen replikasi untuk instansi yang melakukan benchmarking/sharing knowledge</i>	<i>Januari-Desember 2023</i>	<i>Unit tidak mendapat bukti pemahaman peserta benchmarking/sharing knowledge</i>	<i>Telah memiliki replikasi inovasi Simanten (Sistem Mesin Antrian) dan Sabbeni (Sarana Balai</i>

					terhadap hasil kegiatan	buat Informasi dan Edukasi) dari BBPOM di Bandung dan BBPOM di Palembang, SIAGAKU untuk BPOM di Gorontalo
--	--	--	--	--	-------------------------	---

Tabel 100. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

25 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

25.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Berikut ini adalah realisasi nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023:

Tabel 58. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	81	82.34	101.65	Sangat Baik

Tabel 101. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%); dan
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%);
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%); dan
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%);
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%); dan
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%);
 - b. Kualitas evaluasi (5%); dan
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%); dan
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta didapatkan hasil sebagai berikut :

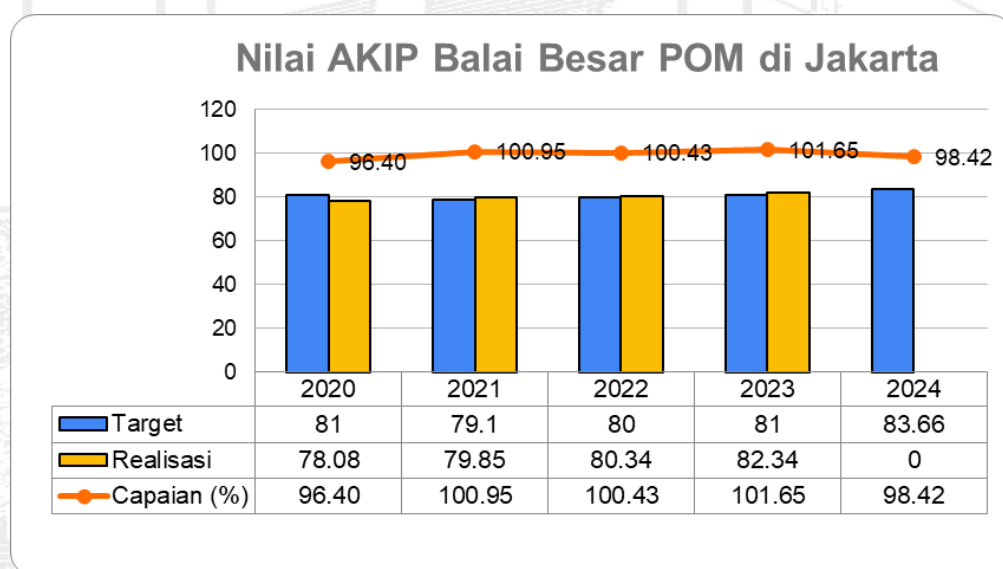
No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,96	18,96
2.	Pengukuran Kinerja	24	19,20	19,20
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,80	10,08
4.	Evaluasi Internal	20	16,00	15,80
5.	Capaian Kinerja	20	15,38	18,30
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,34	82,34
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Tabel 102. Tingkat Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta berhasil memperoleh kategori nilai A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan kategori capaian kinerja “SANGAT BAIK”.

25.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024

Balai Besar POM Jakarta berupaya mencapai target jangka menengah tersebut dengan mengembangkan berbagai inovasi dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Indikator AKIP Balai Besar POM Jakarta ini mendukung Indikator AKIP Badan POM pada sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama Badan POM yang efektif”.

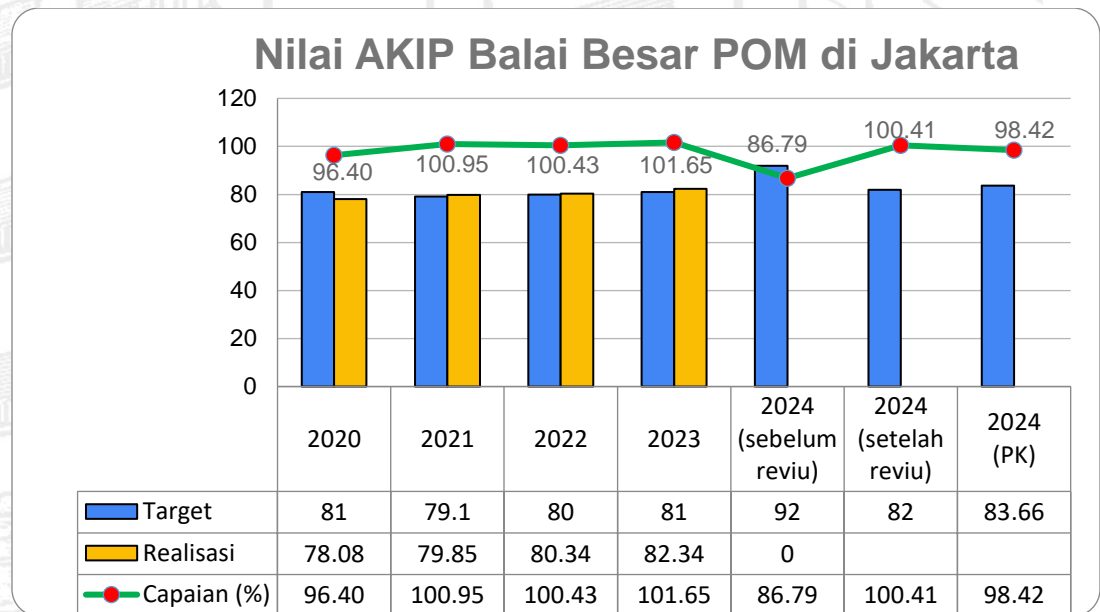


Gambar 84. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024.

Berdasarkan grafik diatas, nilai AKIP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2020, dan berhasil terus melampaui target sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM Jakarta berkomitmen untuk selalu mencapai target akuntabilitas kinerja. Meningkatnya capaian nilai AKIP Tahun 2023 terutama disebabkan oleh bertambahnya nilai komponen capaian kinerja. Hal ini ikut mendukung tercapainya predikat kinerja Istimewa untuk Balai Besar POM di Jakarta.

25.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Pada akhir periode Renstra RPJMN 2020-2024, target nilai AKIP ditetapkan 83.66. Berikut ditampilkan pula perbandingan capaian Tahun 2023 disandingkan dengan target sebelum reuiu Rencana Trrategis, setelah reuiu Rencana Strategis dan Target Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.



Gambar 85. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

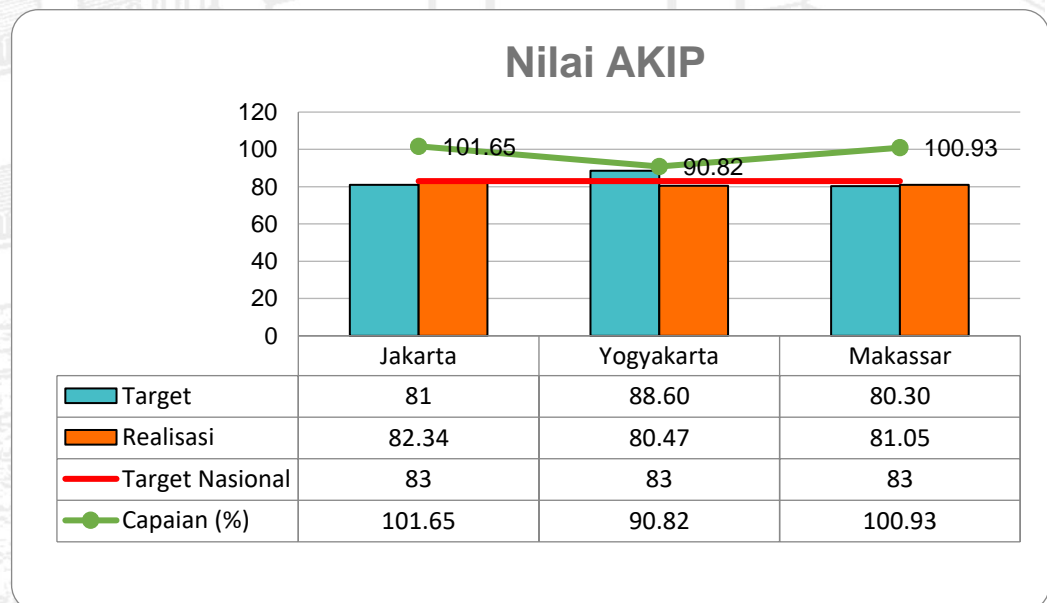
Target Tahun 2024 pada Rencana Strategis sebelum reuiu dan Perjanjian Kinerja menunjukkan nilai yang cukup tinggi sehingga apabila di sandingkan dengan capaian Tahun 2023, memberikan hasil dengan

kriteria Akan Tercapai. Sedangkan untuk Target setelah reviu menunjukkan hasil Tercapai. Peningkatan target untuk Tahun 2024 sesuai perjanjian kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan perbaikan berkelanjutan. Tabulasi perkiraan capaian terhadap target 2024 sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum Reviu	82.34	92	86.79	Akan Tercapai ▲
Setelah Reviu	82.34	82	100.41	Tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	82.34	83.66	98.42	Akan Tercapai ▲

Tabel 103. Tabulasi Perkiraan Capaian Terhadap Target 2024 Sesuai Rencana Strategis

25.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Nilai AKIP tertinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan nilai 82.34 dan berturut-turut Balai Besar POM Makassar dan Balai

Besar POM di Yogyakarta. Capaian nilai AKIP untuk ketiga Balai ini belum mampu melampaui target nasional.

25.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Terdapat peningkatan nilai komponen capaian kinerja yang cukup signifikan pada Tahun 2023 sebesar 2.92 poin. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, hal-hal yang berhasil meningkatkan nilai AKIP, yaitu:

1. Perencanaan

Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), dengan penyelarasan (cascading) indikator kinerja hingga setiap level dan telah disusun rencana aksi perjanjian kinerja yang dilengkapi perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja serta telah dilakukan reviu renstra dalam rangka upaya perbaikan perencanaan kinerja.

2. Pengukuran

Dalam rangka pengukuran kinerja, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, telah terdapat manual IKU untuk mengukur target pada PK dan RAPK setiap bulan dan triwulan dan telah menyusun SOP mikro pelaporan data kinerja

3. Pelaporan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta telah disusun secara triwulanan dan tahunan dengan menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, target jangka menengah, dan capaian kinerja Satuan kerja yang setara.

4. Evaluasi internal

Balai Besar POM di Jakarta telah melaksanakan evaluasi internal atas kinerja setiap triwulanan dengan menyajikan data realisasi dan capaian kinerja serta rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja.

5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2023 lebih tinggi 50% dari capaian kinerja tahun 2022.

25.6 Upaya Perbaikan

Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja nilai AKIP pada tahun 2024. Hal hal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan analisis kertas kerja penetapan target disusun dengan lebih cermat
2. Memastikan target yang ada pada dokumen perencanaan telah selaras (dokumen Reviu Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).
3. Memastikan perubahan berupa penambahan Indikator Kinerja dijelaskan secara detail pada Laporan Kinerja
4. Memastikan seluruh Indikator Kinerja Unit pada Matriks Pembagian Peran dan Hasil telah diturunkan sampai kepada anggota tim
- 5.

25.7 Analisis Program yang menunjang keberhasilan

Meningkatnya Nilai AKIP dihasilkan oleh kesinambungan program dan kegiatan yang menunjang diantaranya:

1. Dialog kinerja yang dilaksanakan secara aktif antara Pimpinan Unit, Ketua Tim dan Anggota Tim
2. Rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan berkala setiap bulan untuk membahas capaian, kendala beserta tindak lanjut perbaikannya
3. Komunikasi intensif terkait pengelolaan kinerja melalui grup diskusi
4. Peningkatan kompetensi personal dilakukan secara kontinu
5. Penggunaan matriks data online untuk memudahkan pengisian dan pemantauan data kinerja

25.8 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun 2022 telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan telah berdampak terhadap kenaikan nilai AKIP, dijelaskan sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pembaharuan publikasi data terbaru pada subsite Balai Besar POM di Jakarta berupa Laporan Kinerja Interim Triwulan I,II,III, dan IV Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Interim	Selesai	Pemutakhiran data pada subsite BBPOM di Jakarta	Jakarta-Desember 2023	Data terbaru terkait pengelolaan kinerja belum tersedia	Data pengelolaan kinerja telah dimutakhirkan secara konsisten di subsite
2	Tersedia justifikasi yang memadai atas perubahan IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Selesai	Menyusun justifikasi atas perubahan IKU	Desember 2023	Justifikasi perubahan IKU belum memadai	Telah disusun justifikasi yang cukup terhadap perubahan IKU
3.	Batasan waktu pada setiap aktivitas proses dalam rangka pengukuran kinerja pada SOP Pengumpulan Data Kinerja belum ditetapkan dengan akurat	Selesai	Melakukan revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja	Juli 2023	Aktivitas proses belum terkendali dengan baik	Revisi batasan waktu pada setiap aktivitas proses dalam rangka

4.	<i>Penyempurnaan mekanisme perbaikan data apabila ada kesalahan penyampaian data kinerja dan siapa yang memiliki otoritas apabila terdapat kesalahan penyampaian</i>	<i>Selesai</i>	<i>Revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja</i>	<i>Juli 2023</i>	<i>Pengaturan perbaikan data belum diatur dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja</i>	<i>pengukuran kinerja pada SOP telah dilakukan Telah dilakukan revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja yang memuat Penyempurnaan mekanisme perbaikan data</i>
5.	<i>Pengukuran dan penilaian capaian kinerja dilakukan sebagai dasar pemberian reward and punishment pada triwulan I,II,III, dan IV Tahun 2023</i>	<i>Selesai</i>	<i>Menetapkan reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja</i>	<i>Januari-Desember 2023</i>	<i>Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment</i>	<i>Bertambahnya motivasi untuk meningkatkan kinerja dengan adanya sistem reward dan punishment yang jelas</i>

Tabel 104. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

25.9 Informasi pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Capaian kinerja Nilai AKIP menentukan capaian BBPOM di Jakarta secara keseluruhan, sehingga strategi pencapaiannya harus berdasarkan data yang akurat.

3.11.SASARAN STRATEGIS IX

Capaian sasaran strategis IX, yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Jakarta yang Berkinerja Optimal terdiri dari 1 (satu) indikator sebagai berikut:

26. Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

26.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini adalah realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Kriteria
Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	84,75	90,92	107,28	Sangat Baik

Tabel 105. Realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami dengan menggunakan form survei sesuai Permen

PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta. Adapun bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

1. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
2. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
3. Kinerja memiliki bobot 30% (empat puluh persen); dan
4. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

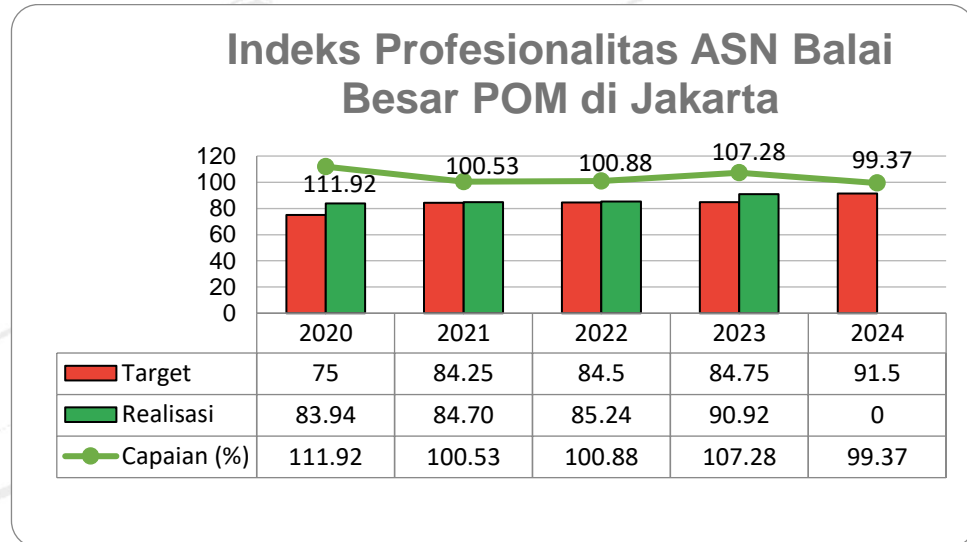
1. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
2. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
3. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
4. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
5. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2023 termasuk pada kategori tinggi. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di lingkungan BPOM dilakukan dengan menggunakan aplikasi IP-ASN yang terintegrasi dengan data-data kepegawaian yang terdapat dalam aplikasi SIASN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2023 adalah 90,92 dengan capaian 107,286% pada kategori “Sangat Baik”.

26.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024

Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk mengukur sasaran strategis terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal. Terdapat penyesuaian target Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan reuiu renstra yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.11A5.12.21.13478 tanggal 18 November 2021.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020 hingga 2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 87. Grafik Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Target pada tahun 2023 adalah 84,75 dengan realisasi sebesar 90,92 sehingga capaian 107,28%. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahun sejak tahun 2020 hingga 2023 realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dapat melampaui target. Konsistensi dalam implementasi seluruh dimensi pengukuran indeks profesional di Balai Besar POM di Jakarta dapat meningkatkan capaian hingga tahun 2023. Telah dilakukan reviu terhadap target tahun 2024 semula 85 menjadi 91.5. Hal ini selaras dengan kondisi SDM BBPOM di Jakarta pada tahun 2024 akan terdapat pegawai yang telah selesai ditingkatkan Pendidikannya dan juga pejabat struktural yang telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan sehingga dapat meningkatkan capaian dari tahun 2023.

26.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra



Target Indeks Profesionalitas ASN mengalami beberapa perubahan pada Rencana Strategis. Pada awal RPJMN ditetapkan, target Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 yang ditetapkan tidak terlalu tinggi sehingga capaiannya adalah 111,92. Mengingat pada tahun 2020 capaiannya tinggi dan mendekati 120%, maka dilakukan penyesuaian target pada revidi renstra di tahun 2021 menjadi 84,25. Target pada tahun 2023 sebesar 84,75 dan realisasi 90,92 serta capaian 107,28%.

Target indeks profesionalitas ASN pada tahun 2024 sebelum review adalah 85 dan hasil setelah review tidak mengalami perubahan target. Melihat capaian di tahun 2023 yang cukup tinggi yaitu sebesar 90,92 maka target indeks profesionalitas ASN pada tahun 2024 yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dinaikkan menjadi 91,5. Dengan kenaikan target ini, perkiraan capaian dengan menggunakan perbandingan realisasi tahun 2023 dan target tahun 2024 sesuai perjanjian kinerja sebesar 99.37 dengan kategori “Akan Tercapai”. Mengingat target yang cukup tinggi, diupayakan berbagai strategi peningkatan Indeks Profesionalitas ASN diantaranya mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk pejabat struktural serta terus mendorong peningkatan pendidikan formal untuk pegawai.

Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut :

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum Reviu	90,92	85	106,96	Tercapai ▲
Setelah Reviu	90,92	85	106,96	Tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	90,92	91,5	99,37	Akan Tercapai ▲

Tabel 106. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023

26.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai setara lainnya dan target nasional

Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN antara Balai Besar POM di Jakarta dan UPT pembanding serta target nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Berdasarkan Gambar 89, dapat diketahui bahwa indeks profesionalitas ASN pada tahun 2023 antara Balai Besar POM di Jakarta dan UPT pembanding lainnya realisasi tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta sebesar 90,92. Capaian tertinggi sebesar 116,86 oleh Balai Besar POM di Makassar. Realisasi Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Yogyakarta

menunjukkan hasil yang sangat baik, sedangkan Balai Besar POM di Makassar menunjukkan hasil “Baik”. Capaian kinerja ketiga Balai telah melampaui target nasional sebesar 85.

26.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja

Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dapat melampaui target yang ditetapkan dikarenakan Balai Besar POM di Jakarta terus melakukan upaya peningkatan yang dapat diukur melalui dimensi penilaian Indeks Profesionalitas, diantaranya:

1. Pada dimensi kualifikasi, tahun 2023 terdapat 1 orang pegawai yang telah lulus tugas belajar dari Diploma III ke S1, sehingga dapat meningkatkan nilai IP. Selain itu, pegawai yang telah duduk dalam jabatan fungsional tertentu juga telah lulus mengikuti diklat fungsional, serta Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Jakarta telah mengusulkan 4 orang pegawai untuk melaksanakan tugas belajar dan telah disetujui usulannya, sehingga dapat meningkatkan nilai IP pada dimensi kualifikasi melalui peningkatan pendidikan formal.
2. Pada dimensi kompetensi, seluruh pegawai telah diwajibkan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui diklat teknis maupun kegiatan pengembangan kompetensi lain melalui seminar, workshop, bimtek sesuai dengan bidang jabatannya. Pada tahun 2023, seluruh pegawai telah melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga dilakukan monitoring pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis baik dilakukan secara luring maupun daring dengan memanfaatkan platform IDEAS pada *subsite* Pusat Pengembangan SDM POM.
3. Pada dimensi kinerja, dilakukan pemantauan peningkatan kinerja pegawai melalui evaluasi pencapaian sasaran kinerja pegawai yang dilakukan setiap triwulan kepada seluruh pegawai BBPOM di Jakarta. Pada tahun 2023 telah dilakukan pembinaan kinerja dan

bimbingan kinerja setiap pegawai untuk mengetahui ketercapaian atau hambatan dalam pencapaian target kinerja individu. Hasil penilaian kinerja pegawai pada tahun 2023, terdapat 5 orang pegawai dengan predikat kinerja Sangat baik dan 116 pegawai dengan predikat kinerja Baik.

4. Pada dimensi Disiplin, telah dilakukan Upaya Pemberian *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, antara lain terkait absensi dan pelaporan daftar hadir secara tepat waktu. Pada tahun 2023, tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat etrkait pelanggaran terhadap kepatuhan jam kerja dan kode etik.

26.6 Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target

Target kinerja indeks profesionalitas ASN yang telah terlampaui dapat tercapai melalui beberapa kegiatan/program diantaranya:

1. Tugas belajar sebanyak 7 orang yang sedang berlangsung pada tahun 2023 serta Pengusulan tugas belajar kepada 4 orang pegawai di tahun 2023 dan telah disetujui oleh Badan POM untuk peningkatan kualifikasi pendidikan formal.
2. Menyelenggarakan bimtek teknis dan manajerial sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh pegawai dan menugaskan pegawai untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh instansi pusat maupun instansi lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
3. Melakukan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis baik dilakukan secara luring maupun daring dengan memanfaatkan platform IDEAS pada subsite Pusat Pengembangan SDM POM;
4. Melakukan pemantauan kinerja pegawai melalui evaluasi pencapaian sasaran kinerja pegawai yang dilakukan setiap triwulan kepada seluruh pegawai BBPOM di Jakarta, serta melaksanakan bimbingan kinerja kepada setiap pegawai yang dilakukan minimal 1 tahun sekali.

5. Pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, antara lain terkait absensi;
6. Menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan karier pegawai serta manajemen talenta.

26.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja

Dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang menunjang keberhasilan diantaranya adalah tercapainya pengembangan kompetensi dengan target 20 Jam Pelajaran untuk seluruh pegawai serta diklat teknis fungsional yang wajib diikuti bagi pegawai yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu. Selain itu, nilai sempurna pada dimensi disiplin karena seluruh pegawai telah tertib dalam pencatatan kehadiran maupun menjalankan kode etik sebagai PNS, sehingga tidak ada hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai.

Hal ini dapat tercapai dengan adanya inovasi hukuman disiplin berupa IKRAR MANTAN TELATAN yang telah dilaksanakan selama 2 tahun berturut turut dan program tersebut efektif sebagai pencegahan pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja agar dapat diantisipasi supaya tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

Pelaksanaan pemberian IKRAR MANTAN TELATAN sebagai Upaya monitoring yang lebih ketat terhadap pelanggaran disiplin dengan memberikan hukuman berupa penandatanganan surat pernyataan tidak mengulangi keterlambatan untuk pegawai yang melebihi 1,5 jam keterlambatan tiap bulannya sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Implementasi inovasi ini terbukti efektif dapat mencegah akumulasi pelanggaran disiplin pegawai di akhir tahun

26.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan inovasi dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Disiplin Pegawai. Dalam rangka memitigasi risiko pegawai terhadap penjatuhan hukuman disiplin terkait pelanggaran kepatuhan jam kerja, implementasi inovasi

IKRAR MANTAN TELATAN, sebagai upaya Tindakan pengendalian dapat terus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi seluruh pegawai.

26.9 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Capaian target pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai sebanyak 20 Jam Pelajaran merupakan target kuantitatif yang mungkin tidak berdampak langsung terhadap kompetensi pegawai dan kinerja organisasi. Selain itu capaian pengembangan kompetensi untuk diklat fungsional yang wajib diikuti oleh seluruh pejabat fungsional yang telah diangkat dalam jabatan fungsionalnya perlu dilakukan monitoring secara berkala.

Peta kompetensi yang telah disusun, perlu dilakukan pemutakhiran dan monitoring untuk memenuhi gap kompetensi pegawai agar tercapai kemampuan teknis sesuai penugasan dan kompetensi manajerial sosiokultural sesuai jenjang jabatan.

3.12. SASARAN STRATEGIS X

Capaian sasaran strategis X, yaitu menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (Good Laboratory Procedure)

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

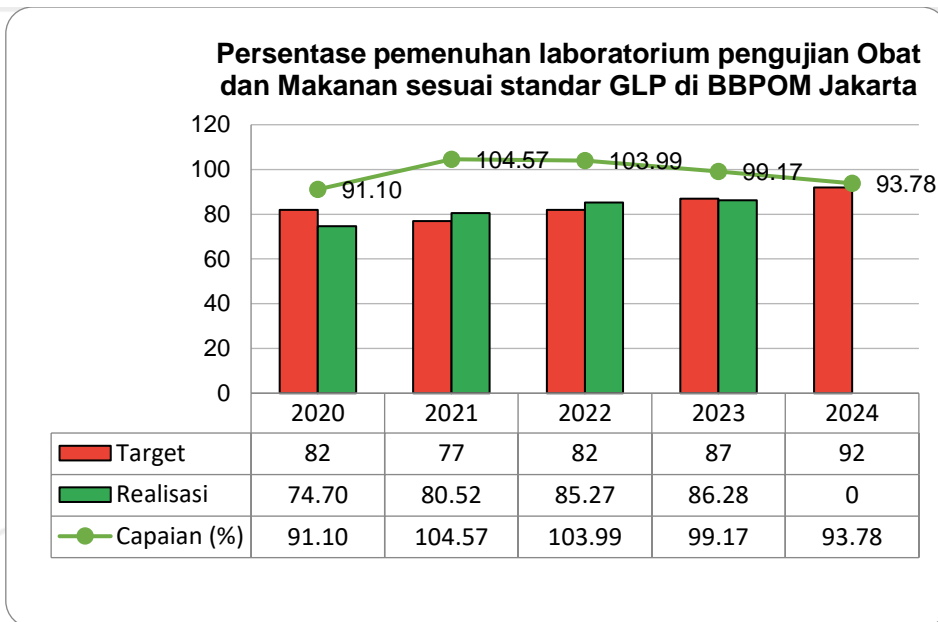
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Kategori Capaian
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87	86,28	99,17	Cukup
---	---	----	-------	-------	--------------

Tabel 107. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023

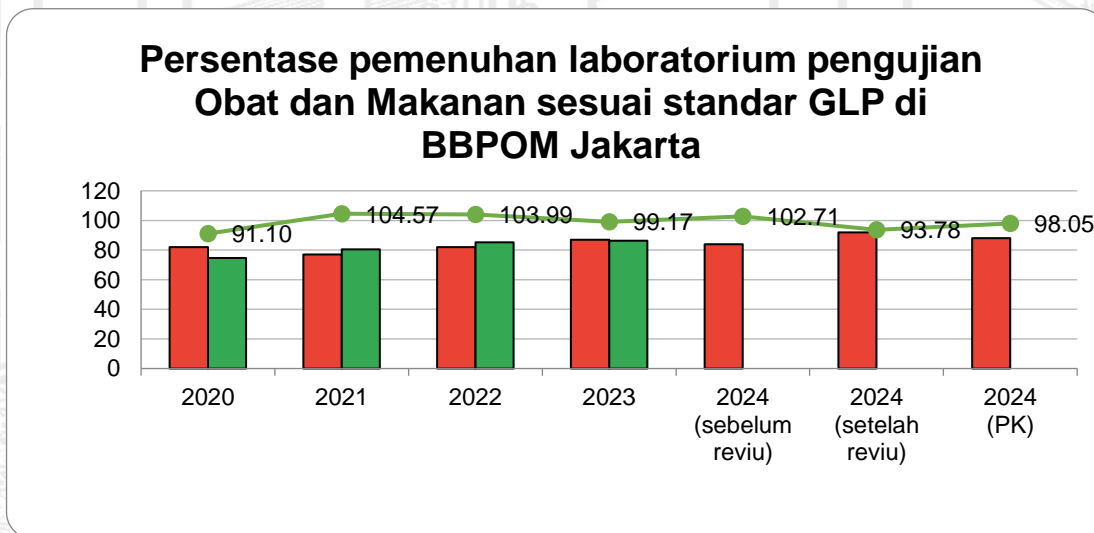
Persentase pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebesar 86.28% dengan kriteria “Akan tercapai”, belum memenuhi target SKL BBPOM di Jakarta tahun 2023 sebesar 87%. Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan Laboratorium, dan Standar Kompetensi Personel Laboratorium.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2020-2022



Gambar 90. Perbandingan realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, capaian tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021, namun realisasinya mengalami peningkatan. Perubahan konsep Regionalisasi Laboratorium menyebabkan terjadi transfer alat dari BBPOM di Jakarta ke BBPOM di Semarang dan penyesuaian Standar Ruang Lingkup, sehingga capaian menurun.



c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

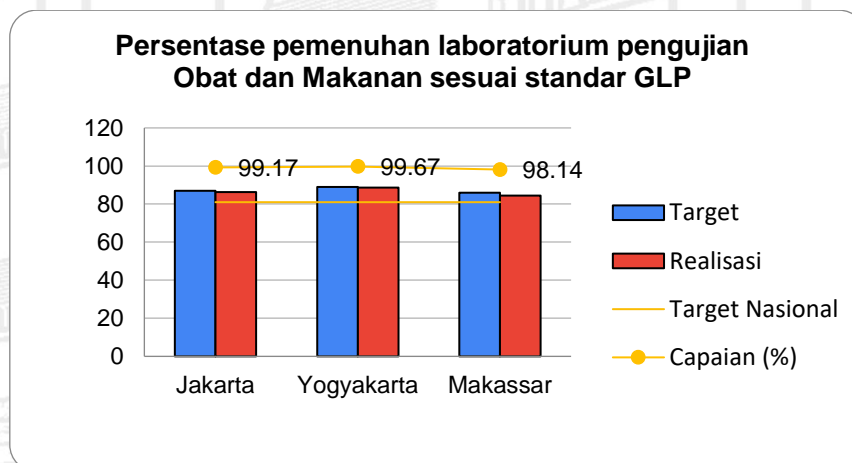
Target presentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan

sesuai standar GLP pada awal RPJMN ditetapkan 84%, Namun, capaian tahun 2023 sebesar 95,86% (akan tercapai) maka dilakukan penyesuaian target menjadi 92%. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP menjadi 88%. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan sebagai berikut:

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	86,28	84	102.71	akan tercapai ▲
Setelah Review	86,28	92	93.78	akan tercapai ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	86,28	88	98,05	akan tercapai ▲

Tabel 108. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023

d. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dibandingkan balai lain yang setara



Gambar 92. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/ setara

Berdasarkan Gambar 92, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023 yang tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta yang terendah adalah BBPOM Makassar. Dari ketiga BBPOM, belum ada yang memenuhi target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan penilaian kemampuan laboratorium yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) pada akhir Desember 2023, Balai Besar POM di Jakarta mendapat hasil penilaian untuk presentase pemenuhan SKL laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebesar 86.28% dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan SRL : 85.45%
2. Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi : 94.86%
3. Persentase Pemenuhan Standar Peralatan : 78.52%

Dengan adanya konsep baru regionalisasi laboratorium, BBPOM di Jakarta khususnya Laboratorium obat mengalami perubahan kelas terapi yang harus diuji, sehingga capaian pemenuhan ruang lingkup dari kelas terapi sebelumnya tidak terhitung lagi namun harus menambah capaian ruang lingkup pengujian dengan kelas terapi yang baru. Hal ini menyebabkan capaian pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup menurun.

Adanya pemindahan alat laboratorium berteknologi tinggi dari BBPOM di Jakarta ke BBPOM di Semarang juga menurunkan capaian pemenuhan terhadap Standar Peralatan.

BBPOM di Jakarta terus berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Usaha yang dilakukan pada triwulan IV untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium secara ketat.
- Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melaksanakan verifikasi metode analisis dan pengujian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
- Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN.
- Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023 tahun 2023:

Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87.00	86.28	99.17	5,809,067,000	5,808,842,019	100.00	0.99	-0.01	75% (tidak efisien)

Tabel 109. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2023 tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada presentase realisasi anggaran 2023. Anggaran 2023 mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, namun tidak maksimal karena terjadi perubahan-perubahan akibat penyesuaian terhadap Konsep Baru Regionalisasi Laboratorium.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- Adanya pergeseran kelas terapi yang diuji Laboratorium Obat BBPOM di Jakarta sesuai dengan konsep baru regionalisasi Laboratorium yang mulai efektif dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023. Kelas terapi organ sensorik, dan antineoplastic menjadi kelas terapi dermatologis.
- Konsep Regionalisasi Laboratorium menambah luasnya daerah / lokasi sampling sehingga menambah jenis sample dan sediaan yang diuji oleh Laboratorium Obat BBPOM di Jakarta dan ruang lingkup pengujian bertambah.
- Menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- Melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan

bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat. Dengan kegiatan verifikasi Metode Analisis ini diharapkan persentase pemenuhan ruang lingkup akan meningkat.

- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya. Dengan terpeliharanya alat laboratorium maka akan mendukung pemenuhan terhadap standar peralatan. dapat Pemanfaatan Alat laboratorium secara maksimal dan tepat untuk menjamin kelayakan alat laboratorium juga mendukung hal tersebut.
- Peningkatan presentase pemenuhan standar peralatan secara cepat agak sulit dicapai, karena kondisi luas ruangan laboratorium BBPOM di Jakarta yang kurang memungkinkan untuk penambahan jumlah alat yang sesuai standar. BBPOM di Jakarta harus mengidentifikasi kembali alat-alat laboratorium yang sudah kurang berfungsi untuk diremajakan atau diganti dengan pengadaan alat lain yang lebih dibutuhkan sesuai perkembangan terkini. Perencanaan pengadaan alat harus mengacu pada Standar Peralatan yang telah ditetapkan.
- Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian.
- Menjadi penyelenggara Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian dan menambah kompetensi personel pengujian.

h. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai*	Belum**

			Rencana Aksi	Timeline
1	Penambahan ruang lingkup pengujian	Sudah dilaksanakan	Program regionalisasi Laboratorium (khususnya Laboratorium Obat) menambah standar kemampuan laboratorium	Akhir tahun 2023
		Sudah dilaksanakan	Menjadi penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium: 1. Penetapan Kadar Cefiksim untuk suspense oral 2 Identifikasi Heksaklorofen dalam Sediaan Kosmetik secara KCKT PDA, 3. Identifikasi Sildenafil Tadalafil Vardenafil dalam Obat tradisional sediaan padat 4. PK Sulfit dalam kecap	Akhir tahun 2023
		Sudah dilaksanakan	Verifikasi Metode Analisis yang belum pernah dilakukan antara lain: (PK Gemcitabin dalam serbuk injeksi)	Akhir tahun 2023
		Sudah dilaksanakan	Mengikuti Program Uji Profisiensi	Akhir tahun 2023
2	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan	Sudah dilaksanakan	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Akhir tahun 2023

teknis secara secara internal maupun eksternal.			
--	--	--	--

Tabel 110. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan dan usulan pengadaan alat laboratorium dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

27.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2.5	3	120	Sangat Baik

Tabel 111. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen berikut:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC (*BPOM Command Centre*);
 1. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
 2. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

3. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan;
 4. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran;
 5. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
1. Balai: e-mail, *sharing folder*, *dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai; dan

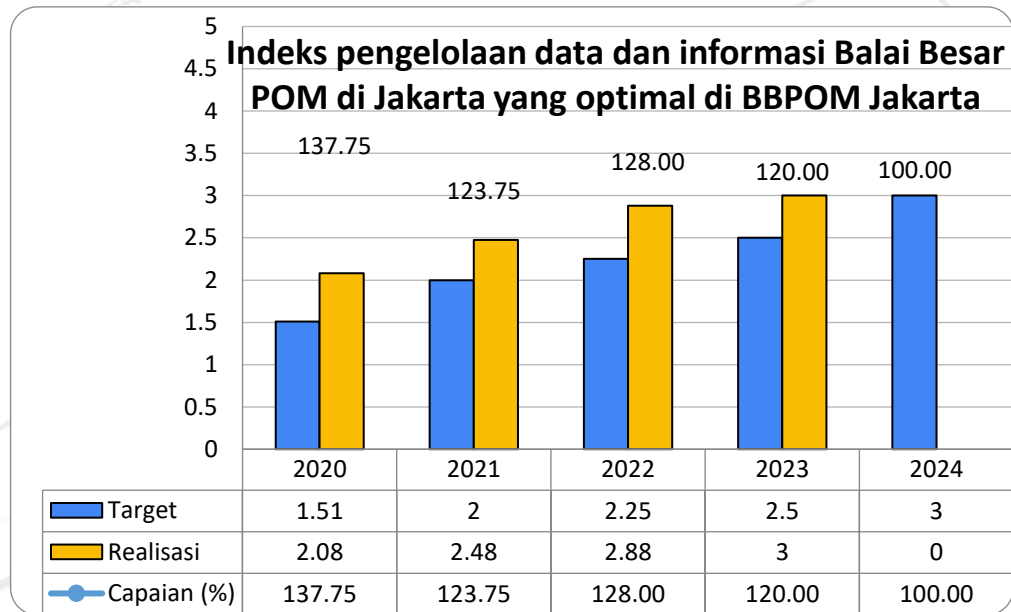
Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan, kriteria yang digunakan adalah:

1. 2,26 – 3 : Optimal
2. 1,51 – 2,25 : Cukup
3. 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
4. 0 – 0,75 : Sangat Kurang

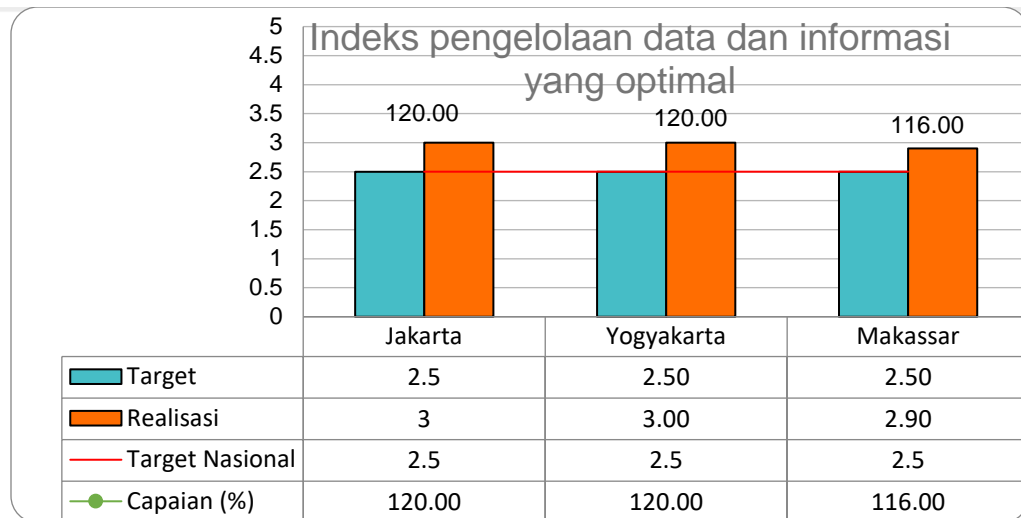
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal telah melampaui target yang ditetapkan, realisasi di triwulan keempat sebesar 3 dengan kriteria “SANGAT BAIK”. Hal ini menunjukkan selama periode Januari sampai Desember 2023, jumlah akses data dalam satu bulan Balai Besar POM di Jakarta telah memenuhi untuk SIPT, SPIMker, *e-mail*, *sharing folder*, *dashboard* BCC dan berita aktual.

27.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024



Sejak ditetapkan pada tahun 2020, BBPOM di Jakarta secara konsisten melampaui target kinerja yang diberikan pada Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Target yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan *tools* untuk memastikan unit kerja Menyusun strategi yang efektif untuk pencapaian target. Pada akhir periode RPJM Tahun 2024, ditetapkan target Unit Pelaksana Teknis pada kriteria 3. Meninjau realisasi Tahun 2023 yang telah memenuhi target optimal pada nilai 3, merupakan indikator bahwa BBPOM di Jakarta telah memiliki strategi yang efektif untuk pencapaian optimal. Sehingga diperkirakan target pada Tahun 2024 akan tercapai.

27.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara

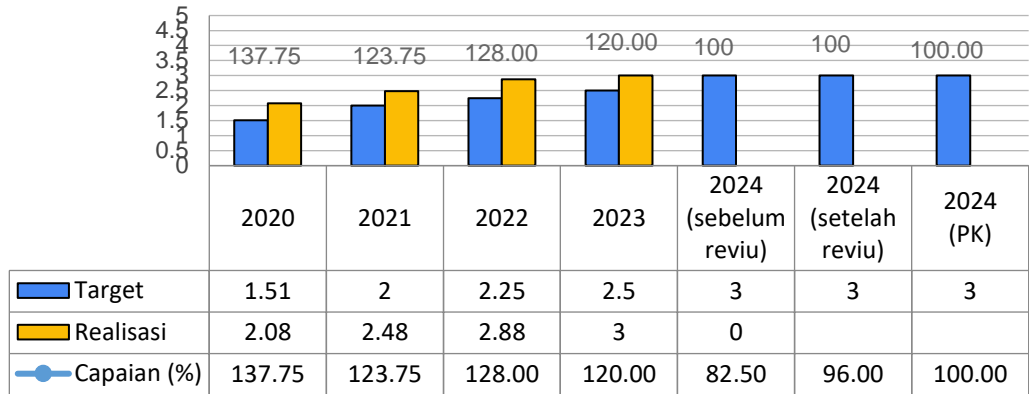


Gambar 94. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2023 untuk ketiga Balai menunjukkan telah melampaui target. BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta telah memperoleh nilai maksimal 3. Sedangkan BBPOM di Makassar memperoleh nilai 2.9 Realisasi kinerja Balai Besar POM di Jakarta berada di atas target nasional, demikian juga dengan realisasi Balai Besar lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pengelolaan Data dan Informasi perlu menetapkan formulasi baru untuk mengukur capaian kinerja yang lebih SMART.

27.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal di BBPOM Jakarta



Gambar 95. Grafik Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Jakarta yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Target kinerja indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal pada sebelum, sesudah renstra dan berdasarkan perjanjian kinerja adalah 3, yaitu nilai tertinggi dari pengukuran indeks. Berdasarkan realisasi Tahun 2023, maka pada semua target Tahun 2024 sebelum, sesudah dan Perjanjian Kinerja, menunjukkan kriteria tercapai/terlampaui.

Periode Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian	Kategori
Sebelum review	3	3	100	Tercapai/Melampaui ▲
Setelah Review	3	3	100	Tercapai/Melampaui ▲
Sesuai Perjanjian Kinerja	3	3	100	Tercapai/Melampaui ▲

Tabel 112. Target Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Berdasarkan Realisasi 2023 dan Target 2024

27.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemantauan indeks pengelolaan data dan informasi dilakukan oleh Tim Teknologi Informasi yang tercantum dalam SK Tim IT Balai Besar POM di Jakarta. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indeks melalui rapat evaluasi bulanan. Masing masing penanggung jawab telah memahami dengan baik tugas fungsinya sehingga pelaksanaan rencana kerja menjadi lebih optimal.

27.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Balai Besar POM di Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi;
2. Program pemanfaatan email corporate secara berkala oleh setiap pegawai dalam pengiriman link apel setiap minggunya telah berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara maksimal;
3. Pemanfaatan *sharing folder* dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk;
4. Pemanfaatan *sharing folder* sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks maksimal;
5. Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita aktual/bulan dengan masing-masing minimal 101 viewer/berita aktual;

6. Verifikasi dan tindak lanjut petugas aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal.
7. Monitoring dan evaluasi terhadap input SIPT dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ketuntasan pelaporan
8. Peningkatan kompetensi dilaksanakan secara konsisten dan berkala untuk tim IT. Telah dilaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan SPBE Internal pada 28 November 2023 dengan narasumber Kepala Pusat Data dan Informasi Badan POM serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 28 November 2023.

27.7 Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya (internal maupun eksternal)

Rekomendasi terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Balai Besar POM di Jakarta. Kerjasama semua pegawai terkait dalam pengelolaan akun sosial media telah memberikan dampak positif untuk menjangkau pegawai senior agar lebih melek teknologi.

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, pendekatan dan sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di tahun berikutnya.

27.8 Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan penetapan parameter pengukuran baru untuk Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang lebih SMART agar dapat memberikan peningkatan berkelanjutan.

3.13.SASARAN STRATEGIS XI

Capaian sasaran strategis XI, yaitu terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

1. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan realisasi capaian dengan target tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	<i>Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta</i>	93,7	92,5	98,72%	Cukup

Tabel 113. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

*Data per 10 Juli 2023

Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran. Capaian atas pengelolaan anggaran tersebut merupakan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) kementerian negara/lembaga yang meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan/ atau aspek konteks. Adapun capaian atas indikator kinerja anggaran merupakan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) kementerian negara/Lembaga.

Nilai EKA kementerian negara/lembaga dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

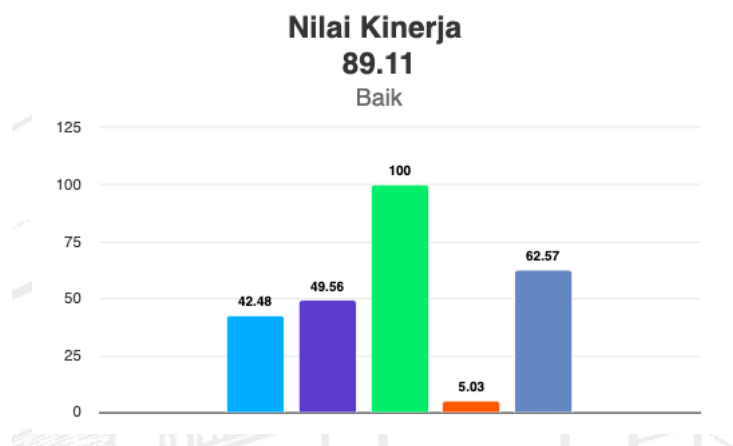
Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada laporan kinerja ini, evaluasi kinerja anggaran dibahas berdasarkan aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut: capaian *output*, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Bobot Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator yaitu:

No	Indikator	Bobot
1	Capaian Output	43,5%
2	Efisiensi	28,6%
3	Konsistensi Penyerapan Anggaran	18,2%
4	Penyerapan Anggaran	9,7%

Tabel 114. Bobot Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dihitung berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA dapat dilihat pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), sedangkan nilai IKPA dapat diakses melalui Aplikasi Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

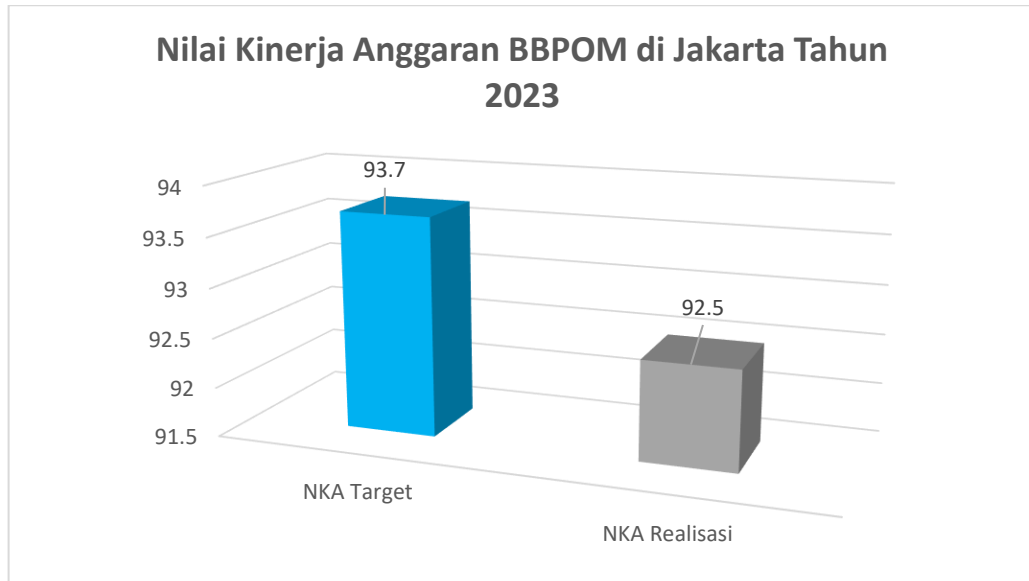
Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	175	063	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100.00	83.35	98.15	100.00	97.98	98.17	100.00	100.00	97.58	100%	97.58
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.34	19.63	10.00	9.80	9.82	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.68		98.86					100.00			

Gambar 97. Nilai IKPA BBPOM Jakarta tahun 2023 pada aplikasi OMSPAN

b. Perbandingan realisasi capaian dengan target tahun 2023

Target indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta” pada tahun 2023 ini adalah 93,7 dengan realisasi indikator sebesar 92,50 dengan capaiannya yaitu 98,72% dan termasuk kriteria “Cukup”. Oleh karena itu diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian selanjutnya hingga akhir tahun 2023 agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.



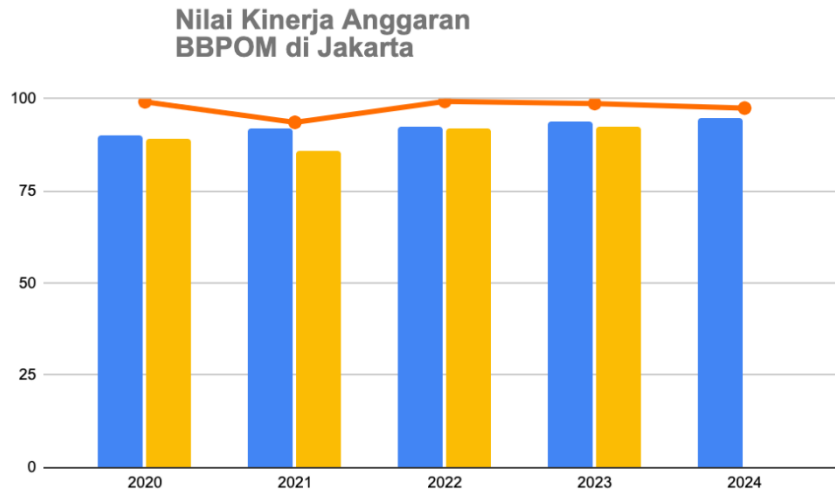
Gambar 98. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Tahun 2023 pada IKU Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun-tahun sebelumnya (2020-2022)

Perbandingan realisasi dan capaian tahun-tahun sebelumnya pada indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta menunjukkan bahwa realisasi indikator pada tahun 2023 sebesar 92,50 meningkat dari tahun 2020-2022. Untuk capaian terlihat fluktuatif dengan capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2022 sebesar 99,29%. Penurunan capaian di tahun 2022 disebabkan karena belum optimalnya nilai IKPA dan kurangnya nilai efisiensi pada EKA. Oleh karena itu diperlukan monitoring dan evaluasi realisasi capaian pada hingga akhir tahun 2024 agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2020	90	89,26	99,18	Cukup
2	2021	91,9	86,03	93,61	Cukup
3	2022	92,5	91,84	99,29	Cukup
4	2023	93,7	92,5	98,72	Cukup
5	2024	89,9	-	-	

Tabel 115. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2023



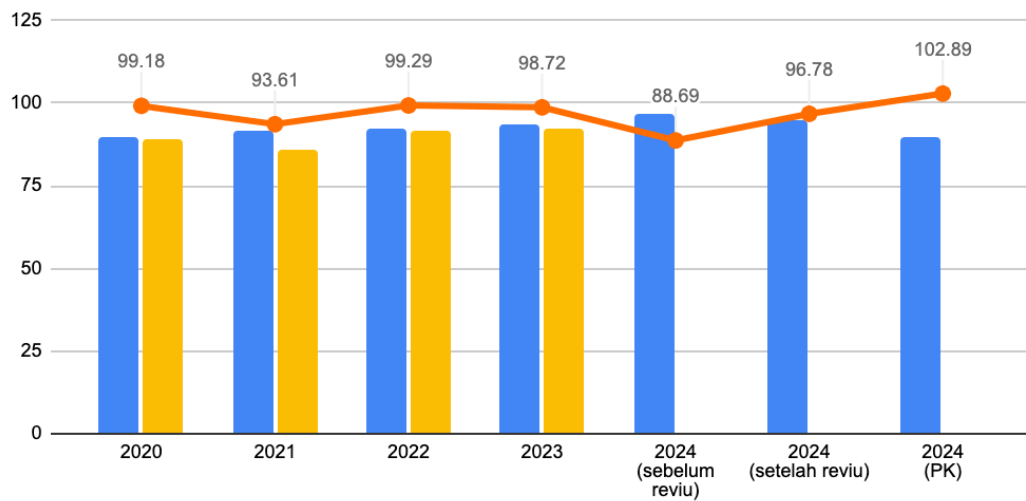
d. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra


Tidak ada perbedaan target untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta pada renstra awal (sebelum reviu renstra) dan reviu renstra. Namun, target jangka menengah untuk indikator nilai kinerja anggaran yang ditargetkan di tahun 2024 menurun dari tahun 2023 menjadi 89,90. Realisasi indikator pada tahun 2023 sebesar 92,50 meningkat dari tahun 2020-2022 dan menunjukkan proyeksi positif bahwa target 2024 yang ditetapkan pada renstra baik sebelum reviu, sesudah reviu dan yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja akan tercapai.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, maka realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan bahwa target akan tercapai di akhir periode renstra. Dengan demikian upaya yang telah diterapkan dalam indikator tersebut benar telah berkontribusi positif terhadap hasil yang diharapkan. Gambaran tersebut

dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 sehingga bisa mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta



No	Keterangan	Target jangka sebelum reviu renstra,	Target jangka menengah setelah reviu renstra	Target jangka menengah pada PK 2024
1	Realisasi 2023 (92,50)	94,90	94,90	89,90
2	Kategori	Akan tercapai 	Akan tercapai 	Akan tercapai 

Tabel 116. Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sebelum, Setelah dan pada PK 2024,

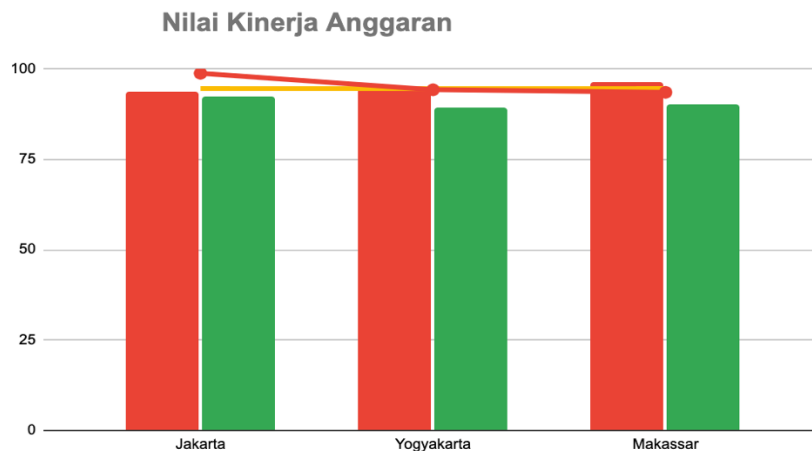
e. Perbandingan Realisasi terhadap Unit Kerja Lain

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai Besar POM di Yogyakarta dan Balai Besar POM di Makassar.

Kinerja 3 (tiga) UPT ini disajikan pada grafik di bawah ini. Berdasarkan realisasi tersebut, diketahui bahwa ketiga Balai Besar POM masuk dalam kategori “cukup” karena capaiannya yang berada dalam rentang 70% -100%.

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta pada tahun 2023 paling tinggi jika dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Makassar.

Perbandingan realisasi kinerja ini memberikan peluang pada UPT BPOM untuk bisa melakukan *benchmark* baik dalam mengatasi kendala yang dihadapi maupun untuk mitigasi resiko yang dapat menghalangi tercapainya target kinerja yang ditetapkan.



f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Variabel yang terkait dengan nilai EKA terutama dipengaruhi dengan optimalnya capaian *output* dan penyerapan. Selain itu, telah dilakukan upaya menurunkan deviasi halaman III DIPA untuk meningkatkan konsistensi.
2. Variabel yang terkait dengan nilai IKPA antara lain:
 - a. Penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual Non Belanja Pegawai tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai pada triwulan I. Terdapat dua tagihan yang terlambat karena kurangnya koordinasi internal, sehingga telah diupayakan meningkatkan koordinasi dan sinergi antarpihak terkait untuk penyelesaian pembayaran.
 - b. Terdapat deviasi deviasi yang cukup besar pada belanja modal bulan Februari dan Maret yang disebabkan percepatan realisasi pengadaan. Selain itu, penyesuaian Halaman III DIPA pada periode awal triwulan 3

tidak dapat dilaksanakan karena terbentur jadwal revisi pembukaan blokir anggaran. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan KIE tokoh masyarakat juga berkontribusi menyebabkan menurunnya/berkurangnya nilai Deviasi Halaman III DIPA.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang berpengaruh positif terhadap nilai kinerja anggaran adalah:

1. Pelaporan kepada KPPN secara tepat waktu terkait penyampaian data kontrak, LPJ, SPM;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan realisasi *output* secara berkala
3. Realisasi pada *output* BMB, QDC, QIC dan QIA yang melampaui target tahun 2023

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum **			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Perlu dilakukan penyusunan RPD dan monev pelaksanaan kegiatan secara akurat agar target	Selesai	-. Mengoptimalkan capaian output untuk meningkatkan nilai efisiensi	Desember 2023	Penyusunan RPD dilakukan pada saat	Penyusunan RPD disesuaikan secara berkala

	<i>RPD dapat tercapai</i>		<i>- Melaksanakan revisi halaman III DIPA</i>		<i>alokasi anggaran</i>	<i>sesuai jadwal</i>
--	---------------------------	--	---	--	-------------------------	----------------------

Tabel 117. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk menyusun strategi di tahun 2024, terutama sebagai bahan reviu dalam penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat.

Pemanfaatan sumber daya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran secara cermat dan tepat sehingga dapat mengatasi kendala dan tantangan yang masih akan dihadapi di tahun mendatang.

3.14. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten sesuai peraturan perundang undangan. Mengingat pentingnya pemerintahan yang akuntabel, perlu dilaksanakan penilaian secara independent oleh *trusted advisor* dalam hal ini adalah fungsi APIP yang dalam penugasannya dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM. Hasil penilaian ini harus ditindak lanjuti agar kinerja yang akuntabel terus meningkat. Berikut disampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1. Perencanaan Kinerja						
a.	Melakukan pembaharuan publikasi data sesuai data terbaru pada subsite Balai Besar POM di Jakarta.	Telah dilakukan pembaharuan publikasi data terbaru pada subsite Balai Besar POM di Jakarta berupa Laporan Kinerja Interim Triwulan I,II,III, dan IV Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Tahun 2022	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	Januari 2023	Tidak tersedia data laporan kinerja termutakhir pada subsite BBPOM di Jakarta	Pemutakhiran data laporan kinerja pada subsite BBPOM di Jakarta telah dilaksanakan secara periodik
b.	Menambahkan analisis dalam penetapan target kinerja berdasarkan database target populasi secara menyeluruh serta analisis sumber daya untuk penetapan target masing-masing indikator.	Penetapan target kinerja telah dibuat secara menyeluruh serta analisis sumber daya untuk penetapan terget masing-masing indikator	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	Januari 2023	Penetapan target tidak dilakukan berdasarkan analisis yang tepat sehingga menimbulkan risiko tidak terlaksananya tujuan pengawasan	Analisis penetapan target telah dilaksanakan secara menyeluruh sehingga capaian lebih optimal serta memberikan output dan outcome terbaik
c.	Melengkapi justifikasi yang memadai atas perubahan IKU didukung dengan data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.	Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2022 yaitu IKU "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" yang didukung data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	Januari 2023	Perubahan IKU tidak didukung data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan	Data yang andal telah disiapkan untuk mendukung justifikasi terkait perubahan IKU

2. Pengukuran Kinerja						
a.	Melakukan revisi batasan waktu pada setiap aktivitas proses dalam rangka pengukuran kinerja pada SOP Pengumpulan Data Kinerja Balai Besar POM di Jakarta.	Telah dilakukan revisi batasan waktu pada setiap aktivitas proses dalam rangka pengukuran kinerja pada SOP Pengumpulan Data Kinerja yang tertuang dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja tanggal 12 November 2022	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	November 2022	Mutu baku pada aktivitas proses pengumpulan data kinerja belum memadai	Batasan waktu telah ditetapkan dengan cermat untuk mengefektifkan pengumpulan data kinerja
b.	Menyempurnakan mekanisme perbaikan data apabila ada kesalahan penyampaian data kinerja dan siapa yang memiliki otoritas apabila terdapat kesalahan penyampaian data kinerja.	Telah dilakukan penyempurnaan mekanisme perbaikan data apabila ada kesalahan penyampaian data kinerja dan siapa yang memiliki otoritas apabila terdapat kesalahan penyampaian data kinerja.	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	November 2022	Mekanisme perbaikan data kinerja belum disusun dengan sempurna	Mekanisme perbaikan data kinerja telah disusun dengan baik untuk memberikan kejelasan terkait proses dan wewenangnya
c.	Melakukan sinkronisasi data antara laporan evaluasi internal dengan laporan kinerja interim.	Laporan kinerja interim dengan laporan evaluasi triwulan sudah dibuat selaras		April 2023		
3. Pelaporan Kinerja						
a.	Mengimplementasikan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment.	Telah dilakukan pengukuran dan penilaian capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment.pada triwulan I,II,III, dan IV Tahun 2022	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	November 2022	Belum dilaksanakan pemberian reward dan punishment secara konsisten terkait capaian kinerja	Pemberian reward dan punishment telah diberikan secara konsisten berdasarkan pengukuran dan penilaian capaian kinerja
b.	Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan atas RATL triwulan sebelumnya dengan RATL triwulan berikutnya serta melakukan analisis efektifitas rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.	Pada laporan kinerja telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut triwulan sebelumnya	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	Januari 2023	Belum tersedia monev RATL triwulan sebelumnya beserta analisis efektifitas rencana aksi	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut triwulan sebelumnya yang dituangkan dalam laporan kinerja
4. Evaluasi Internal						

a.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, jangka pendek dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.	Pada laporan kinerja di BAB III telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, jangka pendek dan target jangka menengah secara lengkap	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	Februari 2023	Belum tersedia format monitoring dan evaluasi secara periodik atas target kinerja triwulan, jangka pendek dan jangka menengah secara lengkap	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja telah dievaluasi secara lengkap sebagai dasar pertimbangan pengambilan Keputusan selanjutnya
b.	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.	Laporan kinerja pada BAB III menyajikan data perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	Februari 2023	Hasil monitoring dan evaluasi kinerja belum digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan	Hasil monitoring kinerja telah dilaksanakan dan digunakan untuk perbaikan program/kegiatan termasuk penyesuaian target

5. Capaian Kinerja

a.	Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan dengan memberikan alternatif perbaikan kinerja.	BBPOM di Jakarta selalu mengupayakan target kinerja dapat memenuhi target yang telah ditentukan, namun ada beberapa kendala sehingga target belum terpenuhi dan target melebihi 120% (tidak dapat disimpulkan) menjadi tindak lanjut di triwulan selanjutnya.	Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan	Februari 2023	Evaluasi triwulan belum dimanfaatkan untuk mengantisipasi tidak tercapainya target	Evaluasi internal telah digunakan untuk mengambil alternatif tindakan, walaupun tidak semua dapat ditindaklanjuti
----	---	---	---	---------------	--	---

<p>b.</p>	<p>Meningkatkan keandalan data kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan mampu telusur.</p>	<p>Terdapat sumber data yang valid, dapat dipercaya, dan tertelusur pada perhitungan data kinerja secara lengkap, sebagai contoh diantaranya pada IKU Pengujian yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 6. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 7. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 8. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP <p>Data dari IKU tersebut dapat dilihat sumber data yang valid dan dapat dipercaya dari https://linktr.ee/SiPanji dan https://linktr.ee/MRT_jakarta, sebagai dasar perhitungan hasil capaian kinerja di tahun 2022 dan tahun 2023</p>	<p>Rencana Aksi telah selesai dilaksanakan</p>	<p>Februari 2023</p>	<p>Belum tersedianya data kinerja yang lengkap dan mampu telusur</p>	<p>Membuat inovasi untuk pengumpulan data mentah yang digunakan untuk dasar perhitungan data kinerja, misal Sipanji untui menghitung data kinerja hasil uji laboratorium</p>
-----------	--	--	--	----------------------	--	--

3.15. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 adalah sebesar Rp48.085.117.000,00. Pada bulan Juni 2023 BPOM mendapat tambahan belanja barang KIE sebanyak Rp2.648.400.000,00. Surat Menteri Keuangan nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023, Balai Besar POM di Jakarta mendapat pemotongan sebesar Rp2.191.990.000,00.

Karena adanya kekurangan belanja pegawai, pada bulan Oktober Balai Besar POM di Jakarta mengusulkan tambahan belanja pegawai melalui Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kemudian disetujui melalui surat Direktur Jenderal Anggaran nomor : S-441/AG/AG.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran V Badan POM TA 2023 untuk Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Balai Besar POM di Jakarta TA 2023 sebesar Rp2.151.668.000,00. Dengan demikian, pagu akhir Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 adalah Rp50.693.015.000,00.

Terdapat 11 (sebelas) kali revisi DIPA di tahun 2023 yang 1 (satu) diantaranya adalah Pemotongan Anggaran APBN dan 2 (dua) lainnya penambahan anggaran untuk output QDC dan EBA 994.

Revisi ke-	Tanggal	Digital Stamp	Pagu (dalam Rupiah)
11	19 Jan 2024	0317 3007 5963 7003	50.693.015.000
10	29 Des 2023	0317 3007 5963 7003	50.693.015.000
9	21 Des 2023	0317 3007 5963 7003	50.693.015.000
8	22 Nov 2023	0317 3007 5963 7003	50.693.015.000
7	18 Okt 2023	0317 3007 5963 7003	50.693.015.000
6	23 Jul 2023	9539 0961 0957 3300	48.541.527.000
5	14 Jul 2023	3551 9907 9088 8077	50.733.517.000
4	20 Jun 2023	6217 7800 8600 7549	50.733.517.000

Revisi ke-	Tanggal	Digital Stamp	Pagu (dalam Rupiah)
3	18 Apr 2023	6846 7868 8765 0170	48.085.117.000
2	14 Feb 2023	6846 7868 8765 0170	48.085.117.000
1	27 Des 2022	6846 7868 8765 0170	48.085.117.000
0	17 Nov 2022	6925 0309 4537 0343	48.085.117.000

Tabel 118. Revisi DIPA BBPOM di Jakarta Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023, dari pagu anggaran sebesar Rp50.693.015.000,00, telah direalisasikan sebesar 50.288.046.613,00 atau 99,20%. Realisasi ini berada di atas target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan pada periode ini sebesar 91,89%, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	3.286.096.700	3.285.185.923	99,97%
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	8.454.185.100	8.447.305.476	99,92%
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	2.449.089.400	2.448.936.556	99,99%

SK4	<i>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta</i>	2.965.447.000	2.963.407.263	99,93%
SK5	<i>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta</i>	1.170.678.000	1.170.239.955	99,96%
SK6	<i>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta</i>	893.442.450	892.713.996	99,92%
SK7	<i>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta</i>	367.290.650	367.102.488	99,95%
SK8	<i>Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal</i>	5.917.599.700	5.846.852.328	98,80%
SK9	<i>Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal</i>	2.252.850.700	2.252.655.025	99,99%
SK10	<i>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan</i>	9.979.735.450	9.856.321.072	98,76%

SK11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	12.956.599.850	12.797.838.926	98,77%
------	---	----------------	----------------	--------

Tabel 119 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan



SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	PAGU	REALISASI	%
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	2.252.850.700	2.252.655.025	99,99%
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	413.518.150	413.484.197	99,99%
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	413.518.150	413.484.197	99,99%
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	637.766.650	637.728.593	99,99%
Persentase Obat yang memenuhi syarat	637.766.650	637.728.593	99,99%
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	150.281.100	150.229.444	99,97%
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	367.290.650	367.102.488	99,95%
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	367.290.650	367.102.488	99,95%
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	893.442.450	892.713.996	99,92%
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	519.000.350	518.713.469	99,94%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	132.165.850	131.941.050	99,83%
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	242.276.250	242.059.476	99,91%
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	2.965.447.000	2.963.407.263	99,93%
Indeks Pelayanan Publik UPT	176.165.850	175.941.050	99,87%
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	1.384.174.450	1.383.419.526	99,95%
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	146.035.500	145.961.288	99,95%
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	146.035.500	145.961.288	99,95%
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	814.689.400	814.454.203	99,97%
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	207.559.100	207.274.813	99,86%
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	90.787.200	90.395.094	99,57%
SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	8.454.185.100	8.447.305.476	99,92%
Jumlah desa pangan aman	1.059.366.000	1.058.135.992	99,88%

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	PAGU	REALISASI	%
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)	106.629.000	104.644.000	98,14%
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	703.121.000	702.489.213	99,91%
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	6.585.069.100	6.582.036.271	99,95%
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	2.449.089.400	2.448.936.556	99,99%
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.131.104.200	1.131.025.496	99,99%
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.317.985.200	1.317.911.061	99,99%
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1.170.678.000	1.170.239.955	99,96%
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1.170.678.000	1.170.239.955	99,96%
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	12.956.599.850	12.797.838.926	98,77%
Indeks RB UPT	5.780.051.550	5.709.494.155	98,78%
Nilai AKIP UPT	7.176.548.300	7.088.344.771	98,77%
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	9.979.735.450	9.856.321.072	98,76%
Indeks Profesionalitas ASN UPT	9.979.735.450	9.856.321.072	98,76%
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	3.286.096.700	3.285.185.923	99,97%
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	73.425.000	72.650.000	98,94%
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	3.212.671.700	3.212.535.923	100,00%
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	5.917.599.700	5.846.852.328	98,80%
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5.917.599.700	5.846.852.328	98,80%

Tabel 120 Rincian realisasi anggaran per Indikator

Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah belanja modal 100,00% dan belanja barang sebesar 99,83%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja pegawai sebesar 98,13%. Dibandingkan dengan target penyerapan anggaran per triwulan IV, berdasarkan pasal 9 PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, belanja modal minimal 90%, belanja barang minimal 90%, dan belanja pegawai minimal 95%, terdapat selisih lebih sebesar +10,00% pada belanja modal dan +9,83 pada belanja barang. +3,13% pada belanja pegawai.

Apabila dibandingkan dengan target penyerapan anggaran s.d 31 Desember 2023 sebesar 91,67%, maka realisasi periode ini telah di atas target penyerapan anggaran yang ditetapkan.



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	432747 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	PAGU	19,198,098,000	27,945,492,000	3,549,425,000	0	0	0	0	0	0	50,693,015,000
		REALISASI	18,839,565,514 (98.13%)	27,899,071,795 (99.83%)	3,549,409,304 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50,288,046,613 (99.20%)
		SISA	358,532,486	46,420,205	15,696	0	0	0	0	0	0	404,968,387
GRAND TOTAL		PAGU	19,198,098,000	27,945,492,000	3,549,425,000	0	0	0	0	0	0	50,693,015,000
		REALISASI	18,839,565,514 (98.13%)	27,899,071,795 (99.83%)	3,549,409,304 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	50,288,046,613 (99.20%)
		SISA	358,532,486	46,420,205	15,696	0	0	0	0	0	0	404,968,387

Gambar SEQ Gambar * ARABIC 102. Realisasi Belanja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan 31 Desember 2023

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan;
- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan;
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan;

Realisasi anggaran tersebut telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja yang telah disahkan.

3.12. Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan

output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian *input* (realisasi anggarannya).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika $IE < SE$ maka dianggap tidak efisien.

NO	SASARAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,97%	99,72%	1,00	0,80 (Tidak Efisien)
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-	99,92%	103,25%	1,04	0,88 (Efisien)

NO	SASARAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
	<i>masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta</i>				
SK3	<i>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta</i>	99,99%	104,96%	1,06	0,88 (Efisien)
SK4	<i>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta</i>	99,93%	106,19%	1,07	0,07 (Efisien)
SK5	<i>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta</i>	99,96%	100,02%	1,00	0,00 (Efisien)
SK6	<i>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta</i>	99,92%	109,26%	1,09	0,09 (Efisien)

NO	SASARAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,95%	100,89%	1,01	0,01 (Efisien)
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	98,80%	104,39%	1,07	0,07 (Efisien)
SK9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	99,99%	107,28%	1,07	0,07
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	98,76%	109,59%	0,99	-0,01 (Tidak Efisien)
SK11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	98,77%	98,72%	0,99	-0,01 (Tidak Efisien)
	JUMLAH	99,28%	104,02	1,04	0,26 (Efisien)

Tabel 121 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Terlihat pada tabel di atas, terdapat 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang efisien dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang tidak efisien, yaitu SK1 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta (-0,01) dan SK11 - Terkelolanya keuangan BBPOM di Jakarta secara akuntabel (-0,01). Hal ini disebabkan realisasi kinerja sasaran strategis tersebut lebih rendah dari realisasi anggarannya. Namun demikian, secara total terdapat Efektivitas Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan Tingkat Efisiensi 0,26.

Beberapa hal yang mendukung adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan tingkat prioritas;
2. Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi, Rapat Koordinasi dll menggunakan metode daring, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan lainnya;
3. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, sehingga menghemat biaya terutama untuk dokumentasi dan pencetakan;
4. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain sehingga capaian kinerja dapat meningkat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi untuk menyelesaikan target kinerja. Balai Besar POM di Jakarta berhasil memperoleh NPSS sebesar 104.82 dengan predikat Istimewa. Keberhasilan ini adalah buah dari upaya pelaksanaan strategi capaian kinerja dan dukungan berbagai pihak terkait

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Tahun 2023 untuk 11 sasaran strategis yang diukur melalui 29 indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis tahun 2023 diukur terhadap 29 indikator kinerja utama dan 4 indikator direktif penugasan. Pada tahun 2023, dari 29 indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 18 indikator mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik” ($100\% < x < 120\%$), 5 indikator mencapai kriteria “Baik” ($=100\%$) dan 6 indikator mempunyai capaian “Cukup” ($70\% \leq x < 100\%$) Sedangkan untuk semua indikator direktif penugasan mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik” ($100\% < x < 120\%$).
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar sebesar Rp 50.693.015.000 (lima puluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 50.288.046.613 (lima puluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,20%.

4.2. SARAN

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang memiliki kriteria Cukup pada Tahun 2023. Terhadap capaian ini, akan dilaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Belum tercapainya kinerja pada tahun 2023 dipengaruhi oleh banyaknya sampel acak yang tidak memenuhi persyaratan baik dari segi penandaan maupun dari hasil uji laboratorium, sehingga menyebabkan persentase makanan yang memenuhi syarat tidak mencapai target. Dari 732 sampel acak yang masuk laboratorium, seluruh sampel telah selesai dilakukan pengujian (100%). Sebanyak 680 sampel memenuhi syarat (92,89%) dan 52 sampel tidak memenuhi syarat (7,10%). Selanjutnya dilakukan Kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia secara maksimal dan terus menerus untuk dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Hal utama yang menyebabkan tingginya produk yang tidak memenuhi penandaan maupun persyaratan pengujian adalah komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya. Selain itu sistem pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif turut mempengaruhi kualitas produk Obat. Saran yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Intervensi pengawasan secara rutin dan konsisten kepada industri farmasi/kosmetik/obat tradisional untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP/*Good Manufacturing Practice*), (CAPA) dan pemantauan secara berkesinambungan sehingga menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- b. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan, terutama untuk pelaku usaha yang bergerak

di bidang obat tradisional dan kosmetik. Hal ini telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan secara rutin.

- c. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS di luar DKI Jakarta diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan.
- d. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di masa mendatang
- e. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat (termasuk obat tradisional dan kosmetik) kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman dan berkualitas.

3. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Terhadap IKU ini akan dilakukan upaya peningkatan kinerja yang dilakukan dimasa yang akan datang sebagai berikut :

- a. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- b. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.

- c. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas

4. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Capaian kinerja persentase makanan yang diuji sesuai standar dipengaruhi oleh kompetensi personal yang melakukan pengujian, validitas metode pengujian, kondisi peralatan yang digunakan, ketersediaan kebutuhan pengujian dan manajemen laboratorium. Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- a. Peningkatan kompetensi laboratorium dan personel penguji dilakukan dengan mengikutsertakan personel penguji dalam berbagai bimbingan teknis dan magang
- b. Pemanfaatan dan pemenuhan peralatan laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal guna menjamin kelancaran dan pelaksanaan pengujian.
- c. Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian terus menerus dilakukan guna menjamin tersedianya metode yang valid dalam pengujian dengan meningkatkan metode uji dan melakukan verifikasi Metoda Analisis, mengikuti Uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal, juga mengikuti Uji Kolaborasi antar laboratorium. Peningkatan metode uji tersebut juga meliputi penambahan jenis metode untuk satu parameter uji sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terhadap kendala kerusakan alat yang dipakai secara rutin agar kecepatan pengujian tidak terhambat.
- d. Perencanaan kebutuhan pengujian (reagen, baku pembanding, test kit dan lain-lain) harus dilakukan secara lebih tepat agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

5. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Dengan adanya konsep baru regionalisasi laboratorium, BBPOM di Jakarta khususnya Laboratorium obat mengalami perubahan kelas terapi yang harus diuji, sehingga capaian pemenuhan ruang lingkup dari kelas terapi sebelumnya tidak terhitung lagi namun harus menambah capaian ruang lingkup pengujian dengan kelas terapi yang baru. Hal ini menyebabkan capaian pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup menurun. Selain itu pemindahan alat laboratorium berteknologi tinggi dari BBPOM di Jakarta ke BBPOM di Semarang juga menurunkan capaian pemenuhan terhadap Standar Peralatan. Saran untuk perbaikan terkait capaian ini adalah sebagai berikut :

- a. Konsep Regionalisasi Laboratorium menambah luasnya daerah / lokasi sampling sehingga menambah jenis sample dan sediaan yang diuji oleh Laboratorium Obat BBPOM di Jakarta dan ruang lingkup pengujian bertambah.
- b. Meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan internal, pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- c. Meningkatkan pemenuhan ruang lingkup pengujian melalui verifikasi Metode Analisis, keikutsertaan uji profisiensi dan uji banding serta Menjadi penyelenggara Uji Banding antar laboratorium
- d. Melakukan identifikasi alat-alat laboratorium yang sudah kurang berfungsi untuk diremajakan atau diganti dengan pengadaan alat lain yang lebih dibutuhkan sesuai perkembangan terkini untuk memenuhi standar ruang lingkup peralatan

6. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta

Terhadap Nilai Kinerja Anggaran yang belum pernah mencapai target sejak awal RPJMN Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian target. Selain itu untuk peningkatan berkelanjutan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terus menerus pada periode selanjutnya serta Halaman III DIPA yang perlu dikawal ketat serta membuat inovasi yang mendukung kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi inovasi.





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Jakarta
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Jakarta

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88.8
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.33
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.55

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	88
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	28
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	81
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.7



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	82	87,48	106,68	Sangat Baik
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	92,9	96,77	Cukup
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	78,34	95,54	Cukup
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	92,45	110,06	Sangat Baik
		5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	80,59	89,54	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	6 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89	91,89	103,25	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	88,8	97,4	109,68	Sangat Baik
		8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,33	80,1	102,26	Sangat Baik
		9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	92	94,71	102,95	Sangat Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91,85	100,93	Sangat Baik
		11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	90,87	110,82	Sangat Baik
		12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	96,95	108,93	Sangat Baik
		13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	73,93	113,74	Sangat Baik
		14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	79,96	102,51	Sangat Baik
		15 Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	4,55	4,84	106,37	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	79	79	100,00	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,86	100,06	Sangat Baik
		18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	100,00	Baik
		19 Jumlah desa pangan aman	28	28	100,00	Baik
		20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	4	100,00	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,51	98,51	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61	61,54	100,89	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24 Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	84,4	90,41	107,12	Sangat Baik
		25 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	82,34	101,65	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,75	90,92	107,28	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>	87	86,28	99,17	Cukup
		28 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,5	3	120,00	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93,7	92,5	98,72	Cukup

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,97%	99,72%	1,00	0,80 (Tidak Efisien)
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,92%	103,25%	1,04	0,88 (Efisien)

SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,99%	104,96%	1,06	0,88 (Efisien)
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,93%	106,19%	1,07	0,07 (Efisien)
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,96%	100,02%	1,00	0,00 (Efisien)
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,92%	109,26%	1,09	0,09 (Efisien)
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,95%	100,89%	1,01	0,01 (Efisien)

SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	98,80%	104,39%	1,07	0,07 (Efisien)
SK9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	99,99%	107,28%	1,07	0,07
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	98,76%	109,59%	0,99	-0,01 (Tidak Efisien)
SK11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	98,77%	98,72%	0,99	-0,01 (Tidak Efisien)
JUMLAH		99,28%	104,02	1,04	0,26 (Efisien)

PENGHARGAAN TAHUN 2023



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



PEMBINA SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN KATEGORI SMA



SERTIFIKAT

NO: 0003/RK/14/PUSAKOM/2023

Diberikan kepada:

Balai Besar POM di Jakarta

sebagai

UPT dengan Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Terbanyak
dalam Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap
Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
Tahun 2023

Jakarta, 22 Desember 2023

Plt. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si



SERTIFIKAT

NO: 0004/RK/14/PUSAKOM/2023

Diberikan kepada:

Balai Besar POM di Jakarta

sebagai

UPT dengan Jumlah Responden Survei Terbanyak
dalam Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap
Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
Tahun 2023

Jakarta, 22 Desember 2023

Plt. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

APRESIASI ATAS CAPAIAN SURVEY IKEPU TAHUN 2023



Peringkat 1 Nilai Kinerja Anggaran Tahun pada Balai Besar/Balai POM 2023



**DAFTAR INDIKATOR KINERJA YANG DIKECUALIKAN DALAM
PERHITUNGAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
(NPSS) TAHUN 2023**





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PR.04.01.2.21.11.23.881 Jakarta, 21 November 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dikecualikan dalam
Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Balai Besar/Balai POM

di

Tempat

Sehubungan dengan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) unit kerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja organisasi, terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilakukan perhitungan/atau tidak dapat diperoleh realisasinya dengan rincian sebagaimana terlampir. Oleh karena itu, indikator kinerja tersebut dikecualikan/ tidak diperhitungkan dalam pencapaian NPSS tahun 2023.

Demikian kami sampaikan. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama



Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Nama Unit Kerja	Indikator Kinerja	Justifikasi
8	Balai Besar/Balai POM	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	<p>Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.</p> <p>Nilai pemenuhan laboratorium BB/Balai POM terhadap SKL = (Nilai Pemenuhan SRL + Nilai Pemenuhan Standar Kompetensi + Nilai Pemenuhan Standar Peralatan) : 3</p> <p>Penerapan konsep baru regionalisasi laboratorium menyebabkan perubahan standar ruang lingkup, baik Balai Regional maupun anggota, yang diikuti dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Penguji. Semester II tahun 2023 ini merupakan masa transisi pemenuhan kebutuhan sumber daya pengujian unggul di Balai Regional, dimana pada periode ini terjadi pemindahan peralatan dari Balai Anggota ke Balai Regional yang belum memiliki alat tersebut, pendampingan pengujian dari PPPOMN,</p>

DAFTAR INDIKATOR KINERJA YANG DAPAT DIKONVERSI



DALAM PERHITUNGAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS) TAHUN 2023

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS
NOMOR : PR.04.02.21.01.24.12

Yth. : Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam
Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023
Lampiran : -
Tanggal : 8 Januari 2024

Sehubungan dengan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) unit kerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja organisasi tahun 2023, terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konversi indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.
2. Beberapa indikator kinerja yang dapat dikonversi sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Ketentuan
a.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target pada Perjanjian Kinerja: ➤ Balai Besar/Balai POM 100% ➤ Loka POM 50% Realisasi: ➤ Balai Besar/Balai POM 100% ➤ Loka POM 50%
b.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target pada Perjanjian Kinerja: ➤ Balai Besar/Balai POM 100% ➤ Loka POM 50% Realisasi: ➤ Balai Besar/Balai POM 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja	Ketentuan
		➤ Loka POM 50%
c.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target pada Perjanjian Kinerja: ➤ Balai Besar/Balai/Loka POM 100% Realisasi: ➤ Balai Besar/Balai/Loka POM 100%

3. Indikator kinerja yang dilakukan konversi sebagaimana ketentuan pada poin 2, realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (*e-performance*) adalah 120% dari target indikator bersangkutan. Contoh target indikator A adalah 100%, maka realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (*e-performance*) adalah 120%.

Demikian kami sampaikan. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Ali Muharam

Tembusan Yth:
Sekretaris Utama (sebagai laporan)